



STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Melalui Peningkatan Kapasitas SDM dan IT pada Ekowisata Mangrove

PENULIS

Prof. Dr. Ir. Kordiyana K Rangga, M.S.
Tyas Sekartiara Syafani, S.P., M.Si.

Editor

Prof. Dr. Ir. Irwan Effendi, M.S.
Dr. Helvi Yanfika, S.P., M.E.P.

STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Melalui Peningkatan Kapasitas SDM dan IT pada
Ekowisata Mangrove

**Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta
Lingkup Hak Cipta**

Pasal 1

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pidana Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Melalui Peningkatan Kapasitas SDM dan IT pada
Ekowisata Mangrove

Penulis :

Prof. Dr. Ir. Kordiyana K Rangga, M.S.
Tyas Sekartira Syafani, S.P., M.Si.

Editor :

Prof. Dr. Ir. Irawan Effendi, MG.
Dr. Helvi Yanfika, S.P., M.E.P.



STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Melalui Peningkatan Kapasitas SDM dan IT pada
Ekowisata Mangrove

Penulis

Prof. Dr. Ir. Kordiyana K Rangga, M.S.
Tyas Sekartiara Syafani, S.P., M.Si.

Editor :

Prof. Dr. Ir. Irawan Effendi, MG.
Dr. Helvi Yanfika, S.P., M.E.P.

Desain Cover & Layout

Sahrul Ari Irawan, S.P.,M.P

Sumber Gambar :

Penerbit

AURA PUBLISHING

Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro, Komplek Unila
Gedongmeneng Bandar Lampung
HP. 081281430268
E-mail : redaksiaura@gmail.com
Website : www.aura-publishing.com

ISBN :

xii + 424 hal : 15,5 x 23 cm

Cetakan, Januari 2024

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Strategi Pemberdayaan Masyarakat melalui Peningkatan Kapasitas SDM dan IT pada Ekowisata Mangrove

Penulis : Prof. Dr. Ir. Kordiyana K Rangga, M.S.
Tyas Sekartiara Syafani, S.P., M.Si.

Unit Kerja : Fakultas Pertanian, Universitas Lampung

Penerbit : Aura (Anugrah Utama Raharja)

Jumlah Halaman : 145

ISBN : 978-623-211-437-1

Tahun Terbit : 2024

Bandar Lampung, 21 Februari 2024

Mengetahui
Dekan,



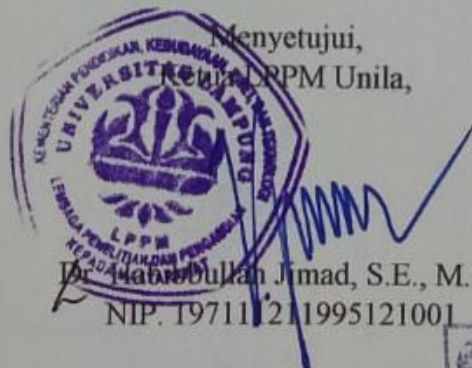
Dr. Ir. Kuswanta Futas Hidayat, M.P.
NIP. 196411181989021002

Penulis,

Prof. Dr. Ir. Kordiyana K Rangga, M.S.
NIP. 195904251984032001

Menyetujui,

Kepala LPPM Unila,



Dr. Habiburrahman Jimad, S.E., M.Si.
NIP. 197111211995121001

DOKUMEN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS LAMPUNG	
TGL	15-3-2024
NO INVEN	05/B/B/N/FP/2024
JENIS	Buku Hasil Penelitian
PARAF	8f

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji Syukur ke hadirat Allah S.W.T Tuhan Y.M.E, atas karunia-Nya, sehingga Book Chapter dengan judul “ Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Melalui Peningkatan Kapasitas SDM dan IT (Teknologi Informasi) pada Ekowisata Mangrovedi Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur” dapat diselesaikan dengan baik.

Book Chapter ini merupakan bagian dari penerapan kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi Universitas Lampung, yaitu merupakan hasil dari kegiatan yang dilakukan oleh Tim Penelitian Universitas Lampung melalui pembiayaan Skema Riset Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Universitas Lampung tahun 2023. *Book Chapter* ini terdiri dari 10 Bab yang berisikan hasil kegiatan Riset MBKM serta kajian pustaka/literatur. *Book Chapter* ini dipersiapkan untuk semua pihak yaitu dosen, mahasiswa, praktisi dan pihak lain yang ingin focus mempelajari, mengkaji lebih dalam terkait Pemberdayaan Masyarakat pada Ekowisata Mangrove.

Ucapan terimakasih disampaikan kepada berbagai pihak yang telah membantu, sehingga buku ini dapat diterbitkan, khususnya kepada Riset Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) LPPM Universitas Lampung tahun 2023, dan Tim Peneliti Mahasiswa Program Studi Penyuluhan Pertanian Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Lampung yaitu: Afwa Akbar, Angga Saputra, Shafira Nourma, Intan Permata Sari, Fista Ananda, Yanuari Prayuda K, Aryo Migo Syah Alam, Akbar Rustiana, Anjel Eka Safitri, Adreanus Yoga Pratama, dan Azirah Nur Rajna.

Penulisan buku ini masih jauh dari kata sempurna, kritik membangun dari para pembaca sangat Penulis harapkan, mudah-mudahan buku ini bermanfaat.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, 5 Januari 2024

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB 1. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	1
A. PENDAHULUAN	1
B. PEMBAHASAN	4
C. PENUTUP	22
D. DAFTAR PUSTAKA	22
BAB 2. HUTAN MANGROVE SEBAGAI EKOWISATA	26
A. PENDAHULUAN	26
B. PEMBAHASAN	28
C. PENUTUP	55
D. DAFTAR PUSTAKA	56
BAB 3. KARAKTERISTIK MASYARAKAT PESISIR DALAM PENGEMBANGAN EKOWISATA	59
A. PENDAHULUAN	59
B. METODE PENELITIAN	60
C. PEMBAHASAN	61
D. PENUTUP	75
E. DAFTAR PUSTAKA	75

BAB 4. HASIL TANGKAPAN LAUT DAN OLAHAN SEBAGAI POTENSI DESA UNTUK PENGEMBANGAN EKOWISATA	79
A. PENDAHULUAN	79
B. METODE PENELITIAN	80
C. PEMBAHASAN	80
D. PENUTUP	85
E. DAFTAR PUSTAKA	85
BAB 5. KERAJINAN HASIL LAUT SEBAGAI POTENSI DESA EKOWISATA MANGROVE	87
A. PENDAHULUAN	87
B. METODE PENELITIAN	88
C. PEMBAHASAN	88
D. PENUTUP	90
E. DAFTAR PUSTAKA	91
BAB 6. PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI (IT) UNTUK PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT EKOWISATA	92
A. PENDAHULUAN	92
B. METODE PENELITIAN	93
C. PEMBAHASAN	93
D. PENUTUP	97
E. DAFTAR PUSTAKA	97
BAB 7. KAPASITAS MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN EKOWISATA MANGROVE	99
A. PENDAHULUAN	99
B. METODE PENELITIAN	101
C. PEMBAHASAN	102
D. PENUTUP	107
E. DAFTAR PUSTAKA	108

BAB 8. FAKTOR-FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL YANG MEMPENGARUHI KAPASITAS MASYARAKAT PESISIR DALAM PENGEMBANGAN EKOWISATA MANGROVE ...	109
A. PENDAHULUAN	109
B. METODE PENELITIAN	110
C. PEMBAHASAN	111
D. PENUTUP	125
E. DAFTAR PUSTAKA	126
BAB 9. MODEL STRATEGI PENGEMBANGAN EKOWISATA MANGROVE DI DESA MARGASARI KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI, LAMPUNG TIMUR	129
A. PENDAHULUAN	129
B. METODE PENELITIAN	130
C. PEMBAHASAN	131
D. PENUTUP	139
E. DAFTAR PUSTAKA	139
BIODATA PENULIS	140

DAFTAR TABEL

3. 1.	Sebaran responden berdasarkan kelompok umur	68
3. 2.	Sebaran lama tinggal responden di desa	69
3. 3.	Tempat Tinggal Responden	70
3. 4.	Sebaran responden berdasarkan pendapatan rumah tangga.....	71
3. 5.	Sebaran responden berdasarkan jumlah anggota rumah tangga	72
8. 1.	Penggunaan teknologi yang dilakukan kelompok masyarakat wilayah Desa Margasari	115
9. 1.	Matriks SWOT pengembangan ekowisata mangrove Desa Margasari, Kecamatan Labuhan Maringgai	135

DAFTAR GAMBAR

2. 1. Hutan Mangrove	30
2. 2. Spesies Mangrove <i>Avicennia Alba</i> Blume	42
2. 3. Spesies Mangrove <i>Rhizophora</i>	43
2. 4. Spesies Mangrove <i>Bruguiera</i>	44
2. 5. Spesies Mangrove <i>Sonneratia</i>	45
2. 6. Spesies Mangrove <i>Leptoptilos javanicus</i>	46
2. 7. Spesies Mangrove <i>Anhinga melanogaster</i>	47
2. 8. Spesies Mangrove <i>Ardea alba</i>	48
2. 9. Spesies Mangrove <i>Haliastur indus</i>	49
2. 10. Spesies Mangrove <i>Todirhamphus chloris</i>	50
2. 11. Spesies Mangrove <i>Charadrius javanicus</i>	51
2. 12. Spesies Mangrove <i>Charadrius alexandrius</i>	52
2. 13. Spesies Mangrove <i>Thalasseus bergii</i>	53
2. 14. Spesies Mangrove <i>Elanus caeruleus</i>	54
2. 15. Rajungan	55
3. 1. Keikutsertaan responden ke lembaga tertentu	73
3. 2. Keikutsertaan responden dengan kegiatan pendampingan	74
4. 1. Proses penjemuran ikan asin	83
5. 1. Contoh Souvenir dari Desa Maragasari, Kec. Labuhan Maringgai	89
6. 1. Persepsi responden terkait dengan pentingnya alat teknologi	95
6. 2. Persepsi responden terhadap keterbatasan pengembangan mangrove disebabkan karena keterbatasan dalam kemampuan penggunaan teknologi ...	96

6.3.	Persepsi responden terhadap kecocokan alat teknologi untuk ekowisata mangrove di Desa Margasari	97
7.1.	Keikutsertaan masyarakat dalam pengembangan ekowisata	103
7.2.	Diagram partisipasi masyarakat Desa Margasari dalam	105
7.3.	Pendapat masyarakat terhadap pentingnya pengembangan ekowisata	107
8.1.	Diagram tingkat pengetahuan terhadap fungsi dan manfaat hutan mangrove	113

BAB 1

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Oleh:

Prof. Dr. Ir. Kordiyana K Rangga, M.S.

Tyas Sekartiara Syafani, S.P.,M.Si.

A. PENDAHULUAN

Penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat pada dasarnya merupakan proses untuk membuat masyarakat menjadi berdaya. Untuk menggerakkan kembali kemandirian masyarakat dalam pembangunan di komunitasnya, maka diperlukan dorongan-dorongan atau gagasan awal untuk menyadarkan kembali peran dan posisinya dalam kerangka untuk membangun masyarakat madani. Proses penyadaran masyarakat tersebut dilakukan melalui konsep-konsep pengembangan kapasitas. Pengembangan kapasitas masyarakat pada hakikatnya merupakan usaha meningkatkan kemampuan masyarakat itu sendiri. Apabila masyarakat sebagai pihak yang paling berkepentingan belum memahami secara betul makna dari pengembangan kapasitas itu sendiri dan tidak memberikan tanggapan secara positif terhadap upaya-upaya pengembangan kapasitas yang dilaksanakan, maka bisa dipastikan upaya tersebut tidak akan berdaya guna dan berhasil sesuai tujuan yang ingin dicapai. Bartle (2019) menjelaskan bahwa terdapat empat tahapan dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu tahap penyadaran, tahap pemahaman, tahap pemanfaatan, dan tahap pembiasaan.

Idealnya, proses pengembangan kapasitas masyarakat harus dijalankan dengan menyesuaikan kemampuan dan karakteristik masyarakat setempat, sehingga bisa jadi proses tersebut memerlukan waktu dan pendekatan yang berbeda-beda antar satu komunitas dengan komunitas lainnya. Hal ini disebabkan karena latar belakang pemikiran yang beragam yang dipengaruhi oleh status sosial, jenis kelamin, usia, pekerjaan dan tingkat pendidikan (Abraham, 2015). Hal tersebut menjadikan derajat keberadaan masyarakat akan sangat bervariasi meskipun proses pengembangan kapasitas dilakukan dengan pendekatan yang sama dan dalam waktu yang bersamaan.

Pemberdayaan masyarakat menjadi landasan penting dalam pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Hal ini bukan hanya tentang memberikan bantuan atau sumber daya, tetapi juga tentang memberikan akses, keterampilan, dan dukungan yang memungkinkan individu dan kelompok untuk mengambil kendali atas kehidupan masyarakat itu sendiri. Beberapa hal yang menjadi aspek pencapaian dalam pemberdayaan masyarakat, sehingga pemberdayaan menjadi penting untuk dilakukan, yaitu sebagai berikut:

1) Kemandirian

Pemberdayaan memberikan kemampuan pada masyarakat untuk mengontrol hidup mereka sendiri, baik secara ekonomi maupun sosial. Ini memberikan mereka kemandirian untuk membuat keputusan dan bertindak sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri.

2) Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan

Pemberdayaan memberikan warga masyarakat akses dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Ini membantu memastikan bahwa kebijakan yang dibuat memperhatikan kebutuhan sebenarnya dari masyarakat tersebut.

3) Peningkatan Kesejahteraan

Ketika masyarakat diberdayakan, mereka memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber daya, pendidikan, kesehatan, dan

kesempatan ekonomi. Hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan standar hidup mereka.

4) Pengembangan Potensi

Pemberdayaan membantu masyarakat mengembangkan potensi mereka. Ini bisa berarti memperluas keterampilan melalui pelatihan, menyediakan akses ke informasi, atau mendukung inisiatif kewirausahaan lokal.

5) Pelestarian Budaya dan Identitas

Pemberdayaan masyarakat juga memainkan peran dalam pelestarian warisan budaya dan identitas lokal. Ini memungkinkan masyarakat untuk menjaga kearifan lokal mereka sambil beradaptasi dengan perubahan yang terjadi.

6) Pengurangan Ketimpangan

Dengan memberdayakan kelompok-kelompok yang rentan atau terpinggirkan, pemberdayaan dapat membantu mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi yang ada di masyarakat.

7) Ketahanan Terhadap Perubahan

Masyarakat yang diberdayakan cenderung lebih tangguh dalam menghadapi perubahan, baik itu perubahan lingkungan, sosial, atau ekonomi. Mereka lebih mampu beradaptasi dan mengatasi tantangan.

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah proses yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan keterlibatan individu-individu dalam sebuah komunitas. Dalam konteks lebih luas, pemberdayaan masyarakat bukan hanya tentang memberi akses kepada seseorang atau komunitas, tetapi juga tentang upaya yang memungkinkan orang tersebut menjadi bagian dari proses pembuatan keputusan yang memengaruhi hidup orang itu sendiri. Hal ini memperkuat ikatan sosial, meningkatkan rasa memiliki, dan menghasilkan perubahan positif yang berkelanjutan dalam komunitas.

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian Pemberdayaan (*Empowerment*)

Pemberdayaan merupakan terjemahan dari kata "*empowerment*" (Hutomo, 2000). Menurut kamus Oxford dalam Sumaryo (2009), kata *empower* sinonim dengan memberi daya atau kekuatan, sedangkan menurut kamus *Merriam Webster online* menyamakan *empower* dengan: (1) memberi kewenangan resmi atau kekuasaan yang sah (*to give official authority or legal power to*), (2) memberikan kemungkinan (*to enable*), atau (3) mempromosikan aktualisasi diri atau pengaruh dari (*to promote the self-actualization or influence of*).

Pemberdayaan (*empowerment*) merupakan alternatif pembangunan yang berpusat kepada orang dan lingkungan mereka dibandingkan produksi dan keuntungan semata (Friedman, 1991). Rangga (2014) menyatakan ada dua pendekatan yang dilakukan dalam pembangunan selama ini, yaitu pendekatan *top-down* dan pendekatan *bottom-up*. Pendekatan *top-down* merupakan *blue print strategy* yaitu pendekatan yang bersumber pada pemerintah, masyarakat dianggap sebagai sasaran/objek pembangunan. Perencanaan *top-down* mempunyai kelemahan yaitu menempatkan peran pemerintah lebih besar dan kurang memperhatikan kondisi sosial budaya serta sumber daya lokal yang ada di masyarakat, sehingga mematikan inisiatif dan kreativitas masyarakat. Perencanaan *top-down* ini biasanya dilaksanakan oleh sekelompok elit politik; melibatkan lebih banyak teknokrat; mengandalkan otoritas; dengan argumentasi efisiensi, penegakan aturan, konsistensi *input-target-output*, dan masyarakat masih sulit dilibatkan. Pendekatan pembangunan *bottom-up* merupakan pendekatan pembangunan yang memposisikan masyarakat sebagai subjek pembangunan, masyarakat terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pendekatan *bottom-up* merupakan pendekatan yang ideal dalam pembangunan yang memperhatikan aspirasi, inisiatif, kreativitas dan mengakomodasi kondisi sosial budaya setempat. Konsep ini dikenal sebagai pembangunan dengan pendekatan partisipatif atau pemberdayaan masyarakat.

Menurut Adi (2008), perencanaan pembangunan partisipatif merupakan pola pendekatan perencanaan pembangunan yang melibatkan peran serta masyarakat pada umumnya, bukan saja sebagai objek tetapi sekaligus sebagai subjek pembangunan, perencanaan pembangunan benar-benar dari bawah (*bottom-up approach*). Perencanaan dengan model *bottom-up* dilaksanakan secara kolektif; mengandalkan persuasi; dan argumentasinya efektivitas, kinerja (*performance, outcome*), bukan sekedar hasil seketika, *mengutamakan* kearifan lokal, serta masyarakat diasumsikan sudah paham hak-hak dan kebutuhan mereka.

Agar berlangsungnya suatu pemberdayaan diperlukan dua perubahan yaitu: (1) individu maupun kelompok, harus mengembangkan kepercayaan diri, kemandirian dan keterampilan untuk memanfaatkan sumberdaya mereka, ini berarti mengurangi ketergantungan pada input eksternal dan kebijakan; (2) harus ada perubahan persepsi orang tentang hubungan mereka dengan orang lain. Senada dengan Ife (2002), yang mengatakan bahwa "*empowerment aims to increase the power of the disadvantage*", yaitu pemberdayaan adalah meningkatkan kekuatan/kekuasaan dari kondisi yang tidak menguntungkan. Waluyo (2012) mengutip Narayan (2002) yang mendefinisikan pemberdayaan: "*Empowerment is the expansion of assets and capabilities of poor people to participate in, negotiate with, influence, control, and hold accountable institutions that affect their lives.*" adalah untuk meningkatkan kebebasan memilih dan bertindak (*freedom of choice and action*), pemberdayaan harus mendukung 4 elemen penting yaitu: (1) akses terhadap informasi, (2) partisipasi, (3) *accountability*, dan (4) kapasitas organisasi lokal. Aspek pemberdayaan masyarakat adalah kegiatan meningkatkan kemampuan masyarakat miskin agar mau dan mampu mengakses berbagai unsur pemberdayaan dengan pendekatan pendampingan, peningkatan kapasitas pelayanan dan pembelaan menuju kemandirian.

Menurut World Bank (2001) dan Mardikanto (2010), pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat (miskin) untuk mampu dan berani bersuara (*voice*) atau menyuarakan

pendapat, ide, atau gagasan-gagasannya, serta kemampuan dan keberanian untuk memilih (*choice*) sesuatu (konsep, metoda, produk, tindakan, dan lainnya) yang terbaik bagi pribadi, keluarga, dan masyarakatnya. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat merupakan proses meningkatkan kemampuan dan sikap kemandirian masyarakat (Rangga, 2014).

Keberdayaan masyarakat adalah suatu keadaan masyarakat telah memiliki kekuatan/kemampuan (*power*) sebagai hasil pemberdayaan (*empowerment*) karena kondisi semula yang tidak berdaya (*powerless*) (Hikmat, 2006). Pemberdayaan merupakan langkah memberdayakan seseorang yang memiliki martabat dan harga diri, sebagai konsekuensi dari kesadaran kritis. Konsep pemberdayaan dipercaya mampu menjawab tantangan jika melibatkan organisasi kemasyarakatan lokal yang berfungsi dalam pembangunan. Organisasi kemasyarakatan lokal merupakan pemegang peran sentral terjadinya perubahan sosial, karena merekalah yang paling mengerti karakter lapisan masyarakat bawah (Wrihatnolo dan Dwidjowijoto, 2007).

Menurut Zubaedi (2007), langkah yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan pemberdayaan di lapang adalah: (a) membentuk kelompok, (b) membangkitkan partisipasi masyarakat, (c) mengembangkan mekanisme musyawarah, dan (d) membangun jaringan lokal sebagai mitra kerja. Ada 5 strategi dalam pemberdayaan (Ekawati, 2005), yaitu: (1) program pengembangan sumberdaya manusia, (2) pengembangan kelembagaan kelompok, (3) pemupukan modal swadaya, (4) pengembangan usaha produktif, dan (5) program informasi tepat guna.

Dalam pemberdayaan masyarakat, terdapat sejumlah hambatan kebijakan dan kelembagaan, antara lain: (1) terbatasnya komitmen dan pemahaman manajer senior dan para penentu kebijakan terhadap prinsip dan keuntungan yang diperoleh dari pendekatan pemberdayaan masyarakat, (2) kurangnya orientasi pada klien oleh aparat pemerintah, (3) finansial masih membatasi penentuan keputusan tingkat lokal, (4) penyusunan kebijakan rinci menghambat timbulnya kreativitas lokal, (5) kekurangan data monitoring dan evaluasi, dan (6) struktur pemerintahan dan proses perencanaan yang bersifat membatasi.

2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Suharto (2010) menyatakan bahwa dalam pemberdayaan ada proses dan tujuan. Proses pemberdayaan merupakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuatan dan keberdayaan kelompok yang lemah di dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan, sedangkan sebagai tujuan pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai dalam sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kehidupannya. Terkait dengan hal ini, pembangunan merujuk pada upaya perbaikan terutama perbaikan mutu hidup manusia baik secara fisik, mental, ekonomi maupun sosial budaya. Menurut Mardikanto (2013), terdapat enam tujuan pemberdayaan masyarakat yaitu:

- a. Perbaikan Kelembagaan (*better institution*), merupakan perbaikan kegiatan atau tindakan yang dilakukan diharapkan akan memperbaiki kelembagaan termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha.
- b. Perbaikan Usaha (*better business*). Perbaikan pendidikan (semangat belajar), perbaiki aksesibilitas, kegiatan dan perbaikan kelembagaan diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan.
- c. Perbaikan Pendapatan (*better income*), adanya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki pendapatan yang diperoleh termasuk pendapatakan keluarga dan masyarakat.
- d. Perbaikan Lingkungan (*better environment*), perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan baik fisik maupun sosial karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.
- e. Perbaikan Kehidupan (*better living*), tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang baik diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.
- f. Perbaikan masyarakat (*better community*) kehidupan yang lebih baik yang didukung oleh lingkungan akan menimbulkan terwujudnya kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

3. Filosofi dan Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Merujuk pada pengertian bahwa pemberdayaan masyarakat sebagai proses penyuluhan pembangunan, maka filosofi pemberdayaan dapat digali dengan menggunakan konsep-konsep filosofi penyuluhan. Falsafah 3-T: *teach, truth, and trust* (pendidikan, kebenaran dan kepercayaan/keyakinan) telah lama dikembangkan di Amerika Serikat. Artinya, pemberdayaan merupakan kegiatan pendidikan untuk menyampaikan kebenaran yang telah diyakini. Dengan kata lain, dalam pemberdayaan, masyarakat dididik untuk menerapkan setiap inovasi (informasi baru) yang telah diuji kebenarannya dan telah diyakini akan dapat memberikan manfaat (ekonomi maupun non ekonomi) bagi perbaikan kesejahteraannya.

Rumusan lain oleh Kelsey dan Hearne (1955), dalam Mardikanto (2010a) menyatakan bahwa falsafah pemberdayaan adalah: bekerja bersama masyarakat untuk membantunya agar mereka dapat meningkatkan harkatnya sebagai manusia (*helping people to help themselves*) "membantu masyarakat agar dapat membantu dirinya sendiri". Dari pemahaman seperti itu, terkandung pengertian bahwa:

- (1) Penyuluh/fasilitator harus bekerjasama dengan masyarakat, bukan bekerja untuk masyarakat. Fasilitator bukan sebagai penentu atau pemaksa, tetapi harus mampu menciptakan suasana dialogis dengan masyarakat dan menumbuhkan, menggerakkan, serta memelihara partisipasi masyarakat.
- (2) Pemberdayaan tidak boleh menciptakan ketergantungan, tetapi harus mampu mendorong semakin terciptanya kreativitas dan kemandirian masyarakat agar semakin memiliki kemampuan untuk berswakarsa, swadaya, swadana, dan swakelola bagi terselenggaranya kegiatan-kegiatan guna tercapainya tujuan, harapan, dan keinginan masyarakat sarasanya.
- (3) Pemberdayaan harus selalu mengacu kepada terwujudnya kesejahteraan ekonomi masyarakat dan peningkatan harkatnya sebagai manusia.

Falsafah pemberdayaan sering disebut ajaran Lao Tzu sebagai falsafah atau sebagai pegangan kerja bagi para penyuluh/fasilitator pemberdayaan (Mardikanto, 2010a) Ajaran tersebut adalah:

“Pergilah kepada mereka (masyarakat), hiduplah bersama mereka, belajar dari mereka, mulailah dari mereka, bekerjalah bersama mereka, bangunlah di atas apa yang mereka miliki, tetapi sebagai pemimpin yang terbaik, ketika semua tugas telah diselesaikan, pekerjaan telah dilengkapi, mereka (masyarakat) akan mencatat: kami telah menyelesaikannya sendiri”.

Menurut Soedijanto (2001), prinsip-prinsip pemberdayaan sebagai berikut: (a) kesukarelaan, artinya, keterlibatan dalam kegiatan pemberdayaan tidak boleh karena adanya pemaksaan; (b) otonom, yaitu kemampuannya untuk mandiri atau melepaskan diri dari ketergantungan; (c) keswadayaan, yaitu kemampuan merumuskan, melaksanakan kegiatan dengan penuh tanggungjawab, tanpa menung- gu dukungan pihak luar; (d) partisipatif, yaitu keterlibatan semua *stakeholders* sejak pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, sampai pemanfaatan hasil kegiatan; (e) egaliter, yaitu menempatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam kedudukan yang setara atau sejajar; (f) demokrasi, memberikan hak untuk mengemukakan pendapatnya, dan saling menghargai pendapat; (g) keterbukaan, yang dilandasi kejujuran, saling percaya, dan peduli; (h) kebersamaan, berbagi rasa, membantu dan mengembangkan sinergisme; (i) akuntabilitas, dapat dipertanggungjawab kan dan terbuka untuk diawasi; dan (j) desentralisasi, yaitu memberi kewenangan kepada setiap daerah otonom untuk mengoptimalkan sumberdaya pertanian bagi kemakmuran masyarakat dan kesinambungan pembangunan.

4. Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Terdapat empat prinsip yang sering digunakan dalam program pemberdayaan, yakni prinsip: kesetaraan, partisipasi, keswadayaan/kemandirian, dan keberlanjutan (Najiyati, dkk. 2014), penjelasannya sebagai berikut :

1. Kesetaraan

Kesetaraan berasal dari kata “setara” atau sederajat yang berarti sama tingkatan, kedudukan atau pangkatnya. Kesetaraan atau kesederajatan menunjukkan adanya tingkatan yang sama, kedudukan yang sama, tidak lebih tinggi atau tidak lebih rendah antara satu sama lain. Kesetaraan inilah salah satu prinsip dasar dalam pemberdayaan masyarakat, yang harus dipahami secara bersama. Dalam konteks ini kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat maupun antara pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah program pembangunan. Tidak ada dominasi kedudukan atau subordinasi kedudukan di antara pihak-pihak yang terlibat. Semua dibangun dan dilakukan atas dasar kesamaan derajat dan kedudukan. Dinamika yang dibangun adalah hubungan kesetaraan dengan mengembangkan mekanisme berbagi pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu sama lain. Masing-masing saling mengakui kelebihan dan kekurangan, sehingga terjadi proses saling belajar. Tidak ada arahan atau petunjuk, tidak ada atasan atau bawahan, tidak ada guru atau murid, tidak ada pembina atau yang dibina, serta tidak ada penguasa atau yang dikuasai. Kesalahan yang sering terjadi dalam proses pemberdayaan adalah pendamping atau pelaksana kegiatan memposisikan dirinya sebagai guru yang serba tahu. Di sisi lain, masyarakat diposisikan sebagai murid yang harus diisi dengan berbagai ilmu pengetahuan dengan cara mendengarkan yang disampaikan dan melaksanakan apa yang diperintahkan. Ini sering terjadi karena pendamping ingin mentransfer pengetahuan yang dimilikinya secara cepat mengacu pada kemampuan dirinya tanpa memahami kemampuan dan kebutuhan masyarakat. Dalam banyak hal, masyarakat justru memiliki pengetahuan yang cukup banyak tentang daerahnya, karena merekalah yang selama ini hidup, mengenali, dan merasakan permasalahan yang terjadi di desanya. Ini biasa disebut sebagai kearifan lokal (*indigenous wisdom*). Kesetaraan dalam hal ini juga berlaku untuk laki-laki dan perempuan, untuk golongan tua maupun golongan muda. Semua individu dalam masyarakat mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat, sehingga mempunyai hak,

kewajiban dan tanggung jawab yang sama dalam melaksanakan suatu kebijakan atau program pembangunan dalam masyarakat.

2. Partisipatif

Esensi dari pemberdayaan masyarakat adalah partisipasi. Namun demikian, partisipasi masyarakat belum dapat disebut sebagai pemberdayaan apabila belum ada unsur memberikan kewenangan atau sebagian kewenangan dan memberikan dorongan untuk lebih berdaya. Selama ini praktik-praktik pemberdayaan masyarakat yang dilakukan belum sepenuhnya memberikan kesempatan dan kebebasan kepada masyarakat untuk menentukan nasib dirinya sendiri melalui program-program pembangunan yang dibutuhkannya. Kebanyakan program-program pembangunan yang telah ditetapkan merupakan program yang sudah dirancang dan ditentukan oleh para pengambil kebijakan, baik pemerintah maupun lembaga yang mendanainya. Keterlibatan masyarakat masih sebatas pada mobilisasi, belum pada tahapan partisipasi.

3. Keswadayaan

Banyak program pembangunan di masyarakat yang bersifat caritas, atau membagi-bagikan bantuan secara cuma-cuma. Agenda ini dalam praktiknya jauh lebih dominan dari pada bantuan yang bersifat penguatan kapasitas dalam rangka menumbuhkan kemandirian dan keberdayaan. Hal ini bisa dipahami bahwa, bantuan yang bersifat caritas langsung dapat dinikmati oleh anggota masyarakat yang mendapatkan bantuan. Sementara itu, bantuan yang bersifat penguatan kapasitas cenderung berproses secara lambat dan tidak langsung kelihatan hasilnya. Dalam proses pemberdayaan, bantuan atau dukungan untuk pengembangan kapasitas dan kemandirian, meskipun hasilnya baru dapat dinikmati dalam jangka panjang lebih diprioritaskan dari pada bantuan yang bersifat caritas. Dukungan dan bantuan tersebut hanya bersifat stimulant, sedangkan sumberdaya utama untuk pengembangan kapasitas dan kemandirian sebagian besar berasal dari masyarakat sendiri. Upaya menumbuhkembangkan kapasitas dan kemandirian

yang berasal dari sumberdaya masyarakat sendiri inilah yang disebut keswadayaan. Oleh karena itu, salah satu prinsip penting dalam pemberdayaan masyarakat adalah keswadayaan.

4. Berkelanjutan

Proses pemberdayaan masyarakat bukanlah proses yang instan, impulsif atau hanya sekedar menjalankan suatu program pembangunan belaka. Pemberdayaan masyarakat adalah proses yang terus-menerus, berkesinambungan dan berkelanjutan. Hal ini penting untuk diperhatikan mengingat banyak kegiatan pemberdayaan masyarakat yang hanya berorientasi pada program pembangunan yang dibatasi waktu dan pendanaannya. Apabila program tersebut sudah selesai, pelaksana program dan masyarakat tidak memikirkan bagaimana kelanjutannya. Hal di atas menunjukkan bahwa agenda pemberdayaan masyarakat masih bersifat project based, dan belum dapat dikatakan sebagai pemberdayaan masyarakat yang sesungguhnya. Salah satu yang menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah agenda pemberdayaan yang sebenarnya adalah prinsip keberlanjutan. Keempat prinsip di atas harus diterapkan secara simultan agar proses pemberdayaan dapat benar-benar menguatkan dan memandirikan masyarakat secara berkelanjutan. Prinsip memberikan power kepada yang powerless dalam proses pemberdayaan benar-benar dapat diwujudkan. Indikator keberhasilan penerapan prinsip-prinsip pemberdayaan sebagaimana di atas antara lain: (1) masyarakat benar-benar berperan sebagai aktor dalam pembangunan; (2) program pembangunan yang dilakukan benar-benar berbasis partisipasi masyarakat dimana masyarakat sudah terlibat sejak penetapan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan hingga pada pengelolaan hasil-hasil pembangunan; (3) masyarakat berkontribusi sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki, baik berupa sumberdaya alam, sumberdaya manusia ataupun sumberdaya finansial; dan (4) program pembangunan yang dilakukan bukan sekedar project based, tetapi dapat dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan.

5. Lingkup Pemberdayaan Masyarakat

Secara umum ruang lingkup pemberdayaan didasarkan pada bidangbidang yang sering menjadi obyek dalam pemberdayaan masyarakat. Ndraha (2003) dan Supriyatna (tt) menentukan bahwa lingkup pemberdayaan masyarakat terdiri dari 4 (empat) bidang yaitu bidang: (1) politik; (2) ekonomi; (3) sosial budaya; dan (4) lingkungan. Bidang agraria, pertanahan dan tata ruang tidak secara spesifik disebutkan sebagai salah satu lingkup pemberdayaan. Hal ini dapat dipahami, mengingat bidang agraria, pertanahan dan tata ruang berada pada keempat lingkup dan pembidangan tersebut. Meskipun demikian, pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan dapat ditambahkan sebagai salah satu lingkup pemberdayaan masyarakat berdasarkan pada bidang-bidang pemberdayaan. Pemberdayaan pada lingkup politik diorientasikan agar masyarakat mempunyai bargaining position (daya tawar) yang tinggi apabila berhadapan dengan pihak-pihak terkait, baik pemerintah, kalangan LSM, maupun kalangan swasta yang mempunyai agenda atau proyek di wilayah masyarakat. Daya tawar ini sangat dibutuhkan agar posisi masyarakat tidak menjadi subordinat dihadapan stake holder yang lain. Pemberdayaan pada lingkup ekonomi, biasanya berhubungan dengan kemandirian dalam penghidupan masyarakat. Dalam hal ini upaya-upaya produktif yang dapat menjadi sumber pendapatan atau menjadi gantungan hidup menjadi fokus dalam lingkup pemberdayaan bidang ekonomi. Pemberdayaan pada lingkup sosial budaya berhubungan dengan peningkatan kapasitas masyarakat, baik yang bersifat individual maupun kolektif.

Orientasi pemberdayaan pada lingkup sosial budaya ini berkisar pada penguatan soliditas masyarakat, pengurangan kerentanan terhadap konflik, serta penguatan solidaritas sosial. Dalam lingkup ini termasuk juga kesadaran masyarakat terhadap kondisi masyarakat yang plural, baik secara etnik, kepercayaan/agama maupun status sosialnya. Pemberdayaan pada lingkup lingkungan berfokus pada upaya-upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan agar terjaga kelestariaannya. Upaya-upaya ini hanya bisa dilakukan apabila masyarakat memahami dan peduli

terhadap kondisi lingkungan dan keberlanjutannya. Pemahaman dan kepedulian masyarakat ini hanya dapat tumbuh dan berkembang melalui upaya-upaya pemberdayaan. Pemberdayaan pada lingkup agraria, pertanahan dan tata ruang sebetulnya bukanlah lingkup yang umum, namun disisipkan untuk menunjukkan bahwa lingkup pemberdayaan masyarakat perlu dikontekskan dengan tugas pokok dan fungsi kelembagaan yang mengatur tentang agraria, tata ruang dan pertanahan. Apabila lingkup ini dipersempit maka lingkup pemberdayaan bidang pertanahan menjadi hal yang urgent. Dalam konteks ini, pemberdayaan pada lingkup pertanahan diorientasikan agar masyarakat menjadi berdaya ketika berhadapan dengan persoalan-persoalan pertanahan.

Keberdayaan ini menjadikan masyarakat terbebas dari dominasi aparat pemerintah di bidang pertanahan yang berujung pada pelayanan pertanahan yang egaliter, adil dan bebas pungli. Apabila lingkup pemberdayaan masyarakat didasarkan pada proses, dapat dikategorikan ke dalam 3 (tiga) hal, yakni: (1) pra pemberdayaan, yang berupa menciptakan ruang interaksi yang kondusif agar masyarakat merasa percaya diri dan mampu untuk menjadi pelaku pembangunan; (2) pelaksanaan pemberdayaan, yang menempatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan yang setara dengan pemangku kepentingan lainnya; dan (3) pasca pemberdayaan, dimaksudkan bahwa lingkup ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terus berproses dalam pemberdayaan meskipun keterlibatan pemangku kepentingan lain sudah berakhir, karena keterbatasan waktu, penganggaran dan kegiatan. Dalam konteks ini, pemangku kepentingan di luar masyarakat secara institusional tetap terlibat dalam mendukung dan memfasilitasi dalam proses-proses pemberdayaan masyarakat yang terus menerus berlangsung.

6. Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat

Salah satu faktor yang dapat mendukung tercapainya sasaran kegiatan pemberdayaan masyarakat sangat di pengaruhi oleh jenis pendekatan yang di gunakan dalam melakukan kegiatan tersebut. Dalam hal ini pendekatan yang di maksud terkait dengan cara yang di gunakan agar supaya masyarakat yang menjadi kelompok sasaran

kegiatan pemberdayaan bersikap terbuka dalam menerima berbagai bentuk unsur inovasi yang semuanya itu di maksudkan agar supaya mereka dapat melepaskan diri dari berbagai aneka rupa keterbelakangan, isolasi sosial, keterpurukan serta ketertinggalan dalam berbagai sektor masyarakat. Oleh sebab itu untuk memilih pendekatan yang di nilai cocok dengan kondisi sosial ekonomi dan budaya kelompok sasaran maka pada dasarnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan diantaranya : pertama kegiatan itu harus sifatnya terencana. Maksudnya program yang di buat sebaiknya memiliki rentan waktu tertentu dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat seperti lembaga pemerintah, aktivis LSM, tokoh masyarakat, pemuka agama, tokoh generasi muda dan kelompok masyarakat yang lain yang di nilai akan memberi kontribusi yang besar bagi kegiatan pemberdayaan tersebut. Kedua, pendekatan yang digunakan sebaiknya dalam bentuk kelompok dan tidak dilakukan secara individual.

Pertimbangannya lewat pendekatan kelompok maka kegiatan yang di laksanakan dapat berlangsung lebih efisien, efektif serta memberi hasil yang optimal dibandingkan dengan kegiatan yang dilakukan secara perorangan. Tujuan utama kegiatan ini jelas lebih diorientasikan pada kepentingan masyarakat secara keseluruhan dan bukan hanya sebatas pada satu rumah tangga. Ketiga, melibatkan masyarakat secara aktif terutama kelompok yang menjadi sasaran kegiatan pemberdayaan. Ini sangat penting mengingat partisipasi aktif masyarakat akan memberikan manfaat secara langsung selain mereka dapat bekerja sambil belajar untuk mempraktekkan berbagai konsep dan program yang di sampaikan oleh para fasilitator. Keempat, sasarannya harus jelas dan terarah. Artinya semua agenda kegiatan yang tawarkan pada kelompok sasaran memiliki tujuan yang jelas termasuk di dalamnya manfaat yang dapat di peroleh dari kegiatan itu khususnya yang bersentuhan langsung dengan masalah pemenuhan kebutuhan manusia. Kelima, kegiatan pemberdayaan masyarakat harus memiliki dana yang cukup. Sebagaimana di ketahui bahwa program yang dirancang sedemikian rupa dan sebaik apapun bentuknya tentu terasa sulit untuk di implementasikan apabila tanpa di dukung oleh dana yang memadai.

Selain itu, masalah pengadaan infratraktur termasuk alat peraga yang diperlukan bukan serta melibatkan sejumlah tenaga professional hanya dapat dilakukan jika di tunjang oleh sektor finansial yang cukup. Keenam, masalah faktor budaya yang dimiliki kelompok sasaran harus pula mendapat perhatian yang serius. Masalahnya, jika kita belajar dari berbagai pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa munculnya penolakan dari masyarakat setempat ternyata di sebabkan karena adanya sikap tradisi dan kepercayaan yang begitu kuat yang di miliki masyarakat dan dianggap tidak sesuai dengan unsur inovasi yang di perkenalkan kepada mereka. Akibatnya upaya yang di lakukan oleh tenaga fasilitator dalam menciptakan perubahan sikap dan perilaku masyarakat tidak memberikan hasil yang maksimal. Dan akhirnya, pendekatan yang di gunakan sebaiknya bersifat persuasif dan tidak kohersif dengan demikian, kelompok sasaran akan menerima program yang di tawarkan pada mereka secara sukarela tanpa merasa adanya tekanan dari pihak luar sehingga proses kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat berlangsung dalam suasana yang koperatif, komformis, lancar , bersinergi dan terkendali (Haris, 2014).

7. Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat

Fasilitator adalah pekerja atau pelaksana pemberdayaan masyarakat. Menurut Rogers (1983) dan Mardikanto (2013) menyebutkan fasilitator adalah agen perubahan (*change agent*), yaitu seseorang yang atas nama pemerintah atau lembaga pemberdayaan masyarakat yang berkewajiban untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh (calon) penerima manfaat dalam mengadopsi inovasi. Selain itu fasilitator juga bertanggung jawab untuk mengelola inisiatif pemberdayaan masyarakat. Karena itu fasilitator haruslah professional, dalam arti memiliki kualifikasi tertentu baik yang menyangkut kepribadian, pengetahuan, sikap, dan keterampilan memfasilitasi pemberdayaan masyarakat. Fasilitator bertugas untuk mendorong, mengarahkan, dan membantu masyarakat menjadi mandiri dan mampu mengorganisir diri menjadi kelembagaan masyarakat yang kokoh (Zuraidah, 2020).

Fasilitator harus melibatkan masyarakat secara langsung selama penugasan ini. (Mustanir dan Abadi, 2017) (Mustanir dan Darmiah, 2016). Fasilitator menggunakan interaksi tatap muka dan papan informasi yang terdapat di kantor kecamatan untuk berinteraksi dengan peserta acara pemberdayaan masyarakat. Baik interaksi formal maupun informal berlangsung selama komunikasi tatap muka ini. (Latif et al., 2019) Secara resmi biasanya diadakan dalam forum-forum pertemuan dan sosialisasi yang melibatkan pejabat kecamatan dan seluruh lapisan masyarakat di wilayah pelemahan. Komunikasi informal sering dilakukan melalui jalur interpersonal, kelompok, dan komunal. Tingkat keterlibatan tatap muka dan akses komunikasi antara fasilitator dan masyarakat dapat digunakan untuk mengukur seberapa aktif mereka berkomunikasi. (Mustanir, S, et al., 2020).

Saat bekerja di masyarakat, fasilitator memainkan berbagai peran dalam menjalankan tugasnya. Peran yang dimainkan seringkali tidak memenuhi standar masyarakat. Survei pra-penelitian terhadap responden dilakukan untuk mengetahui fungsi fasilitator dalam inisiatif pemberdayaan masyarakat. (Uceng et al., 2019). Temuan survei mengungkapkan sejumlah tugas yang dianggap sering dilakukan oleh fasilitator dalam inisiatif pemberdayaan masyarakat, termasuk:

- a) Penyampaian informasi yang menyeluruh dan mudah dipahami tentang inisiatif tersebut.
- b) Mendorong dan memotivasi keterlibatan dalam berbagai inisiatif pemberdayaan masyarakat.
- c) Memberikan rekomendasi dan mempertimbangkan isu-isu yang harus ditangani dalam prakarsa pemberdayaan masyarakat,
- d) Menjalin hubungan antara masyarakat dan pemerintah untuk prakarsa pemberdayaan masyarakat.

8. Penerima Manfaat

Penerima manfaat menurut Mardikanto dan Soebianto (2013) dimaknai sebagai:

- 1) Berbeda dengan kedudukannya sebagai “sasaran”, masyarakat sebagai penerima manfaat memiliki kedudukan yang setara dengan penentu kebijakan, fasilitator, dan pemangku kepentingan yang lain.
- 2) Penerima manfaat bukanlah obyek atau sasaran tembak yang layak dipandang rendah oleh penentu kebijakan dan para fasilitator, melainkan ditempatkan pada posisi terhormat yang perlu dilayani dan atau difasilitasi sebagai rekan kerja dalam mensukseskan pembangunan.
- 3) Berbeda dengan kedudukannya sebagai sasaran yang tidak punya pilihan atau kesempatan untuk menawar setiap materi yang disampaikan, selain harus menerima/ mengikutinya, penerima manfaat memiliki posisi tawar yang harus dihargai untuk menerima atau menolak inovasi yang disampaikan fasilitatornya.
- 4) Penerima manfaat tidak berada dalam posisi di bawah penentu kebijakan dan para fasilitator, melainkan dalam kedudukan yang setara bahkan sering justru lebih tinggi kedudukannya, dalam arti memiliki kebebasan untuk mengikuti ataupun menolak inovasi yang disampaikan oleh penyuluhnya. Berdasarkan pengertian tersebut, maka yang dimaksud penerima manfaat dalam penelitian ini adalah peran serta atau keikutsertaan yang penuh kesadaran dan tanggung jawab, baik secara fisik, emosi maupun mental yang dilakukan oleh masyarakat yang menerima manfaat dari suatu kegiatan guna mencapai tujuan.

9. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

Pemberdayaan sangat perlu memperhatikan karakteristik masyarakat sebagai sasaran utama pada kegiatan kemandirian. Dalam KBBI, masyarakat berarti sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Masyarakat terdiri dari individu-individu yang memiliki interaksi, norma, nilai, dan struktur sosial yang mempengaruhi cara

mereka berinteraksi satu sama lain dan dengan lingkungan sekitarnya. Mac Queen *et al.* (2001) menyimpulkan terdapat lima elemen dalam suatu masyarakat yakni: a) lokasi sebagai entitas geografis; b) kepentingan bersama; c) tindakan kolektif berdasar koherensi identitas; d) ikatan sosial atau kohesi sosial; dan e) memiliki keragaman.

Salah satu masyarakat yang penting untuk diberdayakan adalah masyarakat pesisir. Masyarakat pesisir adalah kelompok masyarakat yang tinggal di sepanjang wilayah pesisir, seperti pantai, tepi laut, atau daerah yang berdekatan dengan lautan atau laut. Mereka cenderung memiliki keterkaitan yang erat dengan lingkungan pesisir dan sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Masyarakat pesisir seringkali bergantung pada sumber daya alam seperti hasil laut, pertanian di daerah pantai, pariwisata, dan kegiatan ekonomi lainnya yang terkait dengan lingkungan pesisir. Masyarakat pesisir pada umumnya sebagian besar penduduknya bermata pencaharian di sektor pemanfaatan sumberdaya kelautan (*marine resource based*), seperti nelayan, pembudidaya ikan, penambangan pasir dan transportasi laut. Secara luas, masyarakat pesisir dapat pula didefinisikan sebagai masyarakat yang tinggal secara spasial di wilayah pesisir tanpa mempertimbangkan apakah mereka memiliki aktivitas sosial ekonomi yang terkait dengan potensi dan kondisi sumberdaya pesisir dan lautan. Kemudian masyarakat pesisir dapat juga dipahami sebagai bagian dari masyarakat hukum adat atau MHA. Masyarakat Hukum Adat (MHA) adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Nurfaiza, 2020). Berdasarkan karakteristiknya, masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terbagi menjadi tiga, yaitu masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dan masyarakat tradisional sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 UU No. 27/2007 jo. UU No. 1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Terdapat beberapa alasan mengapa masyarakat pesisir menjadi kelompok yang teridentifikasi secara khusus, diantaranya adalah :

- a) Ketergantungan pada Sumber Daya Laut
Masyarakat pesisir sering kali sangat bergantung pada sumber daya laut, termasuk hasil laut seperti ikan, kerang, atau bahan pangan lainnya. Keterkaitan ini sering menjadi salah satu aspek penting dalam kehidupan dan mata pencaharian mereka.
- b) Budaya dan Tradisi Maritim
Kehidupan di sepanjang pesisir sering kali diwarnai oleh budaya dan tradisi maritim yang khas, seperti aktivitas nelayan, perahu tradisional, serta kebiasaan dan upacara yang berkaitan dengan laut.
- c) Pengaruh Lingkungan Pesisir
Masyarakat pesisir juga cenderung terpengaruh secara langsung oleh kondisi lingkungan pesisir, seperti dampak dari perubahan iklim, kenaikan permukaan air laut, bencana alam seperti badai atau tsunami, dan degradasi lingkungan.
- d) Pengelolaan Sumber Daya
Karena ketergantungan mereka pada sumber daya alam, masyarakat pesisir sering terlibat dalam upaya pengelolaan yang berkelanjutan terhadap sumber daya laut dan lingkungan mereka.

Masyarakat pesisir sering memiliki kehidupan yang unik, didasarkan pada hubungan erat dengan laut dan lingkungan sekitarnya. Kehidupan mereka seringkali dipengaruhi oleh pola migrasi, perdagangan lintas laut, dan faktor-faktor lain yang unik bagi wilayah pesisir. Hal ini membuat mereka menjadi kelompok yang diakui secara khusus dalam studi dan pengembangan wilayah pesisir. Pemberdayaan masyarakat pesisir adalah suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat pesisir dalam mengelola sumber daya alam, mengembangkan potensi ekonomi, dan berperan aktif dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka. Dengan mengkaji potensi ekonomi dan memberdayakan masyarakat

pesisir, kita dapat menciptakan model pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan adil. Ini membantu membangun keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Program penyuluhan dan pemberdayaan adalah pembelajaran bagi masyarakat, sehingga bisa dikatakan bahwa elemen utama dari pemberdayaan adalah pengembangan kapasitas masyarakat itu sendiri. Teknologi informasi merupakan salah satu aspek penting dalam mendorong pemberdayaan masyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pemberdayaan masyarakat pesisir tidak hanya meningkatkan akses terhadap informasi, tetapi juga membuka peluang baru untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di wilayah tersebut. Penggunaan teknologi informasi dalam pemberdayaan memang sebuah proses, akan tetapi dari proses tersebut dapat dilihat dengan indikator yang menyertai proses pemberdayaan menuju sebuah keberhasilan. Untuk mengetahui pencapaian tujuan pemberdayaan secara operasional, maka perlu diketahui berbagai indikator keberdayaan yang dapat menunjukkan seseorang atau komunitas berdaya atau tidak, dengan cara ini kita dapat melihat ketika sebuah program pemberdayaan sosial diberikan, segenap upaya dapat dikonsentrasikan pada aspek-aspek apa saja dari sasaran perubahan (misalnya keluarga miskin) yang perlu dioptimalkan.

Keberhasilan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat pesisir dapat dilihat dari keberdayaan mereka dalam hal kemampuan ekonomi, kemampuan akses kesejahteraan, dan kemampuan kultur serta politis. Ketiga aspek tersebut dikaitkan dengan empat dimensi kekuasaan, yaitu: 'kekuasaan di dalam' (*power within*), 'kekuasaan untuk' (*power to*), 'kekuasaan atas' (*power over*) dan kekuasaan dengan (*power with*). Melalui penelitian tentang pemberdayaan masyarakat pesisir berbasis teknologi, kita dapat menghasilkan pengetahuan baru, mempromosikan inovasi, dan mendorong penerapan teknologi yang berkelanjutan dan inklusif. Hal ini bertujuan untuk mencapai pembangunan pesisir yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam pesisir.

C. PENUTUP

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses di mana individu atau kelompok masyarakat diberi kekuatan, pengetahuan, keterampilan, dan akses terhadap sumber daya untuk mengambil kontrol atas kehidupan mereka sendiri. Ini mencakup memberikan keterlibatan yang lebih besar dalam pengambilan keputusan, meningkatkan akses terhadap pendidikan, kesehatan, peluang ekonomi, serta mendukung peningkatan kemandirian dan keadilan sosial. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kemandirian, partisipasi dalam pengambilan keputusan, pengurangan ketimpangan, pelestarian budaya dan identitas, dan kesinambungan pembangunan. Pemberdayaan masyarakat bukan hanya memberikan bantuan atau sumber daya, tetapi juga tentang memberikan akses, keterampilan, dan dukungan yang memungkinkan individu dan kelompok untuk mengambil kendali atas kehidupan mereka sendiri. Ini merupakan bagian penting dari proses pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

D. DAFTAR PUSTAKA

- Adi, I. R. 2008. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Abraham. 2015, „The Health Belief Model“, diakses 4 Oktober 2019, https://www.researchgate.net/publication/290193215_The_Health_Belief_Model.
- Bartle, P. 2001. *Element of Community Strength* Bm 038@scan.org <http://www.scn.org>.
- Dwidjowijoto, Nugroho, R., Wrihatnolo, & R, R. 2007. *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*. PT Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Ekawati, S. 2005. *Aspek Sosial Budaya Proses Terbangunnya Hutan Rakyat Swadaya*. PPs. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Friedman, J. 1991. *Empowerment: The Politics of Alternative Development*. Blackwell. Cambridge.

- Haris, A. 2014. Memahami Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Media. JUPITER. Vol 13(2). 50 – 62.
- Hikmat, H., 2006, Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Humaniora Utama Press. Bandung.
- Hutomo, M.Y. 2000. Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoritik dan Implementasi. Seminar Sehari Pemberdayaan Masyarakat, 6 Maret 2000. Bappenas. Yogyakarta.
- Ife, J. 2002. Community Development: Community-Based Alternative. In: An Age of Globalization, 2nd Edition, Pearson Education Australia Pty Ltd., Frenchs Forest, 309 p.
- Latif, A., Mustanir, A., & Irwan, I. (2019). Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada Perencanaan Pembangunan. JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik), 144–164. <https://doi.org/10.31947/jakpp.v1i2.7977>
- Mardikanto, T. 2013. *Konsep-konsep Pemberdayaan masyarakat. Acuan Bagi Aparat Birokrasi, Akademi, Praktisi, dan Peminat/Pemerhati Pemberdayaan masyarakat.* Kerjasama Fakultas Pertanian UNS dengan UPT Penerbitan dan Pencetakan UNS. UNS Press. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- . 2010. *Konsep-Konsep Pemberdayaan Masyarakat.* UNS Press. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Mardikanto, T dan P. Soebiato. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik.* Alfabeta. Bandung.
- Mustanir, A., dan Darmiah, D. (2016). Implementasi Kebijakan Dana Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Politik Profetik*, 4(2), 225–238. <http://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/jpp/article/view/2749%0Ahttp://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/jpp/issue/view/457>
- Mustanir, A., Abadi, P., dan A., N. (2017). Participation of Ethnic Community Towani Tolotang in Deliberation of Development Plan. Partisan Abadi The Social and Political Science College, 84(Iconeg 2016), 356–359. <https://doi.org/10.2991/iconeg->

16.2017.79

- Mustanir, A., Ali, A., Yasin, A., & Budiman, B. (2020). Transect on Participatory Development Planning in Sidenreng Rappang Regency. *Transect on Participatory Development Planning in Sidenreng Rappang Regency*, 1, 250–254. <https://doi.org/10.4108/eai.25-10-2019.2300523>
- Najiyati, Sri, 2014. *Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut. Wetlands International – Indonesia Programme*. Bogor.
- Ndraha, T. 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1- 2*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Nurfaiza, Z.A. 2020. *Sejarah Kebudayaan Lokal Banyuwangi: Upacara Petik Laut Muncar Simbolisasi Penghargaan terhadap Kekayaan Laut Nusantara*. Artikel. <https://narasisejarah.id>
- Rangga, K.K. 2014. *Keefektifan Kelompok Afinitas Usaha Mikro dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Rumah Tangga di Desa Mandiri Pangan Provinsi Lampung*. Disertasi. UNS. Surakarta
- Soedijanto. 1981. *Keefektifan Kelompok Tani dalam Kegiatan Penyuluhan Pertanian*. Disertasi. IPB. Bogor.
- Suharto, E., 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Cv Alfabeta. Bandung.
- Sumaryo. 2009. *Implementasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) dalam Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat: Kasus di Provinsi Lampung*. Disertasi. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Uceng, A., Erfina, E., Mustanir, A., & Sukri, S. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Betao Riase Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang. *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 18– 32. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/2126>
- World Bank. 2001. *World Development Report 2000/2001: Attacking Poverty*. Oxford University Press. New York.
- Zubaedi. 2007. *Wacana Pembangunan Alternatif, Ragam Perspektif Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Penerbit Ar Ruzz Media. Yogyakarta.

Zuraidah, E. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kota Tanpa Kumuh. *Jurnal At-Taghyir: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Desa*, 2(1), 146–162. <https://doi.org/10.24952/taghyir.v2i1.1977>.

BAB 2

HUTAN MANGROVE SEBAGAI EKOWISATA

Oleh:

**Prof. Dr. Ir. Kordiyana K Rangga, M.S.
Tyas Sekartiara Syafani, S.P.,M.Si.**

A. PENDAHULUAN

Keberadaan kawasan vegetasi mangrove dan pantai memberi banyak manfaat yang sangat penting bagi ekosistem darat maupun pantai. Manfaat mangrove sangat banyak, mulai dari penggunaan mitigasi bencana, menentukan kualitas air minum, dan berfungsi dalam menyaring air laut menjadi air daratan yang tawar. Hutan mangrove merupakan suatu daerah yang terdapat tanah lumpur dan daratan yang terus menerus dibentuk oleh tumbuh-tumbuhan secara bersamaan yang kemudian berubah menjadi daerah semiterrestrial. Perubahan ini terjadi secara perlahan dengan kecepatan pembentukan daratan rata-rata berkisar 100–200 meter setiap tahun di beberapa tempat khusus (Hutabarat dan Evans, 2017).

Hutan mangrove memiliki sifat dan bentuk yang sangat beragam. Ekosistem mangrove berperan sebagai pendukung kehidupan yang kelestariannya perlu dijaga. Mangrove berfungsi sebagai penghasil kebutuhan berupa buahnya yang dapat dikelola

menjadi bahan konsumsi. Dari segi ekonomi, adanya hutan mangrove menjadikan daerah sekitar sebagai ekowisata.

Ekowisata adalah bentuk pengembangan pariwisata berkelanjutan yang mengedepankan pada aspek kelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan dalam membangun ekowisata akan mendukung pembangunan pariwisata. Pembangunan pariwisata yang berhasil adalah pembangunan pariwisata yang dilakukan secara bersama masyarakat sehingga pembangunan pariwisata ini dapat memberikan keuntungan secara ekonomi dan sosial budaya kepada masyarakat lokal (Haryanto, 2014). Prinsip yang ditekankan dalam menerapkan prinsip ekowisata ini ialah pembangunan pariwisata dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat.

Lebih luas, hutan mangrove merupakan penyangga kehidupan kawasan pesisir yang memberikan banyak manfaat baik secara tidak langsung maupun secara langsung kepada kehidupan liar dan masyarakat sekitarnya. Fungsi hutan mangrove sebagai pelindung lingkungan dari pengaruh pasang surut, arus, angin topan, dan gelombang, penjaga pasokan air tawar, mengendalikan abrasi, mencegah intrusi air laut ke darat, kontrol terhadap banjir, penjaga kestabilan resapan air tanah, dan mitigasi perubahan iklim secara mendadak. Fungsi biologi kawasan mangrove sebagai penyedia keanekaragaman hayati, daerah asuhan, daerah mencari makan dan daerah pemijahan beberapa spesies ikan dan udang, serta penyuplai unsur-unsur hara utama di pantai. Fungsi ekonomi, sebagai sumber kayu kelas satu, bubur kayu, bahan kertas, chips, dan arang. Kawasan mangrove memiliki variasi vegetasi tumbuhan dan satwa liar yang bervariasi. Selain fungsi ekologis, kawasan mangrove dapat digunakan sebagai wisata dan tempat pendidikan berbasis lingkungan karena keunikan yang dimilikinya. Pengalih fungsian hutan mangrove dapat menyebabkan hilangnya fungsi dan nilai (manfaat) hutan mangrove (Maulana, 2019).

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian Hutan Mangrove

Hutan mengandung sumber daya alam yang tidak terbatas dan memberikan manfaat yang sangat besar bagi makhluk hidup. Hutan diartikan sebagai suatu ekosistem homogen berupa suatu kawasan terestrial yang mengandung sumber daya alam hayati dengan dominasi pepohonan pada lingkungan alaminya. Menurut Undang-Undang Pokok Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, satu kesatuan dengan yang lain tidak dapat dipisahkan. Berbagai jenis vegetasi yang tumbuh dan berkembang di setiap wilayah mempunyai perbedaan vegetasi yang spesifik yang dipengaruhi oleh tipe iklim wilayah tersebut, ketinggian tempat, dan faktor lingkungan tumbuhan lainnya. Hutan, sebagai unit ekologi yang kompleks, mempunyai dampak penting terhadap berbagai sumber daya alam lainnya (Safe'i et al, 2020). Hutan yang mempunyai peranan penting bagi kehidupan seluruh makhluk hidup juga harus dilestarikan. Untuk mencapai hal ini, hutan harus tetap sehat dan tersedia untuk generasi mendatang. Hutan yang sehat ditentukan oleh ekosistem hutan yang seimbang, fungsional, dan memiliki kapasitas regeneratif yang baik. Fungsi yang dimaksud disini adalah fungsi perlindungan, produksi dan konservasi (Sumardi dan Widyastuti, 2007).

Kata “mangrove” merupakan gabungan dari dua bahasa: bahasa Portugis “mangue” dan bahasa Inggris “grove” (Kusmana, 2003). Kata “mangrove” mengacu pada tumbuhan dan komunitasnya yang tumbuh di dataran pasang surut. Daerah pasang surut adalah daerah yang terletak di sepanjang pantai, seperti pantai, muara, laguna, dan tepi sungai, yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Istilah mangrove mempunyai pengertian yang berbeda-beda tergantung ahlinya, namun pada hakikatnya merujuk pada hal yang sama. Mangrove juga didefinisikan sebagai lapisan vegetasi pantai khas yang ditemukan di pantai tropis dan subtropis yang dilindungi (Saenger 1983). Hutan mangrove merupakan ekosistem hutan peralihan antara daratan dan lautan dan diketahui mempunyai banyak manfaat (Safei, 2020). Hutan bakau merupakan komunitas vegetasi tropis pesisir yang didominasi oleh berbagai jenis pohon

yang tumbuh dan berkembang di zona pasang surut dan pantai berlumpur. Hutan bakau umumnya terdapat di pesisir teluk dangkal, muara, delta, dan kawasan pantai yang dilindungi (Nontji, 1987).

Hutan bakau merupakan ekosistem yang sangat penting dari sudut pandang ekologi, terutama karena kemampuannya dalam mendukung pemanfaatan untuk stabilisasi ekosistem pesisir. Ekosistem mangrove yang stabil dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kelestarian wilayah pesisir seperti pantai. Mangrove dianggap sebagai ekosistem hutan yang memiliki ciri dan sifat unik karena habitatnya berada di daerah berlumpur (Kaminarsih, 2007). Komposisi dan struktur hutan mangrove berbeda-beda tergantung pada kondisi geofisika, geografi, geologi, hidrologi, biogeografi, iklim, tanah, dan kondisi lingkungan lainnya (Latuconsina, 2016). Parameter lingkungan yang mendukung pertumbuhan mangrove antara lain pH, salinitas, pasang surut, suhu, dan tekstur sedimen. Ekosistem mangrove mempunyai produktivitas yang tinggi dibandingkan dengan ekosistem lainnya. Tingginya tingkat penguraian bahan organik menjadikan ekosistem mangrove sebagai rantai ekologi penting bagi kehidupan hayati, khususnya bagi perairan laut di sekitarnya. Bahan organik tersebut menjadikan hutan bakau sebagai sumber makanan dan habitat berbagai makhluk hidup seperti ikan, udang, dan kepiting. Produksi ikan dan udang di laut sangat bergantung pada produksi limbah hutan bakau. Berbagai kelompok moluska ekonomi juga sering ditemukan berasosiasi dengan tumbuhan penyusun hutan bakau (Imran, 2016). Berdasarkan pengertian di atas, hutan mangrove dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut.



(Sumber: <https://www.dictio.id>)

Gambar 2. 1. Hutan Mangrove

2. Manfaat Hutan Mangrove

Hutan mangrove yang ditanam pada daerah pesisir membuat adanya kestabilan yang nyata. Permasalahan lingkungan yang muncul di kawasan-kawasan pesisir dengan keadaan hutan mangrove yang telah dirusak manusia menimbulkan kerugian yang sangat kompleks, meliputi aspek ekonomi, sosial, dan ekologi. Secara ekologis, wilayah pesisir memiliki cakupan batas yang sangat luas, yaitu bukan hanya kawasan daratannya saja, tetapi juga mencakup kawasan laut. Hal ini menandakan perlunya dibuat dan dilestarikan hutan mangrove khususnya daerah pesisir. Secara fisik, vegetasi hutan mangrove berperan dalam melindungi wilayah daratan dari abrasi dan tsunami. Hutan mangrove memiliki beragam manfaat ekologis untuk melestarikan daerah pesisir (Karminarsih, 2007) diantaranya:

1. Melindungi garis pantai dan kehidupan di belakangnya dari gempuran tsunami dan angin, karena kondisi tajuknya yang relatif rapat, dan kondisi perakarannya yang kuat dan rapat mampu mencengkeram dan menstabilkan tanah habitat tumbuhnya, dan sekaligus mencegah terjadinya salinisasi pada wilayah-wilayah di belakangnya.

2. Perlindungan padang lamun dan terumbu karang. Sistem akarnya mampu menahan lumpur sungai dan menyerap berbagai zat pencemar, sehingga pada akhirnya secara ekologis dapat melindungi kehidupan berbagai jenis tumbuhan dan hewan yang berasosiasi dengan lamun. dasar laut dan terumbu karang.
3. Perlindungan tempat pemijahan buaya dan berbagai jenis ikan dan udang komersial, termasuk perlindungan permanen dan sementara terhadap habitat berbagai jenis burung. Banyak mamalia, ikan, kepiting, udang, dan reptil merupakan spesies yang dilindungi secara hukum.

Secara sosial, manfaat hutan mangrove telah banyak ditemukan dan disadari, misalnya dalam membangun ikatan sosial antar masyarakat lokal. Banyak dari mereka yang mengandalkan hutan bakau untuk mencari ikan, kepiting, dan udang, serta memperoleh kayu dan bahan baku obat-obatan. Selain itu, secara ekonomi, hutan bakau dapat sangat melindungi nilai ekonomi laut (Alikodra, 2002). Selain fungsi sosialnya, hutan mangrove juga memberikan manfaat dari segi ekonomi. Sebagaimana dikemukakan oleh Kustanti (2011), fungsi ekonomi hutan mangrove adalah produksi kebutuhan rumah tangga, produksi kebutuhan industri, dan produksi benih. Pemanfaatan buah bakau sebagai bahan pangan juga harus diperhatikan. Tentu saja buah bakau dan bagian tanaman lain yang dapat dimakan tidak dimaksudkan sebagai makanan pokok, tetapi hanya berfungsi untuk diversifikasi pola makan.

3. Jenis-Jenis Hutan Mangrove

Pasang surut air laut mempunyai pengaruh yang besar terhadap sebaran vegetasi mangrove yang tumbuh pada suatu wilayah. Intensitas genangan air laut menentukan sebaran jenis mangrove di setiap wilayah. Hal ini didasarkan pada deskripsi klasifikasi banjir yang menunjukkan hubungan antara tinggi gelombang badai, durasi banjir, dan jenis tanaman mangrove. Klasifikasi kelas banjir menurut Karimah (2017) adalah sebagai berikut:

1. Wilayah pesisir tergenang air pada setiap air pasang (*all high tide*). Kecuali *Rhizophora mucronata*, hanya sedikit spesies mangrove yang terdapat di kawasan tersebut.
2. Kawasan pantai akan tergenang air saat air pasang. *Avicennia sp.* muncul di tempat seperti itu. dan *Sonneratia sp.*
3. Daerah pantai tergenang air pada saat air pasang normal. Situs ini memiliki kawasan hutan bakau yang luas dimana tumbuh *Rhizophora mucronata*, *Rhizophora apiculata*, *Ceriops tagal* dan *Bruguiera parviflora*.
4. Daerah pantai akan tergenang air pasang surut. *Bruguiera sp.* tumbuh di daerah ini, dan *Bruguiera cylindrica* umumnya membentuk tegakan murni, namun *Bruguiera parviflora* dan *Bruguiera sexangula* juga dapat tumbuh di daerah yang memiliki drainase baik.
5. Kawasan pantai dapat terendam air akibat air pasang (*abnormal tide* atau *equinox*). *Bruguiera Gymnorrhiza* tumbuh di sini dan terkadang berpasangan dengan pakis *Acrotichum sp.* Sama seperti tumbuhan lainnya, jenis mangrove juga bermacam-macam.

Habitat mangrove berkaitan dengan berbagai faktor, seperti luasnya banjir, sifat dan salinitas substrat permukaan, serta pasokan nutrisi dan air tawar, yang secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan vegetasi mangrove. Kondisi berbagai faktor tersebut bervariasi dari satu lokasi ke lokasi lainnya, dan kebutuhan fisiologis spesies mangrove juga sangat bervariasi. Keanekaragaman mangrove sangat dipengaruhi oleh lumpur, ombak, curah hujan, dan iklim tropis. Zonasi mangrove dipengaruhi oleh salinitas, ketahanan terhadap gelombang dan angin, ketahanan terhadap lumpur (kualitas tanah), dan frekuensi banjir oleh air laut. Inilah sebabnya mengapa mangrove memberikan manfaat besar bagi organisme di sekitarnya (Bengen dan Dutton, 2004) Dalam berbagai artikel seperti blog, buku, dan majalah, istilah seperti hutan bakau *Rhizophora*, *Sertops*, dll sering digunakan. Istilah tersebut sebenarnya mengacu pada kawasan hutan mangrove yang jenisnya mendominasi (Djamaluddin, 2018) Komposisi dan struktur hutan mangrove

bergantung pada kondisi geofisika, topografi, biogeografi, iklim, tergantung pada tanah, berbagai kondisi geologi, dan lain-lain. lingkungan. Dukungan ahli hidrologi (Latuconsina, 2016). Parameter lingkungan untuk pertumbuhan mangrove adalah pH, salinitas, pasang surut, suhu, dan tekstur sedimen. Sederhananya, mangrove hidup di empat zona: wilayah terbuka, wilayah tengah, wilayah sungai yang airnya payau (kebanyakan air tawar), dan wilayah daratan yang airnya tawar.

- Hutan bakau terbuka menghadap ke laut. Van Steenis (1958) melaporkan bahwa *S. alba* dan *A. alba* merupakan spesies kodominan di wilayah pesisir tempat terjadinya banjir besar. Komposisi flora komunitas zona terbuka sangat bergantung pada substrat. *S. Alba* cenderung mendominasi pada tanah berpasir, sedangkan *Avicennia marina* dan *Rhizophora mucronata* cenderung mendominasi pada tanah berlumpur.
- Mangrove Sedang. Hutan bakau di zona ini berada di belakang hutan bakau di zona terbuka. Zona ini biasanya didominasi oleh jenis *Rhizophora*.
- Bakau air payau bakau tumbuh di sungai-sungai mulai dari air payau hingga hampir air tawar. Zona ini biasanya didominasi oleh komunitas *Nypa* atau *Sonneratia*. Komunitas *N. fruticans* terdapat di jalur sempit di sepanjang sebagian besar sungai. Pada jalur tersebut banyak dijumpai tegakan *N. fruticans* yang berasosiasi dengan vegetasi *Cerbera sp.*, *Gluta rengas*, *Stenochlaena palustris*, dan *Xylocarpus granatum*. Komunitas campuran *Sonneratia* dan *Nypa* lebih banyak ditemukan di dekat pantai (Nur et al, 2006).

1. Ekosistem Mangrove di Indonesia

Indonesia dikenal dengan sebutan negara kepulauan yang terdiri dari 17.000 pulau dan mempunyai garis pantai sepanjang 81.000 km dari luas daratan sekitar 1, 93 juta km² (Pramudji, 2000). Wilayah pantai (pesisir) di Indonesia banyak ditumbuhi hutan mangrove. Menurut Spalding dkk (2010) Indonesia memiliki hutan mangrove terluas di dunia yakni mencakup 21% dari luas total dunia.

Di Indonesia, mangrove tersebar hampir di seluruh pulau-pulau besar mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi sampai ke Papua, dengan luas sangat bervariasi bergantung pada kondisi fisik, komposisi substrat, kondisi hidrologi, dan iklim yang terdapat di pulau-pulau tersebut.

Hutan mangrove di Indonesia melebihi luas hutan mangrove milik Brazil (1,3 juta ha), Nigeria (1,1 juta ha), dan Australia (0,97 juta ha). Lahan mangrove terluas di Indonesia terdapat di Irian Jaya dengan luasan sekitar 1.350.600 ha (38%), Kalimantan 978.200 ha (28%) dan Sumatera 673.300 ha (19%) (Wetland International, 1999). Namun, menurut CIFOR (2012), luas hutan mangrove di Indonesia telah mengalami penurunan 30-50% pada setengah abad terakhir ini karena pembangunan daerah pesisir, perluasan pembangunan tambak, abrasi air laut, dan penebangan yang berlebihan. Ekosistem mangrove di Indonesia memiliki keragaman hayati yang tertinggi di dunia dengan jumlah total kurang lebih 89 spesies yang terdiri dari 35 spesies tanaman, 9 spesies perdu, 9 spesies liana, 29 spesies epifit dan 2 spesies parasite.

Umumnya mangrove dapat ditemukan di seluruh kepulauan Indonesia. Mangrove tumbuh dan berkembang dengan baik pada pantai yang memiliki sungai yang besar dan terlindung, yang masyarakatnya berusaha untuk memelihara dan melindungi. Kawasan hutan mangrove Indonesia berdasarkan statusnya dibedakan menjadi hutan produksi, taman nasional, suaka margasatwa, cagar alam, dan hutan lindung.

Pengelolaan kawasan ini menjadi tanggungjawab dan wewenang Departemen Kehutanan. Sedangkan untuk non-kawasan, dimana mangrove berada ataupun ditanam masyarakat di lahan-lahan milik masyarakat dan dikenal sebagai hutan rakyat, wewenang dan tanggungjawab berada ditangan pemerintah daerah (Karminasih, 2007).

2. Pengertian Ekowisata

Ekowisata adalah kegiatan wisata yang bersifat khas. Dalam hal ini, hanya kegiatan yang mengandung unsur "eco" saja yang dapat dikelompokkan ke dalam ekowisata, yaitu memperhatikan aspek

ekologis, ekonomi dan persepsi masyarakat. Secara khusus ada ahli yang mengatakan bahwa kegiatan ekowisata harus melibatkan unsur pendidikan. Secara ekologis, kegiatan ekowisata harus dapat menjaga kelestarian lingkungan. Secara ekonomis dapat menguntungkan bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat di sekitar kegiatan ekowisata. Di samping itu, kegiatan tersebut sebaiknya memperhatikan pendapat atau masukan masyarakat local (Mukhlisin, 2017). The International Ecotourism Society (TIES) mendefinisikan ekowisata sebagai perjalanan yang bertanggung jawab ke daerah yang masih alami untuk melestarikan lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat (Tanaya dan Rudiarto, 2014). Berdasarkan definisi tersebut, maka setidaknya terdapat tiga esensi utama ekowisata yaitu:

1. Melindungi dan melestarikan lingkungan

Menghargai kebudayaan lokal serta memberikan manfaat yang signifikan terhadap masyarakat setempat

2. Memberikan pembelajaran sekaligus perjalanan menyenangkan bagi wisatawan

Seiring berkembangnya ekowisata, prinsip-prinsip berevolusi untuk beradaptasi dengan kondisi lingkungan dan dinamika masyarakat lokal, dan pada tahun 2000an lima prinsip penting untuk ekowisata ditetapkan. Prinsip ekowisata adalah kegiatan ekowisata yang dilakukan tidak menimbulkan kerusakan atau pencemaran terhadap lingkungan atau budaya setempat. Salah satu cara untuk menerapkan prinsip ini adalah dengan memanfaatkan sumber daya lokal yang hemat energi dan dikelola oleh masyarakat sekitar. Penduduk lokal maupun wisatawan harus menghormati alam dan budaya setempat serta ikut serta dalam pelestariannya.

3. Pendidikan

Kegiatan wisata yang dilakukan hendaknya memberikan dimensi edukasi. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti memberikan informasi menarik seperti nama dan manfaat tumbuhan dan hewan di destinasi wisata. Kampanye kesadaran wisatawan ini mempromosikan upaya untuk melindungi alam dan budaya.

4. Pariwisata

Pariwisata merupakan suatu kegiatan yang melibatkan unsur kenikmatan dimana wisatawan mempunyai berbagai macam motif dalam mengunjungi suatu tempat. Aspek ini juga harus dimasukkan dalam ekowisata. Oleh karena itu, produk dan jasa pariwisata daerah kita juga harus memberikan unsur kenikmatan agar bernilai jual dan diterima pasar.

5. Ekonomi

Ekowisata yang dilakukan harus menghasilkan pendapatan dan keuntungan agar tetap berkelanjutan. Untuk mencapai hal tersebut, penting untuk menyediakan layanan dan produk pariwisata yang terbaik dan berkualitas tinggi. Untuk menyediakan jasa dan produk pariwisata berkualitas tinggi, penting agar pendapatan pariwisata tidak hanya digunakan untuk kegiatan konservasi di tingkat lokal, namun juga berkontribusi terhadap pengembangan pengetahuan masyarakat lokal, misalnya melalui pelatihan untuk meningkatkan keterampilan menjadi lebih baik. Jenis usaha pariwisata/daya tarik wisata yang diperkenalkan di tingkat lokal (desa).

6. Penguatan kelompok masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan kunci keberhasilan ekowisata di suatu destinasi. Hal ini bisa dimulai dari diri kita sendiri. Partisipasi dalam kegiatan pariwisata mempunyai manfaat langsung baik bagi konservasi maupun perekonomian. Jika manusia bisa menjaga alam tetap lestari dan bersih, mereka bisa menikmatinya. Selain itu perannya dalam kegiatan pariwisata juga membawa manfaat ekonomi.

Selain itu, terdapat prinsip-prinsip ekowisata yang terdiri dari 8 prinsip utama, antara lain:

1. Memiliki fokus area natural (natural area focus) yang memungkinkan wisatawan memiliki peluang untuk menikmati alam secara personal serta langsung.
2. Menyediakan interpretasi atau jasa pendidikan yang memberikan peluang kepada wisatawan untuk menikmati alam

sehingga mereka menjadi lebih mengerti, lebih mampu mengapresiasi serta lebih menikmati.

3. Kegiatan terbaik yang dapat dilakukan dalam rangka keberlanjutan secara ekologis.
4. Memberikan kontribusi terhadap konservasi alam dan warisan budaya.
5. Memberikan kontribusi secara kontinyu terhadap masyarakat lokal.
6. Menghargai serta peka terhadap nilai-nilai budaya yang ada di wilayah tersebut
7. Secara konsisten memenuhi harapan konsumen.
8. Dipasarkan serta dipromosikan dengan jujur serta akurat sehingga kenyataanya sesuai dengan harapan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah, bahwa terdapat 4 jenis ekowisata, yaitu:

1. Ekowisata Hutan

Ekowisata hutan merupakan ekowisata yang memanfaatkan sumber daya kawasan hutan khususnya hutan tropika. Kawasan hutan yang dapat berfungsi sebagai kawasan wisata yang berbasis lingkungan adalah kawasan Pelestarian Alam (Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam), kawasan Suaka Alam dan Hutan Lindung (Hutan Mangrove).

2. Ekowisata Bahari

Ekowisata bahari merupakan ekowisata yang memanfaatkan sumber daya pesisir dan laut. Kegiatan wisata yang dikembangkan dikelompokkan menjadi wisata pantai dan wisata bahari. Wisata pantai merupakan kegiatan wisata yang mengutamakan sumber daya pantai dan budaya masyarakat pantai seperti rekreasi, olahraga, menikmati pemandangan dan iklim, Sedangkan wisata bahari merupakan kegiatan wisata yang mengutamakan sumber daya bawah laut dan dinamika air laut.

3. Ekowisata Pegunungan

Ekowisata pegunungan adalah suatu kegiatan perjalanan wisata yang dilakukan secara sukarela yang bersifat sementara untuk

menikmati obyek dan daya tarik wisata. Ekowisata pegunungan memiliki pengertian sebagai objek wisata yang daya tarik utamanya adalah bersumber kepada keindahan alam, sumber daya alam, dan tata lingkungan yang terletak di lingkungan dataran tinggi dan menjadi tujuan destinasi wisata.

4. Ekowisata Karst

Ekowisata karst merupakan ekowisata yang memanfaatkan sumber daya suatu kawasan yang mempunyai karakteristik relief dan drainase yang khas, yang disebabkan oleh tingginya keterlarutan batuan di dalam air.

Pengembangan Ekowisata akan memberikan manfaat dan keuntungan sebagai berikut:

1. Ekowisata dapat memberikan perlindungan dan pelestarian hábitat termasuk flora dan fauna yang ada di dalamnya.
2. Ekowisata dapat memberikan wawasan, pengetahuan dan kesadaran wisatawan dan masyarakat akan pentingnya perlindungan dan pelestarian terhadap alam, termasuk mengenai pariwisata yang bertanggungjawab dan berkelanjutan.
3. Pengembangan ekowisata memberikan keuntungan dari segi ekonomi karena tidak membutuhkan sarana dan modal/investasi yang besar sebagaimana pariwisata konvensional.
4. Ekowisata dapat memberikan kontribusi terhadap devisa negara melalui kunjungan wisatawan. Selain itu, juga dapat memberikan pemasukan pendanaan untuk biaya konservasi yang merupakan salah satu dari prinsip dasar pengembangan kawasan ekowisata.
5. Dengan mengutamakan pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan ekowisata, hal ini memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat dan memberi keuntungan ekonomi bagi mereka.
6. Nilai-nilai sosial budaya masyarakat termasuk kearifan lokal yang dimiliki akan semakin terjaga, lestari dan dikenal.
7. Ekowisata dapat memberikan kontribusi terhadap devisa negara melalui kunjungan wisatawan. Selain itu, juga dapat

memberikan pemasukan pendanaan untuk biaya konservasi yang merupakan salah satu dari prinsip dasar pengembangan kawasan ekowisata.

8. Dengan mengutamakan pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan ekowisata, hal ini memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat dan memberi keuntungan ekonomi bagi mereka.
9. Nilai-nilai sosial budaya masyarakat termasuk kearifan lokal yang dimiliki akan semakin terjaga, lestari dan dikenal.

Menurut Putra (2014) terdapat tiga manfaat sekaligus yang diperoleh jika Pemerintah dan masyarakat dapat mengelola ekowisata dengan baik, yaitu kelestarian sumber daya alam akan terjaga, meningkatnya kesejahteraan masyarakat serta yang terakhir adalah Pemerintah tidak perlu menganggarkan biaya untuk konservasi lingkungan, karena masyarakat akan dengan sukarela menjaga kelestariannya.

3. Hutan Mangrove Sebagai Ekowisata

Ekowisata adalah bentuk pariwisata yang berfokus pada pelestarian alam pendidikan lingkungan, dan pengalaman wisata yang bertanggung jawab secara lingkungan. Tujuan utama ekowisata adalah untuk menghargai dan melestarikan keanekaragaman hayati dan ekosistem alam sambil memberikan manfaat ekonomi dan pendidikan kepada masyarakat setempat dan pengunjung.

Ekowisata memiliki potensi untuk mempromosikan kesadaran lingkungan, mendukung pelestarian alam, dan memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat lokal. Pengembangan ekowisata mangrove adalah upaya untuk menggabungkan pelestarian ekosistem mangrove dengan tujuan wisata yang berkelanjutan. Hal ini dapat memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat setempat sambil mempromosikan kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan. Namun, untuk berhasil secara berkelanjutan, maka ekowisata harus dikelola dengan hati-hati, mematuhi prinsip-prinsip keberlanjutan, dan meminimalkan dampak negatif terhadap

lingkungan. Oleh karena itu, perlu strategi-strategi yang digunakan untuk mengembangkan ekowisata dengan tetap memperhatikan keberlanjutan kesehatan lingkungan. Ekowisata mangrove merupakan suatu bentuk pemanfaatan sumberdaya hutan yang memperhatikan aspek jasa dan lingkungan secara berkelanjutan (Tarigan, 2019).

Pengembangan ekowisata mangrove perlu dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memberikan edukasi tentang pentingnya konservasi hutan mangrove. Konsep ekowisata yang diterapkan di hutan mangrove dapat dijadikan sebagai pendekatan dalam memanfaatkan sumberdaya yang berwawasan lingkungan (Salakory, 2016). Bentuk pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya yang optimal merupakan teknik yang tepat untuk melestarikan sumberdaya alam (Takarendehang et al., 2018). Pemanfaatan hutan mangrove sebagai sarana ekowisata memerlukan rencana pengelolaan yang komprehensif untuk menjamin keberlanjutannya. Peran stakeholder sangat diperlukan untuk mewujudkan pengelolaan tersebut (Febryano, 2014). Kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai nilai ekonomi ekowisata mangrove menjadikan kegiatan pengelolaan belum berjalan baik, sehingga perlu dilakukan penilaian ekonomi sebagai langkah untuk menentukan arah pengelolaan (Maulidia et al., 2019).

4. Vegetasi dan Spesies sebagai Potensi Pengembangan Ekowisata

Vegetasi yaitu kumpulan dari beberapa spesies tumbuh-tumbuhan yang tumbuh bersama-sama pada satu tempat dimana antar individu penyusunnya terdapat interaksi yang erat, baik antara tumbuh-tumbuhan maupun dengan hewan-hewan yang hidup dalam lingkungan tersebut (Supriyatno, 2010). Struktur dan komposisi vegetasi tumbuhan dipengaruhi oleh komponen ekosistem lainnya yang saling berinteraksi, sehingga vegetasi yang tumbuh secara alami merupakan hasil interaksi berbagai faktor lingkungan (Rizka, 2013). Pada Desa Margasari terdapat beberapa jenis vegetasi, yaitu jenis Api-Api, Bakau, dll. Dilansir dari Encyclopedia Britannica, spesies dalam istilah biologi, adalah

klasifikasi yang terdiri dari organisme terkait yang memiliki karakteristik sama dan mampu kawin silang. Spesies yang terdapat di Desa Margasari antara lain, Bangau, Elang Bondol, dan lain-lain.

Wisata daerah pantai pada umumnya memiliki daya tarik berupa hamparan pasir atau karang. Kondisi ini berbeda untuk wisata Pantai di Kecamatan Labuhan Maringgai tepatnya di desa Margasari yang banyak tambak di sepanjang Pesisir Timur Lampung, termasuk daerah yang ditempati stasiun transit pipanisasi gas PT. Pertamina Gas Negara (PGN). Sebelumnya daerah ini sering terjadi abrasi pantai yang disebabkan karena ombak dan arus laut. Mengatasi hal tersebut akhirnya banyak pihak yang memberikan solusi berupa penanaman tanaman mangrove. Akhirnya secara bertahap daerah ini mulai rimbun dengan tanaman bakau di garis pantainya. Akar-akar tanaman bakau yang terhampar di daerah ini bisa menahan gelombang dan arus laut, yang mengakibatkan area pantai dan daratan di belakangnya lebih terlindungi.

Ada beberapa jenis pohon atau vegetasi yang tumbuh atau ditanam di kawasan mangrove Margasari, yaitu:

1. Jenis Api-Api (*Avicennia* sp)
Kingdom : Plantae
Filum : Thacheophyta
Kelas : Magnoliopsida
Ordo : Lamiales
Famili : Avicenniaceae
Genus : *Avicennia*
Spesies : *Avicennia alba* Blume

Tanaman api-api (*Avicennia alba blume*) merupakan jenis pionir pada habitat rawa mangrove di lokasi pantai yang terlindung, juga di bagian yang lebih asin di sepanjang garis pantai, dan umumnya menyukai bagian muka teluk. Akarnya dapat membantu pengikatan sedimen dan mempercepat proses pembentukan daratan. Perbungaan terjadi sepanjang tahun. Genus ini kadang-kadang bersifat vivipar, sebagian buah berbiak ketika masih menempel dipohon. *Avicennia alba blume* termasuk golongan pohon dengan ketinggian + 15 meter. Kulit kayu berwarna keabu-abuan

atau gelap kecoklatan, beberapa tangkai terdapat tonjolan kecil, sementara yang lain sering memiliki permukaan yang halus. Pada bagian batang yang tua, kadang-kadang ditemukan serbuk tipis. Permukaan daun berwarna perak kelabu atau putih dengan susunan daun tunggal dan bersilangan, berbentuk lanset hingga lonjong dengan ujung runcing yang panjangnya 10-18cm, berada diujung atau di ketiak daun pada pucuk dengan ukuran diameter 0,4-0,5 cm, jumlah kelopak 5 helai, mahkota 4, dan benang sari 4. Buah umumnya berbentuk seperti cabe atau biji jambu mete, berwarna hijau kekuningan dengan ukuran panjang 2,5-4 cm dan lebar 1,5-2 cm, permukaannya berambut halus. Tanaman api-api (*Avicennia alba blume*) dapat dilihat pada gambar 2.2 sebagai berikut.



(Sumber: <https://powo.science.kew.org/taxon/>)

Gambar 2. 2. Spesies Mangrove *Avicennia Alba Blume*

1. Bakau (*Rhizophora* sp)
Kingdom : Plantae
Divisi : Magnoliophyta
Kelas : Magnoliopsida
Ordo : Malpighiales
Famili : Rhizophoraceae
Genus : *Rhizophora*

Tanaman Bakau merupakan pohon besar, dengan akar tunjang yang menyolok dan bercabang-cabang. Tinggi total 4-30 m, dengan tinggi akar mencapai 0,5-2 m atau lebih di atas lumpur, dan

diameter batang mencapai 50 cm. Berdaun tunggal, terletak berhadapan, terkumpul di ujung ranting, dengan kuncup tertutup daun. Helai daun eliptis, tebal licin serupa kulit, hijau atau hijau muda kekuningan, berujung runcing, bertangkai, $3,5-13 \times 7-23$ cm. Daun penumpu cepat rontok, meninggalkan bekas serupa cincin pada buku-buku yang menggebung. Bunga berkelompok dalam payung tambahan yang bertangkai dan menggarpu di ketiak, 2-16 kuntum, berbilangan 4. Tabung kelopak bertaju sekitar 1,5 cm, kuning kecokelatan atau kehijauan, melengkung. Daun mahkota putih berambut atau gundul agak kekuningan, bergantung jenisnya, perbungaan terjadi sepanjang tahun. Berdasarkan penjelasan diatas, tanaman bakau (*Rhizophora s.p*) dapat dilihat pada gambar 2.3 berikut.



(Sumber: id.wikipedia.org/wiki/Bakau)

Gambar 2. 3. Spesies Mangrove *Rhizophora*

2. Tancang *Bruguiera* sp)
 - Kingdom : Plantae
 - Divisi : Magnoliophyta
 - Kelas : Magnoliopsida
 - Ordo : Myrtales
 - Familia : Rhizophoraceae
 - Genus : *Bruguiera*
 - Spesies : *Bruguiera gymnorhiza*

Tumbuhan tancang (*Bruguiera gymnorrhiza*) memiliki tipe akar lutut yang berwarna coklat, batang memiliki lintisel. Daun berwarna hijau dengan permukaan yang licin dan mengkilap, tebal seperti kulit, berbentuk elips hingga lanset, memiliki bunga yang berwarna orange hingga merah, terletak di ketiak daun dengan daun mahkota dan daun kelopak yang masing-masing berjumlah 10-14. Buah *Bruguiera gymnorrhiza* melingkar spiral, berbentuk bundar melintang dengan panjang 2-2,5 cm. Berdasarkan ciri morfologi tumbuhan tancang (*Bruguiera gymnorrhiza*) diatas, dapat dilihat pada Gambar 2.4 berikut.



(Sumber: <https://id.wikipedia.org/wiki/Bruguiera>)

Gambar 2. 4. Spesies Mangrove *Bruguiera*

3. Pedada (*Sonneratia* sp)

Kingdom : Plantae

Divisi : Magnoliophyta

Kelas : Magnoliopsida

Ordo : Myrtales

Famili : Lythraceae

Genus : *Sonneratia*

Buah pedada banyak ditemui di daerah perairan payau yang merupakan tempat bertumbuhnya tanaman mangrove. Buah pedada merupakan buah yang bagian dasarnya terbungkus kelopak bunga,

berbentuk bola, dan ujung buah tersebut bertangkai. Buah tersebut tidak beracun dan langsung dapat dimakan. Buah pedada memiliki rasa yang asam dan aroma yang khas yang menjadi daya tarik buah tersebut (Spalding, 2010). Buah pedada, merupakan jenis tumbuhan yang umumnya hidup di perairan dekat pantai. Di Indonesia sendiri, tanaman ini sangat melimpah jumlahnya, bahkan berdasarkan sumber yang ada disebutkan bahwa luas hutan bakau Indonesia antara 2,5 hingga 4,5 juta hektar, merupakan mangrove yang terluas di dunia, melebihi Brazil (1,3 juta ha), Nigeria (1,1 juta ha) dan Australia (0,97 ha). Berdasarkan penjelasan diatas, gamabaran tanaman buah pedada dapat dilihat pada Gambar 2.5 berikut.



(Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Pidada_merah)

Gambar 2. 5. Spesies Mangrove *Sonneratia*

Jenis yang mendominasi adalah jenis Api-Api. Selain dari jenis pohon tersebut ada juga tanaman Nipah (*Nyfa fruticans*), yang menjaga dan melindungi area pantai dari abrasi. Hutan mangrove juga menjadi habitat dari banyak satwa liar. Banyak ditemukan kepiting di bawah pohon bakau, yang menjadi tempat tinggal habitat kepiting bakau, ini juga berpotensi untuk dijadikan sebagai komoditas tambahan yang memiliki nilai jual. Beberapa spesies burung yang ditemukan di sekitar Hutan Mangrove Desa Margasari, diantaranya:

1. Bangau Tongtong (*Leptoptilos javanicus*)

Kingdom : Animalia
Filum : Chordata
Kelas : Aves
Ordo : Ciconiiformes
Famili : Ciconiidae
Genus : *Leptoptilos*
Spesies : *L. javanicus*

Tinggi burung tong tong dewasa dapat mencapai 100 cm, dan rentang sayap 200 cm. Spesies ini adalah yang terkecil dalam genus *Leptoptilos*. Bagian atas tubuhnya dan sayapnya berwarna hitam, namun perut, kalung leher dan bagian bawah ekor berwarna putih. Kepala dan lehernya botak, dengan bulu kapas putih halus pada mahkota. Paruhnya berwarna pucat, panjang, dan tebal. Burung muda warnanya lebih kusam daripada burung dewasa. Spesies Bangau Tongtong (*Leptoptilos javanicus*) dapat dilihat pada Gambar 2.6 berikut.



(Sumber: <https://baliwildlife.com/id/ensiklopedia/hewan/>)

Gambar 2. 6. Spesies Mangrove *Leptoptilos javanicus*

1. Pecuk Ular Asia (*Anhinga melanogaster*)

Kingdom : Animalia
Filum : Chordata
Kelas : Aves

Ordo : Suliformas
Famili : Anhingidae
Genus : Anhinga
Spesies : Anhinga melanogaster

Pecuk-ular asia memiliki tubuh berukuran besar (84 cm). Burung air seperti pecuk dengan leher ramping dan sangat panjang, kepala sempit kecil, kepala dan leher coklat, ada setrip dagu putih sepanjang leher. Bulu bagian lain kehitaman, bulu penutup putih halus dengan pinggir hitam. Iris coklat, paruh coklat kekuningan, kaki keabu-abuan. Mampu menyelam dalam jangka waktu lama. Mampu mengurangi daya apung, yang tampak hanya kepala saja waktu berenang. Bulu menyerap air, mengempakkan sayap dan berlari di atas air saat akan terbang. Spesies Pecuk-ular asia dapat dilihat pada Gambar 2.7 berikut.



(Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Pecuk-ular_afrika)

Gambar 2. 7. Spesies Mangrove Anhinga melanogaster

2. Cagak/Kuntul Besar (*Ardea alba*)

Kingdom : Animalia
Filum : Chordata
Kelas : Aves
Ordo : Pelecaniformes
Famili : Ardeidae
Genus : Ardea
Spesies : Ardea alba

Kuntul yang memiliki tubuh berukuran besar (95 cm), jauh lebih besar dari jenis kuntul yang lain. Paruh terkesan lebih berat, leher sangat panjang dengan tekukan bersimpul khas. Iris kuning. Pada musim tidak berbiak: kulit muka kekuningan, paruh kuning biasanya berujung hitam, bagian tungkai (paha) yang tak berbulu dan kaki berwarna hitam. Pada musim berbiak, kulit muka hijau kebiruan, dengan bulu-bulu halus menjumbai di tubuh, paruh hitam, kaki hitam, tungkai/paha tak berbulu berwarna merah atau hitam. Berdasarkan penjelasan diatas, burung kuntul dapat dilihat pada Gambar 2.8 berikut.



(Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Kuntul_besar)

Gambar 2. 8. Spesies Mangrove *Ardea alba*

3. Elang Bondol (*Haliastur indus*)

Kingdom : Animalia
Filum : Chordata
Kelas : Aves
Ordo : Accipitriformes
Famili : Accipitridae
Genus : *Haliastur*
Spesies : *Haliastur indus*

Elang bondol berukuran sedang (43–51 cm), memiliki sayap yang lebar dengan ekor pendek dan membulat ketika membentang. Bagian kepala, leher dan dada berwarna putih, sisanya berwarna merah bata pucat, bagian ujung bulu primer berwarna hitam, dan tungkai berwarna kuning. Pada individu anak secara keseluruhan berwarna coklat gelap, pada beberapa bagian bergaris-garis putih mengkilap. Berdasarkan penjelasan diatas, spesies Elang Bondol (*Haliastur indus*) dapat dilihat pada Gambar 2.9 berikut.



(Sumber: <https://www.balisafarimarinepark.com/mengenal-elang-bondol/>)

Gambar 2. 9. Spesies Mangrove *Haliastur indus*

4. Cekakak Sungai (*Todirhamphus chloris*)

Kingdom : Animalia
Filum : Chordata
Kelas : Aves
Ordo : Coraciiformes
Famili : Alcedinidae
Genus : *Todirhamphus*
Spesies : *Todirhamphus chloris*

Cekakak sungai memiliki tubuh berukuran sedang. Panjang tubuhnya mencapai 24 cm. Warna utama pada tubuhnya yaitu biru dan putih. Hanya pada bagian mahkota, sayap, punggung, dan ekor yang terdapat kilauan warna biru kehijauan yang terang. Di matanya

terdapat garis berwarna hitam. Kekang putih. Kerah dan Tubuh bagian bawah putih bersih. Iris coklat, paruh atas abu tua, paruh bawah pucat, kaki abu-abu. Bertengger pada bebatuan atau pohon. Mangsa besar dibanting-bantingan dahulu sebelum dimakan. Sangat ribut, suara keras hampir terdengar sepanjang hari. Berdasarkan penjelasan diatas, burung Cekakak Sungai dapat dilihat pada gambar 2.10 berikut.



(Sumber: https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Cekakak_sungai)

Gambar 2. 10. Spesies Mangrove Todirhamphus chloris

5. Cerek Jawa (*Charadrius javanicus*)

- Kingdom : Animalia
- Filum : Chordata
- Kelas : Aves
- Ordo : Charadriiformes
- Famili : Charadriidae
- Genus : *Charadrius*
- Spesies : *C. javanicus*

Burung perandai berukuran kecil (15 cm), berparuh pendek. Tubuh berwarna coklat dan putih; warna burung jantan dan betina serupa. Mirip cerek tilil tetapi kepalanya lebih coklat kemerahan, kakinya pucat, dan garis di dada tanpa warna hitam. Warna putih kerah belakang biasanya tidak menyambung. Iris coklat, paruh hitam, tungkai abu-abu hijau zaitun atau coklat pucat, seperti pada Gambar 2.11 berikut.



(Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Cerek_jawa)

Gambar 2. 11. Spesies Mangrove *Charadrius javanicus*

7. Cerek Tilil (*Charadrius alexandrius*)

- Kingdom : Animalia
- Filum : Chordata
- Kelas : Aves
- Ordo : Charadriiformes
- Famili : Charadriidae
- Genus : *Charadrius*
- Spesies : *C. alexandrius*

Cerek tilil memiliki tubuh ukuran kecil (15 cm). Warna coklat putih. Paruh pendek. Perbedaan dengan Cerek-kalung kecil: Kaki hitam. Garis putih jelas pada sayap saat terbang. Warna lebih putih pada ekor terluar. Bercak hitam (jantan) atau coklat (betina) pada sisi dada. Iris coklat, paruh hitam, kaki hitam. Mencari makan sendiri atau kelompok kecil. Sering berbaur dengan burung perancah lain. Spesies burung ini dapat dilihat pada Gambar 2.12 berikut.



(Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Cerek_tilil)

Gambar 2. 12. Spesies Mangrove *Charadrius alexandrius*

8. Dara Laut Jambul (*Thalasseus bergii*)

Kingdom : Animalia
Filum : Chordata
Kelas : Aves
Ordo : Charadriiformes
Famili : Sternidae
Genus : *Sterna*
Spesies : *T. bergii*

Dara laut jambul memiliki tubuh berukuran besar (45 cm). Kepala berjambul, paruh kuning. Tubuh bagian atas abu-abu, bagian bawah putih. Muda: Abu-abu lebih gelap. Bagian atas berbintik coklat dan putih. Ekor abu-abu. Musim panas: Mahkota dan jambul hitam, berubah berbintik putih saat peralihan musim. Musim dingin: Mahkota putih. Jambul berbintik abu-abu. Iris coklat, paruh kuning, kaki hitam. Mencari ikan dalam kelompok kecil. Kadang bersama dengan Dara-laut lain. Beristirahat di pantai, bagan, tiang, atau benda terapung di air. Sering terbang sampai agak jauh ke tengah laut. Sarang berupa cekungan dangkal di pasir. Telur berwarna kuning tua, berbintik abu-abu, jumlah 1-2 butir. Spesies burung ini dapat dilihat pada Gambar 2.13 berikut.



(Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Dara-laut_jambul)

Gambar 2. 13. Spesies Mangrove *Thalasseus bergii*

9. Elang Tikus (*Elanus caeruleus*)
Kingdom : Animalia
Filum : Chordata
Kelas : Aves
Ordo : Accipitriformes
Famili : Accipitridae
Genus : *Elanus*
Spesies : *E. caeruleus*

Berukuran 30 cm. Berwarna putih, abu-abu dan hitam. Berbecak hitam pada bahu, bulu primer hitam panjang khas. Apabila mereka sudah dewasa, mereka berciri-ciri: terdapat mahkota di punggung, sayap pelindung dan bagian pangkal ekor abu-abu. Muka, leher dan bagian bawah putih, paruh berwarna hitam dan kaki berwarna kuning. Pada jenis burung yang masih muda, iris matanya berwarna kuning, tetapi saat sudah dewasa iris matanya berubah menjadi merah. Spesies burung ini dapat dilihat pada Gambar 2.14 berikut.



(Sumber: https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Elang_tikus)

Gambar 2. 14. Spesies Mangrove *Elanus caeruleus*

Semua satwa tersebut dilindungi berdasar UU No. 5 Tahun 1990 dan UU No. 106 Tahun 2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa di Desa Margasari Lampung Timur didapatkan beberapa potensi yang ada di hutan mangrove, yaitu sebagai sumber mata pencaharian masyarakat khususnya yang berprofesi sebagai nelayan. Masyarakat Desa Margasari sangat bergantung dengan keberadaan hutan mangrove. Hutan mangrove juga menjadi tempat ekowisata yang sangat berpotensi meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Margasari. Selain itu juga hutan mangrove yang dikelola menjadi ekowisata menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat di Desa Margasari, sebagai contoh keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ekowisata sebagai pemandu wisata (tour guide) dan masyarakat juga berperan dalam pengadaan penjualan souvenir khas dari Desa Margasari.

Potensi selanjutnya yaitu rajungan. Rajungan yang ada di Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur memiliki kualitas terbaik, seperti ukurannya yang cukup besar dan kualitas yang tinggi jika dibandingkan daerah di laut Pulau Jawa dan laut Sulawesi. Ciri-ciri rajungan dapat dilihat pada Gambar 2.15 berikut.



(Sumber: <https://resepkoki.id/4-tips-untuk-mengolah-rajungan/>)

Gambar 2. 15. Rajungan

C. PENUTUP

Mangrove merupakan tanaman yang kaya akan manfaat dan terdiri dari beragam spesies yang perlu dilestarikan. Keragaman ini dapat memberikan beragam manfaat juga apabila dikelola dan dilestarikan dengan bijak. Sebagai tanaman yang hidup di pesisir pantai, mangrove memiliki banyak sekali manfaat selain sebagai penahan abrasi, juga memberikan manfaat dari segi ekonomi dan sosial. Dari segi ekonomi mangrove berfungsi sebagai penghasil kebutuhan. Dari segi sosial, adanya hutan mangrove, membuat terjalinnya hubungan sosial masyarakat khususnya daerah disekitar mangrove. Kehadiran vegetasi dalam hutan mangrove juga menjadi pondasi bagi ekosistem ini, yang secara langsung dan tidak langsung memengaruhi keberlanjutan dan keberagaman hayati serta memberikan manfaat bagi manusia yang bergantung pada ekosistem pesisir ini.. Strategi pengembangan ekowisata mangrove dapat dilakukan dengan mengembangkan ekowisata mangrove serta menjadikan kegiatan konservasi serta rehabilitasi mangrove sebagai salah satu program wisata dengan pemanfaatan dana dan meningkatkan komitmen pemerintah terhadap pengembangan mangrove.

D. DAFTAR PUSTAKA

- Alikodra, H. S. Potensi Ekonomi Maritim dari Mangrove dan Pengelolaannya. Makalah Seminar Pembangunan Ekonomi Maritim Indonesia. Jakarta.
- Bengen, D. G. and I. M. Dutton. 2004. Interaction: Mangroves, Fisheries and Forestry Management in Indonesia. H. 632-653. Dalam Northcote. T. G. dan Hartman (Ed), Worldwide watershed interaction and management. Blackwellscience.. Oxford. UK.
- Djamaluddin, R. 2018. Mangrove: Biologi, Ekologi, Rehabilitasi, dan Konservasi. Unstrat Press.
- Febryano, I.G. 2014. Politik Ekologi Pengelolaan Mangrove di Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung. Bogor: Institut Pertanian Bogor. 113p.
- Haryanto, J. T. 2014. Model pengembangan ekowisata dalam mendukung kemandirian ekonomi daerah studi kasus provinsi DIY. Jurnal Kawistara. 4(3).
- Hutabarat, S dan S. M. Evans. 2017. Pengantar oseanografi. UI Press. Jakarta.
- Karimah. 2017. Peran Ekosistem Hutan Mangrove Sebagai Habitat Untuk Organisme Laut. Jurnal Biologi Tropis. 17(2): 51-58.
- Karminasih, E. 2007. Pemikiran Konseptual Pemanfaatan Ekosistem Mangrove bagi Minimasi Dampak Bencana di Wilayah Pesisir. JMHT. 13(3): 182-187.
- Kusmana, C. (2003). Teknik Rehabilitasi Mangrove. Fakultas Kehutanan IPB. Bogor.
- Kustanti, A. Manajemen Hutan Mangrove. Buku. IPB Press. Bogor. 248.
- Imran, Ali dan Efendi, Ismail.2016. Inventarisasi Mangrove di Pesisir Pantai Cemare Lombok Barat. JUVE; vol. I.
- Latuconsina, H. 2016. *Ekologi Perairan Tropis: Prinsip Dasar Pengelolaan Sumber Daya Hayati Perairan*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Nontji, A. 1987. *Laut Nusantara*. Djambatan. Jakarta.

- Noor, Y, R., Khazali, M., dan Suryadiputra, I. N.N. 2006. Panduan Pengenalan Mangrove Indonesia. Weetlands International Indonesia Progamme. Bogor.
- Maulana. 2019. Persepsi Masyarakat Terhadap Keberadaan Hutan Mangrove di Sekitar Kawasan Pulau Kaget Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan. *Jurnal Sylva Scientae*, Vol 2(6). Jurusan Kehutanan. Universitas Lambung Mangkurat.
- Maulida, G., Supriharyono. & Suryanti. 2019. Valuasi ekonomi pemanfaatan ekosistem mangrove di Kelurahan Kandang Panjang, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. *Journal of Maquares*, 8(3), 133-138.
- Mukhlisin. 2017. Potensi Pengembangan Ekowisata Mangrove Di Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau (Potential Development Of Mangrove Ecotourism In Tanjung Batu Village, Derawan Island District, Berau Regency). *Jurnal Manusia & Lingkungan*. 24(1):23-30.
- Pramudji. 2000. Hutan Mangrove di Indonesia. IPB Press. Bogor.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan.
- Putra, W. 2014. Kawasan Ekowisata Hutan Mangrove Di Desa Kuala Karang Kabupaten Kubu Raya. *Jurnal online mahasiswa Arsitektur Universitas Tanjungpura*. 2(2):41-55.
- Rizka, A. 2013. Study keanekaragaman tumbuhan herba pada area tidak bertajuk blok curah jarak hutan musim taman nasional baluran. *jurnal biologi*. Vol 3(4). UIN. Sumatera Utara.
- Saenger, P., E. J. Hegerl and J. D. S. DA Vie. 1983. Global status of mangrove ecosystems. By the working group on mangrove ecosystems on the IUCN Commission on Ecology. *The environmentalist*, Vol. 3. Supplement No.: p. 88.
- Safe'i, Rahmat. 2020. Nilai Status dan Perubahan Kesehatan Hutan Mangrove. *Perennial*. 16(2):73-79.

- Safe'i, R., Kaskoyo, H., dan Darmawan, A. 2020. Analisis Kesehatan Pohon Dengan Menggunakan Metode Forest Health Monitoring. Seminar Nasional. Jurusan Kehutanan. Universitas Lampung
- Salakory, H.S.M. 2016. Analisis Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Nelayan Berdasarkan Nilai Tukar (NTN) di Kampung Sowi IV Kabupaten Monokwari. *The Journal of Fisheries Development* Vol 2, No.2:45-54. *The Journal of Fisheries Development* Vol 2, No.2:45-54.
- Sumardi, dan Widyastuti, S. M. 2007. Dasar-Dasar Perlindungan Hutan. Cetakan II. Gama Press. Yogyakarta.
- Supriyatno. 2010. *Biologi Umum*. Unsyiah. Banda Aceh.
- Takarendehang, R., Sondak, C.F.A., Kaligis, E. Kumampung, D., Menembu, I.S., dan Rembet, U.N.W.J. 2018. Kondisi Ekologi dan Nilai Manfaat Hutan Mangrove di Desa Lansa Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Pesisir dan Laut Tropis*, 2(1), 45-42.
- Tanaya, D.R., dan Rudiarto, I. 2014. Potensi Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat Di Kawasan Rawa Pening, Kabupaten Semarang, *Jurnal Teknik PWK*. 3(1): 71-81.
- Taringan, A. A. 2019. Persepsi Masyarakat Terhadap Potensi atau Daya Tarik Pengembangan Ekowisata Mangrove di Belawan. Universitas Sumatra Utara. Medan.
- TIES (The International Ecotourism Society). 2002. Quebec Declaration On Ecotourism. Canada.
- Van Steenis, C.G.G.J., 1958. Ecology of Mangroves. Introduction to Account of the Rhizophoraceae by Ding Hou, *Flora Malesiana*, Ser. I. 5, pp. 431-441.

BAB 3

KARAKTERISTIK MASYARAKAT PESISIR DALAM PENGEMBANGAN EKOWISATA

Oleh :

Prof. Dr. Ir. Kordiyana K Rangga, M.S.

Tyas Sekartiera Syafani, S.P.,M.Si.

A. PENDAHULUAN

Karakteristik adalah sifat yang dimiliki oleh seorang individu yang kemudian dicerminkan dalam pola pikir, sikap, serta tindakan dalam lingkungan (Mandang, Sondakh dan Laoh, 2020). Sifat-sifat yang melekat pada seorang individu merupakan karakteristik dari individu atau responden tersebut. Karakteristik dari seseorang dapat memberikan gambaran sikap serta penerimaan orang tersebut terhadap sebuah kegiatan usahatani atau kegiatan non-usahatani. Karakteristik berperan penting dalam kemampuan orang tersebut. Karakteristik masyarakat sangat mempengaruhi efektivitas kegiatan pemberdayaan dan penyuluhan. Pemahaman mendalam tentang karakteristik masyarakat memungkinkan penyusunan program yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas masyarakat, meningkatkan peluang kesuksesan dan dampak positif yang berkelanjutan. Karakteristik yang diamati dalam pemberdayaan masyarakat, diantaranya adalah umur, lama tinggal di desa, jumlah anggota rumah tangga, pendidikan terakhir, pekerjaan utama dan

sampingan, pendapatan, keikutsertaan dalam kelompok/lembaga desa, dan keikutsertaan dalam pendidikan non formal (penyuluhan, pelatihan, pendampingan, dan lain lain) di dalam lingkungan lokasi kajian, yaitu Kecamatan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur.

B. METODE PENELITIAN

Kegiatan kajian/penelitian dilakukan di Kabupaten Lampung Timur dengan pertimbangan kabupaten tersebut sebagian besar merupakan daerah yang terletak di pesisir pantai dan dikelilingi oleh perbukitan serta dataran rendah. Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, nelayan, atau bekerja di sektor perdagangan dan jasa. Lokasi penelitian terletak di Desa Margasari merupakan desa yang memiliki hutan mangrove paling luas di Provinsi Lampung, sehingga dijadikan sebagai pusat kegiatan pengelolaan hutan mangrove, namun pengembangan dan pengelolaan ekowisata di Desa Margasari masih belum maksimal. Waktu pelaksanaan penelitian untuk pengumpulan data kuantitatif, kualitatif, dan pengamatan dilakukan pada Mei-Juni 2023. Data dikumpulkan dengan wawancara kepada responden menggunakan kuesioner dan informasi- informasi yang diperoleh berdasarkan *Focus Group Discussion* (FGD), kemudian dianalisis secara deskriptif.

Populasi penelitian ini adalah masyarakat Desa Margasari, Kabupaten Lampung Timur. Jumlah kecukupan sampling berdasarkan perhitungan dengan menggunakan metode Lemeshow sugi dengan *margin error* 10%, didapat jumlah sampel minimal sebanyak 60 sampel. Jumlah sampel sebanyak 60 telah memenuhi kriteria teorema limit sentra yang menyatakan apabila sampel $n \geq 30$ maka akan berdistribusi normal. Menurut Roscoe (1982) dalam Sugiyono (2021), ukuran sampel yang layak dalam penelitian minimal adalah 30, sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini dirancang sebanyak 50 orang responden. Instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data penelitian dalam penelitian ini adalah:

- 1) Daftar pertanyaan/kuesioner yang disiapkan dan disusun sebelum penelitian dilaksanakan oleh peneliti.

- 2) Pedoman pertanyaan yaitu: sejumlah pertanyaan kunci untuk merekam fenomena-fenomena kualitatif baik untuk responden penelitian maupun pihak-pihak lain yang terkait yang sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian.
- 3) Pengamatan langsung terhadap objek penelitian.
- 4) Wawancara secara mendalam kepada sejumlah responden terpilih dan informan lain yang diperlukan.

Kuesioner yang dibuat dalam beberapa bentuk, baik yang bersifat pilihan jawaban yang menunjukkan pemeringkatan jawaban, maupun dalam bentuk jawaban terbuka. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik dengan penggunaan metode penelitian yang berpusat pada masalah teraktual pada saat ini. Data yang terkumpul terdiri dari data kualitatif dan kuantitatif. Data yang dikumpulkan dengan bantuan kuesioner terstruktur, kemudian data dianalisis secara deskriptif kuantitatif. Data kuantitatif dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi peubah-peubah yang telah ditetapkan, dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi.

C. PEMBAHASAN

1. Masyarakat

Masyarakat merupakan sekumpulan individu yang tinggal dan hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki norma dan tatanan kehidupan serta adat istiadat yang ditaati dalam lingkungan tersebut. Menurut Koentjaraningrat (1990) dalam Usman Pelly dkk, (1994) mengungkapkan bahwa masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang di dalamnya terdapat interaksi berdasarkan suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan di dalamnya terdapat ikatan dari rasa identitas bersama yang menjadi ciri khas suatu kumpulan individu tersebut.

Masyarakat juga dinilai sebagai suatu kesatuan yang selalu berubah-ubah yang hidup karena adanya proses masyarakat. Proses masyarakat sendiri terbentuk melalui hasil interaksi yang

berkelanjutan antar individu dalam lingkup masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat selalu dijumpai aktivitas yang saling memberi pengaruh antar kehidupan individu dengan kehidupan bermasyarakat (Soetomo, 2009). Menurut Soerjono Soekanto, masyarakat adalah sebuah sistem hidup bersama yang kemudian memunculkan adanya kebudayaan dan keterikatan satu sama lain, di mana berbagai pola tingkah laku dari setiap individu atau kelompok yang khas menjadi pengikat satu kesatuan manusia dan bersifat kontinyu. Istilah masyarakat (*society*) dapat diartikan tidak ada ciri-ciri atau ruang lingkup tertentu yang menjadi pegangan untuk mengadakan suatu analisa secara ilmiah. Istilah masyarakat sendiri mencakup dari masyarakat sederhana yang buta huruf, sampai pada masyarakat-masyarakat industrial moderen yang merupakan suatu negara. Istilah masyarakat juga digunakan untuk mendeskripsikan suatu kelompok manusia yang kecil, sampai pada kelompok-kelompok besar dalam suatu lingkup wilayah yang terorganisasi (Soekanto, 1983). Berdasarkan pengertian menurut beberapa ahli di atas maka dapat disimpulkan masyarakat adalah suatu hubungan individu/sekelompok orang-orang yang hidup secara mengelompok di mana di dalamnya terdapat interaksi satu sama lain berdasarkan norma dan tatanan kehidupan yang saling mempengaruhi dan menimbulkan perubahan sosial dalam kehidupan.

2. Pesisir

Wilayah pesisir merupakan suatu daerah peralihan antara darat dan laut di mana bagian lautnya masih dipengaruhi oleh aktivitas daratan, seperti pengendapan dan aliran air tawar, dan bagian daratannya pula masih dipengaruhi oleh aktivitas lautan seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin (Ketchum, 1973). Lebih lanjut (Febryano et al., 2014) mengungkapkan daerah pesisir dicirikan dengan ekosistem mangrove karena memiliki nilai yang dipandang oleh berbagai faktor pengembang lahan yang memiliki insentif untuk mengakses kawasan tersebut.

Wilayah pesisir berisiko terkena tekanan dari berbagai aktivitas dan fenomena di darat maupun di laut. Fenomena yang terjadi di darat antara lain abrasi, banjir, dan aktivitas masyarakat

seperti membangun pemukiman, membuka hutan untuk persawahan, dan membuat tambak, yang pada akhirnya berdampak pada ekosistem pesisir. Begitu pula dengan fenomena-fenomena laut seperti pasang surut dan gelombang tinggi. (Hastuti, 2012).

Menurut Rohmin (2003) wilayah laut dan pesisir memiliki ciri khas atau karakteristik sebagai berikut.

1. Pesisir merupakan kawasan yang strategis karena memiliki topografi yang relatif mudah dikembangkan dan memiliki akses yang sangat baik (dengan memanfaatkan laut sebagai “prasarana” pergerakan).
2. Pesisir merupakan kawasan yang kaya akan sumber daya alam, baik yang terdapat di ruang daratan maupun ruang lautan, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

1. Masyarakat pesisir

Masyarakat pesisir merupakan kumpulan individu-individu atau sekelompok orang yang tinggal di wilayah pesisir dengan sumber kehidupan perekonomian yang secara langsung tidak bergantung pada pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir (Carla, Dietrich, dan Nikijuluw, 2001). Lebih lanjut menurut Arif Satria (2015) masyarakat pesisir adalah sekumpulan masyarakat yang hidup bersama sama mendiami wilayah pesisir membentuk dan memiliki kebudayaan yang khas, yang terkait dengan ketergantungannya pada pemanfaatan sumberdaya pesisir. Masyarakat pesisir ini umumnya dikenal sebagai masyarakat nelayan karena mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai nelayan.

Masyarakat pesisir adalah sekumpulan individu atau kelompok yang menempati atau hidup di wilayah pesisir atau pantai dan sumber kehidupan perekonomiannya sangat bergantung secara langsung pada pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir melalui kegiatan penangkapan dan budidaya. Masyarakat pesisir merupakan masyarakat yang memiliki karakteristik yang cukup beragam. Pada umumnya karakteristik masyarakat pesisir adalah terbuka, lugas, dan sederhana.

Secara sosial budaya dijelaskan bahwa masyarakat pesisir tersebut memiliki ciri-ciri yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Adapun ciri-ciri masyarakat pesisir adalah sebagai berikut (Dirjen Kebudayaan Depdikbud , 1997).

1. Terdapat interaksi sosial yang intensif antara warga masyarakat, yang ditandai dengan efektifnya komunikasi tatap muka sehingga terjadi hubungan yang sangat erat antara satu dan lainnya. Hal tersebut membangun hubungan kekeluargaan yang berdasarkan atas simpati dan bukan berdasarkan kepada pertimbangan rasional yang berorientasi kepada untung dan rugi;
2. Dalam mencari nafkah mereka menonjolkan sifat gotong royong dan saling membantu. Hal tersebut ditandai dengan mekanisme menangkap ikan baik dalam cara penangkapan maupun dalam penentuan daerah operasi.

Kusnadi (2009) menyatakan bahwa masyarakat pesisir diklasifikasikan menjadi:

1. Pemanfaatan langsung sumber daya lingkungan, seperti nelayan, pembudi daya ikan pesisir (menggunakan jaring apung dan keramba), petani rumput laut/mutiara, dan pembudi daya ikan.
2. Pengolah ikan atau hasil laut lainnya, seperti: pengolah perikanan, pengering ikan, ikan asin, ikan asap, produsen terasi, kerupuk ikan, bakso ikan, tepung ikan, sutra ikan, dan lain-lain.
3. Penunjang kegiatan perikanan seperti pemilik toko atau warung, pemilik bengkel (mekanik dan tukang las), supir truk, supir perahu dan kuli angkut mentah (manol).

Dalam konteks masyarakat pesisir, masyarakat desa terpencil (masyarakat pulau-pulau kecil) dan masyarakat desa pesisir dapat mewakili masyarakat kecil. Menurut Redfield (1941) dalam Koentjaraningrat (1990) komunitas masyarakat pesisir tersebut memiliki beberapa ciri, yaitu:

1. Mempunyai identitas yang menjadi ciri masyarakat tersebut.

2. Jumlah penduduk yang cukup terbatas (*smallness*) sehingga masih saling mengenal bahkan akrab sebagai individu yang berkepribadian.
3. Bersifat homogen atau keseragaman dengan diferensiasi yang terbatas (*homogeneity*).
4. Dalam pemenuhan kebutuhan hidup penduduknya sangat terbatas sehingga tidak terlalu bergantung pada pasaran luar.

1. Masyarakat Pesisir Lampung

Provinsi Lampung merupakan pintu gerbang Pulau Sumatera dan penghubung dengan Pulau Jawa. Lampung memiliki kawasan pesisir laut yang luas, tersebar di 7 (tujuh) wilayah kabupaten/kota. Wilayah-wilayah pesisir membutuhkan rencana pembangunan terintegrasi lintas sektor, administrasi hulu dan hilir termasuk kawasan pesisir. Kebutuhan ini tercermin pada adanya Perda Prov. Lampung No. 1/2018, yang mengatur keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir. Provinsi Lampung memiliki garis pantai sepanjang 1105 kilometer yang merupakan terpanjang kedua di Pulau Sumatera setelah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, juga mempunyai potensi sumberdaya alam yang luar biasa, antara lain: perikanan, ekosistem pesisir dan laut (mangrove, lamun, terumbu karang dan pulau-pulau kecil), rumput laut dan pariwisata, serta potensi kelautan lainnya.

Masyarakat Lampung yang tinggal di wilayah pesisir seperti di Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Tanggamus, dan Kabupaten Pesawaran umumnya memiliki matapencaharian sebagai nelayan. Perekonomian mereka sangat bergantung pada keberlanjutan sumberdaya alam pesisir.

Hasil laut menjadi sumber penghidupan utama masyarakat pesisir yang hanya bergantung atau dapat bergantung pada hasil laut. Sehingga dapat dikatakan bahwa penangkapan ikan merupakan tulang punggung perekonomian masyarakat wilayah pesisir. Adanya ketidakpastian yang tinggi saat penangkapan ikan sudah menjadi persepsi umum mengenai perikanan, terutama bagi masyarakat di wilayah pesisir. Saat ini kehidupan sosial di wilayah pesisir

berangsur-angsur berubah. Pekerjaan pesisir juga mencakup nelayan. Nelayan memanfaatkan laut untuk mendapatkan uang untuk kehidupan sehari-hari. Hasil penangkapan ikan bisa dijual di pasar untuk mendapatkan keuntungan. Namun, jika air laut naik dan nelayan tidak bisa melaut, maka mereka bisa mengalami kerugian.

2. Karakteristik Masyarakat Pesisir

Pada umumnya masyarakat yang hidup di daerah pinggir pantai biasa disebut sebagai masyarakat pesisir. Masyarakat pesisir adalah sekumpulan individu atau kelompok yang menempati atau hidup di wilayah pesisir atau pantai dan sumber kehidupan perekonomiannya sangat bergantung secara langsung pada pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir melalui kegiatan penangkapan dan budidaya hasil laut seperti ikan, udang, rumput laut, lobster dan masih banyak lagi. Masyarakat pesisir merupakan masyarakat yang memiliki karakteristik yang cukup beragam. Sebagai masyarakat yang hidup dekat dengan wilayah perairan maka mata pencaharian mereka pada umumnya adalah nelayan. Menurut (Idrus Ruslan, 2013) umumnya karakteristik masyarakat pesisir adalah terbuka, lugas, keras dan egaliter.

Masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan dengan masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir memiliki karakteristik sosial dan ekonomi yang berbeda. Hal ini dikarenakan berkaitan dengan sumber perekonomian dari dua wilayah ini juga berbeda. Demikian pula untuk jenis sumber pendapatannya, masyarakat di wilayah pesisir lebih banyak memanfaatkan sumber daya alam atau jasa-jasa yang ada di lingkungan sekitar mereka tinggal. Masyarakat pesisir umumnya hidup berada di garis kemiskinan juga memiliki tingkat pendidikan yang rendah, sehingga hal ini menjadi faktor yang membuat mereka tidak mengetahui dan menyadari akan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan (Annet, 2014).

Masyarakat dikawasan pesisir Indonesia sebagian besar berprofesi sebagai nelayan yang diperoleh secara turun-temurun dari nenek moyang mereka. Selain itu, masyarakat yang hidup di wilayah pesisir memiliki mata pencaharian seperti, nelayan, petambak, pembudidaya ikan dan pemilik atau pekerja industri

maritim. Karakteristik masyarakat nelayan terbentuk mengikuti sifat dinamis sumberdaya yang digarapnya, sehingga untuk mendapatkan hasil tangkapan yang maksimal, nelayan harus berpindah-pindah. Selain itu, resiko usaha yang tinggi menyebabkan masyarakat nelayan hidup dalam suasana alam yang keras yang selalu diliputi ketidakpastian dalam menjalankan usahanya (Sebenan dalam Wasak, 2007).

Selain itu, karakteristik lain dari masyarakat pesisir pada umumnya adalah masih banyak yang menganut sistem kekerabatan patriarki. Sistem tersebut kemudian berpengaruh pada budaya dan pandangan masyarakat mengenai peran perempuan. Perempuan pesisir (istri nelayan) memiliki peran yang penting dalam menciptakan kesejahteraan sosial keluarga nelayan. Istri nelayan berkontribusi besar dalam pendidikan, kesehatan, agama, dan keharmonisan keluarga. Kesejahteraan sosial dalam rumah tangga merupakan suatu usaha untuk mencapai suatu keadaan dimana terpenuhinya kebutuhan dasar sosial seperti pendidikan, kesehatan, agama, dan keharmonisan dalam rumah tangga. Sehingga banak perempuan masyarakat pesisir ikut memberikan kontribusi pada keluarga dengan berbagai cara dalam mengadakan kebutuhan dasar sosial keluarga atau rumah tangga (Kamalia, Iffah, dan Handayani, 2021).

Karakteristik masyarakat pesisir berbeda dengan masyarakat agraris. Hal ini dikarenakan karakteristik sumber daya yang dihadapinya berbeda. Masyarakat agraris yang direpresentasikan oleh petani menghadapi sumber daya yang terkontrol, yaitu mengelola lahan untuk produksi suatu komoditas dengan hasil yang relatif dapat diprediksi. Sifat produksi yang demikian memungkinkan tetapnya lokasi produksi dan memungkinkan resiko yang dialami tidak besar. Karakteristik tersebut berbeda dengan nelayan. Nelayan memiliki sifat sumber daya yang terbuka. Karakteristik yang demikian membuat nelayan harus berpindah-pindah untuk mendapatkan hasil yang maksimal sehingga mempunyai elemen resiko yang tinggi. Kondisi sumber daya yang demikian membuat masyarakat pesisir memiliki karakter yang keras, tegas dan terbuka (Satria, 2014).

Karakteristik yang diamati dalam penelitian ini yaitu: umur, lama tinggal di desa, pendidikan terakhir, pendapatan, jumlah anggota rumah tangga, keikutsertaan lembaga tertentu dan ikut pendampingan/pelatihan/dan lainnya di dalam lingkungan lokasi penelitian yaitu Kecamatan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur. Karakteristik yang dimiliki responden dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Umur

Umur diartikan dengan lamanya keberadaan seseorang diukur dalam satuan waktu di pandang dari segi kronologis, individu normal yang memperhatikan derajat perkembangan anatomis dan fisiologik sama (Nuswantari, 1995). Umur juga dapat diartikan lama waktu hidup atau ada (sejak dilahirkan atau diadakan) (Hoetomo, 2005). Tingkat kematangan umur seseorang akan mempengaruhi pola pikir dan perilaku individu menjalankan hidupnya. Umur yang tergolong produktif dapat mempengaruhi tingkat kemauan, semangat, tanggung jawab dan kualitas kemampuan tinggi yang dimiliki seseorang (Listiana et al., 2018). Menurut World Health Organization (WHO) tahun 2020 yaitu :

1. Bayi (*infants*) : 0-1 tahun
2. Anak-anak (*children*) : 2-10 tahun
3. Remaja (*adolescents*) : 11-19 tahun
4. Dewasa (*adult*) : 20-60 tahun
5. Lanjut usia (*elderly*) : di atas 60 tahun.

Tabel 3. 1. Sebaran responden berdasarkan kelompok umur

Klasifikasi tingkat umur	Interval kelas (tahun)	Seluruh Reponden	
		Jumlah	(%)
Belum produktif	0-14	0	0
Produktif	15-64	47	94
Non-Produktif	≥ 65	3	6
Jumlah		50	100
Rata-rata	44	Produktif	

Sumber : Data diolah

Tabel 3.1 menunjukkan bahwa sebaran responden berdasarkan umur didominasi pada golongan dewasa (15-64 tahun) sebanyak 47 responden (94%) dengan rata-rata 44 tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa umur responden termasuk ke dalam usia produktif dengan kategori setengah baya dan golongan produktif. Rentan umur ini adalah rentan umur yang baik untuk melaksanakan proses kegiatan dalam meningkatkan produktif, salah satunya adalah memanfaatkan dan menguasai teknologi informasi serta mendapatkan kapasitas diri dalam mengembangkan ekowisata terkhusus ekowisata mangrove.

2. Lama Tinggal di Desa

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang berada di wilayah perdesaan. Desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui oleh pemerintah pusat. Desa juga merupakan bagian atau tempat wilayah kependudukan yang artinya penduduk atau masyarakat memanfaatkan desa tempat tinggal mereka. Lama tinggal di desa adalah salah satu frekuensi jarak keberadaan individu di desa tersebut sudah berapa lama dari awal tinggal di desa hingga sampai waktu penelitian ini berlangsung (Hadi Suroso, Abdul Hakim, 2020).

Tabel 3. 2. Sebaran lama tinggal responden di desa

Klasifikasi lama tinggal di desa	Interval kelas (tahun)	Seluruh Reponden	
		Jumlah(orang)	(%)
Lama	8-26	20	46
Sedang	27-45	17	40
Sangat Lama	46-62	13	14
Jumlah		50	100
Rata-rata	18 (Tahun)	Baru	

Sumber : Data diolah

Tabel 3.2 menunjukkan bahwa, responden tinggal di desa tersebut memang berkategori lama tinggal di desa selama 18 tahun, ini merupakan waktu yang bisa terbilang rata-rata lama. Waktu tersebut menunjukkan juga bahwa lama tempat tinggal di desa terlama adalah 62 tahun dan terbaru adalah hanya 8 tahun.

3. Pendidikan Terakhir

Pendidikan adalah proses seseorang dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam menentukan keputusan dan pola pikir (Adhanari, 2005). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, tingkat pendidikan meliputi jenjang usia dini sampai dengan perguruan tinggi. Pendidikan formal merupakan jalur pendidikan yang diperoleh secara teratur, sistematis, berjenjang, dan dengan mengikuti syarat-syarat yang jelas. Berdasarkan kurun waktu yang telah dilalui oleh responden dalam menamatkan sampai jenjang sekolah dasar (SD) yaitu 6 tahun, jenjang sekolah menengah pertama (SMP) yaitu 9 tahun, jenjang sekolah menengah akhir (SMA) adalah 12 tahun, dan responden yang menyelesaikan hingga pendidikan perguruan tinggi lebih dari 12 tahun. Sebaran responden berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3. 3. Tempat Tinggal Responden

Klasifikasi Tingkat Pendidikan	Responden	
	Jumlah (Org)	Persentase (%)
Dasar (SD)	16	32
Menengah (SMP)	13	26
Akhir (SMA)	21	42
Jumlah	50	100

Sumber : Data diolah

Tabel 3.3 menjelaskan bahwa, sebagian besar responden memiliki pendidikan pada tingkat akhir (SMA). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden sudah memiliki pengalaman dalam mengenyam pendidikan formal, sehingga

responden sudah cukup mampu dalam mendapatkan informasi. Pengambilan keputusan dari responden juga berpengaruh berdasarkan tingkat pengetahuan yang diraih responden melalui pendidikan yang telah ditempuh terutama pada pekerjaan di sektor pertanian atau non pertanian.

4. Pendapatan Rumah Tangga Responden

Pengertian pendapatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan definisi pendapatan secara umum. Pada perkembangannya, pengertian pendapatan memiliki penafsiran yang berbeda-beda tergantung dari latar belakang disiplin ilmu yang digunakan untuk menyusun konsep pendapatan bagi pihak-pihak tertentu. Pendapatan didefinisikan sebagai suatu penghasilan yang diterima karena adanya aktivitas, usaha, dan pekerjaan (Abdul Hakim, 2018).

Tabel 3. 4. Sebaran responden berdasarkan pendapatan rumah tangga

Klasifikasi Pendapatan	Interval kelas (Rp/bulan)	Seluruh Reponden	
		Jumlah	(%)
Rendah	0-12.466.667,00	49	98
Sedang	12.466.668,00-24.933.334,00	0	0
Tinggi	24.933.335,00-37.400.000,00	1	2
Jumlah		50	100
Rata-rata	Rp. 2.865.300,00	Baru	

Sumber : Data diolah

Tabel 3.4 menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan responden masuk ke dalam kategori rendah, yaitu berkisar antara (0-12.466.667,00) sebanyak 49 responden, dengan rata-rata pendapatan adalah Rp2.865.300,00. Pendapatan rendah ini tentu disebabkan kurangnya penyediaan dan pemanfaatan potensi alam yang ada di sekitar masyarakat, faktor lainnya juga kurang adanya pekerjaan sampingan yang dilakukan responden. Pendapatan ini

beberapa responden hanya mendapatkan pendapatan dari kegiatan pertanian saja. Pendapatan dalam tabel di atas merupakan jumlah dari keseluruhan pendapatan responden baik dari kegiatan usahatani dan non-usahatani.

5. Jumlah Anggota Rumah Tangga

Menurut Badan Pusat Statistik (2023) anggota rumah tangga adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga (suami/istri, anak, menantu, cucu, orang tua/mertua, famili lain, pembantu rumah tangga atau anggota rumah tangga lainnya), baik yang berada di rumah tangga responden maupun sementara tidak ada pada waktu pencacahan. Orang yang telah tinggal di rumah tangga responden 6 bulan atau lebih atau yang telah tinggal kurang dari 6 bulan tetapi berniat pindah/bertempat tinggal di rumah tangga tersebut 6 bulan atau lebih dianggap sebagai anggota rumah tangga. Pembantu rumah tangga atau sopir yang hanya makan atau tinggal saja di rumah majikannya dianggap bukan anggota rumah tangga majikannya.

Tabel 3. 5. Sebaran responden berdasarkan jumlah anggota rumah tangga

Klasifikasi jumlah anggota RT	Interval kelas (orang)	Seluruh Reponden	
		Jumlah	(%)
Sedikit	1-4	29	60
Sedang	5-8	19	36
Banyak	9-11	2	4
Jumlah		50	100
Rata-rata	4	Sedikit	

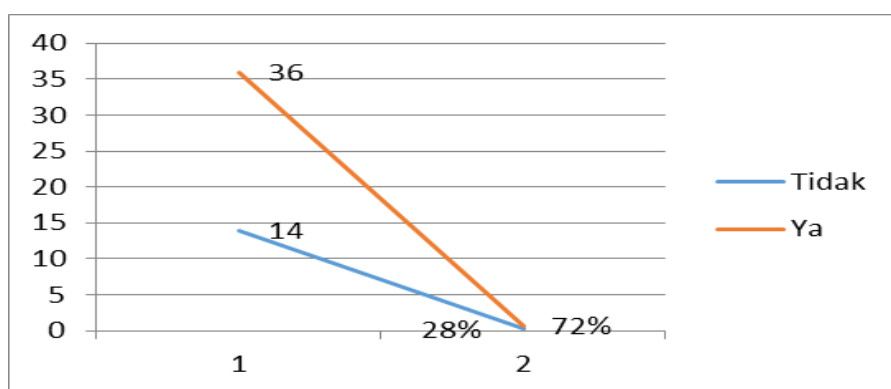
Sumber : Data diolah

Tabel 3.5 menunjukkan bahwa rata-rata jumlah penduduk adalah dua yaitu sejumlah 29 responden. Jumlah anggota rumah tangga ini adalah pihak-pihak yang berada di dalam satu lingkup (rumah) yang pihak tersebut merupakan seorang pekerja bahkan non-pekerja. Anggota keluarga yang tidak bekerja tersebut

diindikasikan merupakan anak dari orangtua yang berada di dalam keluarga tersebut, yang artinya merupakan usia belum produktif.

6. Keikutsertaan Responden dengan Lembaga Tertentu

Keikutsertaan terhadap suatu hal biasa disebut dengan istilah partisipasi. Pengertian dari partisipasi tersebut adalah keterlibatan aktif dari seseorang, atau sekelompok orang (masyarakat) secara sadar untuk berkontribusi secara sukarela dalam program pembangunan dan terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai pada tahap evaluasi di dalam kegiatan tertentu, dalam hal ini adalah kegiatan yang ada di dalam lingkup kelembagaan (Normina, 2016). Responden dalam penelitian ini memiliki beberapa keikutsertaan dalam lembaga, dan beberapa responden dalam penelitian ini juga tidak mengikuti lembaga tertentu. Lembaga memiliki pengertian tersendiri yaitu tempat berlangsungnya proses pembelajaran atau pengubah pola pikir yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar tempat tersebut (Bafadhol, 2017). Gambar 3.1 diagram di bawah menunjukkan persentase perbandingan responden yang berpartisipasi dengan lembaga tertentu dan tidak berpartisipasi dalam kegiatan lembaga.

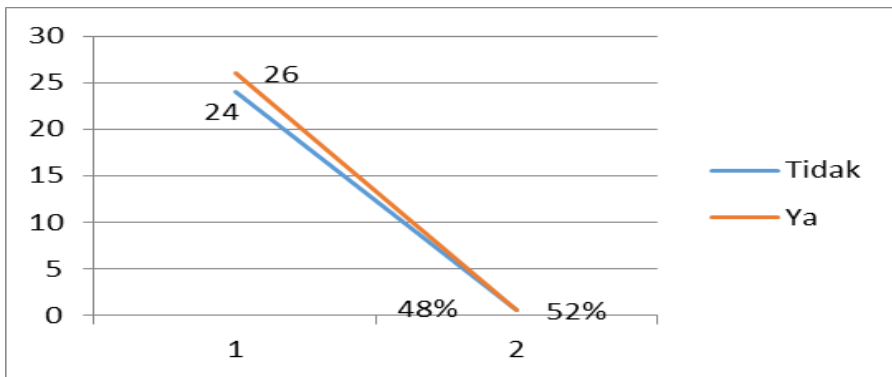


Gambar 3.1. Keikutsertaan Responden Ke Lembaga Tertentu

Gambar 3.1 menunjukkan bahwa rata-rata responden sudah tergabung dan ikut serta di dalam suatu kelembagaan yaitu sebanyak 36 responden dengan persentase sebesar 72 persen. Rata-rata keikutsertaan responden adalah ke lembaga seperti Pokdarwis, Karang Taruna, anggota PKK, Kelompok Tani Hutan, KUB, Nelayan, dan Pamong Desa.

7. Keikutsertaan Masyarakat dengan Kegiatan Pendampingan

Pendampingan atau lebih dikenal dengan istilah *Mentorship*. *Mentorship* berakar kata dari Mentor dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki makna pembimbing atau pengasuh. Pendampingan adalah pemberdayaan masyarakat dengan menempatkan tenaga pendamping yang berperan sebagai fasilitator, komunikator dan dinamisator (Adriyani et al., 2020). Keikutsertaan responden dengan kegiatan pendampingan atau pemberdayaan masyarakat dapat dilihat perbandingannya pada Gambar 3.2 berikut.



Gambar 3. 2. Keikutsertaan Responden dengan Kegiatan Pendampingan

Gambar 3.2 menunjukkan bahwa hampir tidak ada perbedaan antara masyarakat yang ikut pendampingan dan tidak ikut pendampingan. Karena rentang responden hanya sebesar dua responden saja, yaitu 24 responden sebesar 48% tidak ikut, dan 26 responden sebesar 52% yang ikut dalam kegiatan pendampingan yang ada. Beberapa kegiatan pendampingan diantaranya adalah: pengelolaan rajungan, penanaman mangrove, pengawasan

perikanan, sosialisasi peraturan desa, kegiatan penyuluhan-penyuluhan, pengelolaan Teh Jeruju, dan masih banyak lagi kegiatan pelatihan yang diikuti responden.

D. PENUTUP

Karakteristik masyarakat sangat beragam dari satu komunitas ke komunitas lainnya, oleh karena itu penting untuk melakukan studi dan analisis yang cermat untuk memahami konteks lokal sebelum merancang dan melaksanakan program pemberdayaan yang efektif dan berkelanjutan. Gambaran karakteristik masyarakat pesisiri di Desa Margasari, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur dapat diidentifikasi berdasarkan umur, jumlah anggota rumah tangga, lama tinggal di desa, pendidikan, pendapatan, keikutsertaan dalam lembaga desa dan program-program pendampingan.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim. (2018). Pengaruh Biaya Produksi Terhadap Pendapatan Petani Mandiri Kelapa Sawit Di Kecamatan Segah. *Jurnal Ekonomi STIEP*, 3(2), 31-38. <https://doi.org/10.54526/jes.v3i2.8>
- Adhanari. (2005). *Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Produktivitas Kerja Karyawan bagian Produksi pada Maharani Handcraft di Kabupaten Bantul*. Universitas Negeri Semarang.
- Adriyani, R., Erna, E., Siswanto, A., & Indrianto, R. (2020). Pendampingan Kelompok Usaha Kerupuk Rajungan Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat Di Kawasan Pesisir Pantai Utara Cirebon. *Dimasejati: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 94. <https://doi.org/10.24235/dimasejati.v2i1.6653>
- Annet, N. (2014). Evaluasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Melalui Pemberian Kapal Ikan Beserta Alat Tangkap di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 14(4), 73-79

- Badan Pusat Statistik. (2023). *Sosial dan Kependudukan*.
<https://www.bps.go.id/subject/5/konsumsi-dan-pengeluaran.html>
- Bafadhol, I. (2017). Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia. *Jurnal Edukasi Islami Jurnal Pendidikan Islam*, 06(11), hlm 60.
<http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/ei/article/view/95>
- Dirjen Kebudayaan Depdikbud. 1997. *Budaya Kerja Nelayan Indonesia di Jawa Timur*. Jakarta: CV Bupara Nugraha.
- Effendy, L., Billah, T., & Pratama, G. (2020). Preferensi Petani Dalam Penggunaan Teknologi Jajar Legowo Pada Padi Sawah Di Kecamatan Cikedung. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(3), 347–360.
<https://doi.org/10.47492/jip.v1i3.81>
- Febryano, I. G. 2014. *Politik Ekologi Pengelolaan Mangrove Di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung*.
- Hadi Suroso, Abdul Hakim, I. N. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Gresik, Perencanaan Pembangunan Di Desa Banjaran Kecamatan Driyorejo Kabupaten. *WACANA, Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 17(1), 7–15. <http://www.wacana.ub.ac.id/index.php/wacana/article/view/290>
- Hastuti. 2012. *Wilayah pesisir dan fenomena-fenomena yang terjadi di pantai*. Universitas Hassanudin. Makassar.
- Hoetomo, M. A. (2005). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Mitra pelajar.
- Kamalia, I., Handayani, W., & Pi, S. 2021. Peran Perempuan Pesisir dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Keluarga Nelayan di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, Madura (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Karubaba, C. T., Bengen, D. G., & Nikijuluw, V. P. 2001. Kajian Pemenuhan Kebutuhan Pangan Nelayan pada Musim Timur dan Musim Barat Kaitannya dengan Pemanfaatan Sumberdaya Pesisir-study of needs assessment of fishermen food on two monsoon seasons in relation with coastal resource uses. *Indones J Coast Mar Resour*, 3(3), 1-11.

- Ketchum, B.W. (Ed). 1973. *Water's Edge: Critical Problems of The Coastal Zone*. MT.Press, Massachusetts.
- Koentjaraningrat. 1990. *Metode-metode Antropologi dalam Penyelidikan Masyarakat dan Kebudayaan Indonesia*. UI Press. Jakarta.
- Kusnadi. 2009. *Nelayan: Strategi Adaptasi Dan Jaringan Sosial*. Humaniora Utama Press. Bandung.
- Listiana, I., Sumardjo, S., Sadono, D., & Tjiptopranoto, P. (2018). Hubungan Kapasitas Penyuluh dengan Kepuasan Petani dalam Kegiatan Penyuluhan. *Jurnal Penyuluhan*, 14(2). <https://doi.org/10.25015/penyuluhan.v14i2.18673>
- Mandang, M., Sondakh, M. F. L., & Laoh, O. E. H. (2020). *Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik petani berlahan sempit di Desa Tolok Kecamatan Tompasso . Penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus sampai September 2019 . Pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara sengaja dengan jumlah*. 16, 105–114.
- Normina. (2016). *Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. 14(26), 71–85.
- Nuswantari. (1995). Kamus Kedokteran Dorland Edisi 25. EGC. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 3(3), 301–308.
- Maryono, Y dan B. P. Istiana. 2008. *Teknologi Informasi dan Komunikasi*. Yudistira. Jakarta.
- Rohmin Dahuri. 2003. *Paradigma Baru Pembangunan Indonesia Berbasis Kelautan, Orasi Ilmiah*. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Ruslan, Idrus. 2013. *Religiositas Masyarakat Pesisir: Studi atas Tradisi Sedekah Laut masyarakat Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) IAIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung*.
- Satria, Arif. 2015. *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*. Pustaka Obor Indonesia. . Jakarta.

- Sebenan, R.D. 2007. Strategi pemberdayaan rumahtangga nelayan di Desa Gangga II Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Soekanto, dan Soerjono. 1983. Beberapa Teori Tentang Struktur Masyarakat. Jakarta: Raja Grafindo.
- Soetomo. 2009. *Pembangunan Masyarakat*. Pustaka Belajar. Yogyakarta.
- Usman. 1994. *Beberapa Anggapan Dasar Mengenai Kebudayaan Dalam Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*. Pustaka Jaya. Jakarta.
- Whardhani. 1994. *Diagnosis Kesulitan Belajar dan Perbaikan Belajar*. Ditjen Bimbaga Islan dan Universitas Terbuka. Jakarta.

BAB 4

HASIL TANGKAPAN LAUT DAN OLAHAN SEBAGAI POTENSI DESA UNTUK PENGEMBANGAN EKOWISATA

Oleh :

Prof. Dr. Ir. Kordiyana K Rangga, M.S.

Tyas Sekartiara Syafani, S.P.,M.Si.

A. PENDAHULUAN

Masyarakat di Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur adalah masyarakat yang ada di daerah pesisir, yang mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai nelayan karena berada di dekat laut. Di Desa Margasari terdapat berbagai jenis ikan yang awalnya hanya dimanfaatkan sebagai makanan sehari-hari bagi masyarakat dan air laut yang pemanfaatannya belum maksimal dengan potensi produk turunan dari bahan baku air laut, dengan potensi sumber daya alam yang besar dan melimpah, maka sangat penting untuk memaksimalkan potensi yang ada untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di antaranya dengan mengelola sumber daya alam yang berupa ikan laut menjadi olahan kerupuk otak-otak dan memanfaatkan air laut yang dikelola menjadi garam untuk di produksi sehingga kedua produk tersebut bisa menjadi produk unggulan masyarakat Desa Margasari.

Salah satu permasalahan pada masyarakat Desa Margasari ialah minimnya pengetahuan dan bagaimana melihat peluang sumber daya yang ada belum maksimal. Sehingga perlu untuk menumbuhkan sumber pendapatan ekonomi serta jiwa kewirausahaan dengan kemampuan dan pengetahuan untuk mengelola potensi alam di desanya menjadi peluang usaha, dengan cara-cara sederhana masyarakat sudah bisa menghasilkan produk olahan yang berbahan baku dari sumber alam di sekitar desa. Pemberian wawasan dan pengetahuan dalam melihat potensi yang ada di desa Margasari kepada masyarakat dan nantinya masyarakat mampu memaksimalkan sumber alam yang ada, dan kemudian masyarakat mampu memproduksi menjadi produk unggulan dengan ciri khas daerah kepulauan yang sumber daya alam berupa penghasil ikan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur dengan pertimbangan kabupaten tersebut sebagian besar merupakan daerah yang terletak di pesisir pantai dan dikelilingi oleh perbukitan serta dataran rendah. Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, nelayan, atau bekerja di sektor perdagangan dan jasa. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei- September 2023 untuk pengumpulan data kuantitatif, kualitatif, dan pengamatan intensif di lapangan. Metode penelitian yang digunakan adalah survei. Penelitian menggunakan desain kuantitatif lebih utama dan desain kualitatif (*indepth interview*, *focus group discusion* [FGD] dan observasi) untuk memperkaya pembahasan.

C. PEMBAHASAN

Pemanfaatan hasil tangkapan laut dan olahan sebagai potensi desa untuk pengembangan ekowisata dapat memberikan dampak positif baik bagi ekonomi lokal maupun keberlanjutan lingkungan. Beberapa manfaat dari pengembangan ekowisata berbasis hasil tangkapan laut dan olahan di desa, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Diversifikasi Ekonomi

Pengembangan ekowisata berbasis hasil tangkapan laut dan olahan dapat menjadi sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat desa. Wisatawan dapat menikmati pengalaman langsung dalam melibatkan diri dalam aktivitas nelayan, belajar tentang proses pengolahan hasil tangkapan laut, dan membeli produk olahan laut lokal.

2. Pendidikan dan Peningkatan Kesadaran Lingkungan

Ekowisata memberikan kesempatan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dan wisatawan terkait pentingnya menjaga keberlanjutan ekosistem laut. Ini dapat mencakup edukasi tentang praktik penangkapan ikan yang berkelanjutan, pengelolaan sumber daya laut, dan dampak positif dari keberlanjutan lingkungan.

3. Konservasi dan Pelestarian

Pengembangan ekowisata dapat menciptakan insentif ekonomi untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut. Melalui pendekatan berkelanjutan, desa dapat mempromosikan praktek-praktek penangkapan ikan yang bertanggung jawab dan melibatkan masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan.

4. Pengembangan Infrastruktur Pariwisata

Peningkatan ekowisata umumnya memerlukan pengembangan infrastruktur seperti pelabuhan, tempat penyimpanan hasil tangkapan laut, restoran, dan tempat pengolahan ikan. Hal ini dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat melalui peningkatan peluang kerja dan pendapatan.

5. Pemberdayaan Perempuan

Wanita seringkali terlibat dalam proses pengolahan hasil tangkapan laut. Pengembangan ekowisata dapat memberikan kesempatan lebih besar bagi perempuan di desa untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi dan mendukung pemberdayaan perempuan.

6. Pengenalan Budaya Lokal

Ekowisata juga dapat mempromosikan kekayaan budaya lokal, seperti tradisi nelayan, kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya laut, dan kerajinan tradisional terkait hasil tangkapan laut.

Hasil tangkapan laut adalah semua jenis ikan, kerang, cumi-cumi, udang, dan organisme laut lainnya yang ditangkap dari laut oleh nelayan. Hasil tangkapan laut ini kemudian dapat diolah menjadi berbagai produk, termasuk ikan asin, dalam skala usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hasil tangkapan laut dapat diperoleh melalui berbagai metode penangkapan, seperti penangkapan dengan jaring, pancing, trawl, dan perangkap, tergantung pada jenis ikan yang ditargetkan serta lokasi penangkapan. Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai merupakan salah satu daerah di Lampung Timur yang menjadi tempat bagi para pelaku agroindustri dalam melakukan pengolahan ikan menjadi ikan asin. Kondisi Umum Agroindustri Ikan Asin di Kecamatan Labuhan Maringgai merupakan olahan yang berbahan baku ikan dengan ukuran yang kecil sampai sedang. Ikan asin memiliki banyak jenis yang sering dijumpai di pasar pasar tradisional salah satunya adalah ikan asin petek, belahan, teri jengki, teri rebus, dan lain lain. Pengolahan bahan baku ikan asin sampai menjadi ikan asin siap jual yang ada di Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai biasanya memakan waktu yang tidak lama sekitar waktu 2 sampai 3 hari.

Proses pembuatan ikan asin dimulai dari agroindustri membeli ikan dari pemasok di Kecamatan Labuhan Maringgai, dan setelah bahan baku terpenuhi maka para pelaku agroindustri melakukan perebusan dan penggaraman bahan baku ikan tersebut, perebusan dan penggaraman ini dilakukan selama kurang lebih 10-15 menit, hal ini bertujuan untuk memberikan rasa asin pada daging ikan yang akan dibuat ikan asin dan proses ini juga merupakan salah satu proses yang menjadikan ikan asin dapat bertahan selama berbulan bulan lamanya. Penggaraman sendiri menggunakan garam karungan, harga satu karung garam dengan berat 50 kilogram sebesar Rp60.000,00, untuk perbandingan penggunaan garam dalam proses produksi ikan asin adalah satu karung garam dengan berat 50

kilogram berbanding dengan satu kwintal ikan, setelah melalui proses penggaraman dan perebusan ini ikan tersebut akan melalui proses penjemuran, proses penjemuran ini bertujuan untuk mengeringkan ikan asin hasil perebusan dan penggaraman, dalam kondisi cuaca baik pengeringan ini memerlukan waktu 6 sampai 7 jam, tetapi ketika sedang cuaca yang kurang baik diperlukan waktu sampai dengan 2-3 hari.

Ikan dari proses penjemuran akan melalui proses penyortiran sesuai dengan kualitas dari ikan asin itu, setelah semua proses dilakukan maka tahapan proses yang terakhir adalah ikan asin dikemas untuk siap dipasarkan kepada para agen ikan asin. Proses-proses pengolahan ikan asin yang dilakukan oleh agroindustri yang ada di Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai tergolong masih dilakukan dengan cara yang sederhana. Umumnya para agroindustri di Kecamatan Labuhan Maringgai memiliki suatu lahan yang cukup luas, untuk melakukan proses penjemuran, proses penjemuran dilakukan di lahan tersebut dengan mengandalkan sinar matahari untuk mengeringkan ikan asin. Wadah yang digunakan untuk menjemur adalah bahan warinet dan biasanya berwarna hijau yang dibingkai dengan bambu biasanya lebar dari alat penjemuran ini berukuran 1,5 meter dengan panjang 3-4 meter. Proses penjemuran ikan asin tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.1 berikut.



Sumber: Dokumentasi pribadi

Gambar 4. 1. Proses penjemuran ikan asin

Tungku untuk melakukan proses perebusan juga masih menggunakan bahan kayu bakar yang diletakkan ke dalam tungku yang terbuat dari batu bata dan semen. Bahan bakar utama dalam pembakaran ini adalah kayu bakar yang biasanya para pemilik agroindustri membeli kayu bakar sebanyak 1 mobil Pickup yang diharganya mulai dari Rp450.000,00-Rp600.000,00 ribu per mobil pick up nya, selain menggunakan kendaraan Pickup, pemesanan kayu bakar ini juga menggunakan kendaraan roda tiga, harga untuk sekali angkutan sekitar Rp300.000,00-Rp500.000,00. Untuk satu kali pengiriman kayu bakar dapat digunakan selama 3-4 kali produksi, tergantung dari banyaknya ikan yang diolah oleh para agroindustri di Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai. Tenaga kerja yang digunakan untuk satu kali proses produksi agroindustri ikan asin ini sekitar 5-7 orang, dalam kegiatan perebusan, penggaraman, penjemuran penyortiran dan pengemasan.

Pemasaran agroindustri ikan asin di Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai adalah dengan memasarkan ke para agen ikan asin yang berasal dari daerah Lampung Timur dan sekitarnya. Distribusi barang yang dilakukan oleh agen ikan asin tersebut yang dijual oleh para pedagang yang ada dipasar-pasar tradisional. Pedagang yang ada dipasar biasanya menjual banyak jenis dari ikan asin seperti ikan teri, ikan belahan, cumi kering, ikan asin sampah, ikan petek, ikan ilatan, rebon dan masih banyak lagi. Selanjutnya pedagang yang ada di pasar menjual produk ikan asin tersebut kepada pedagang yang ada di desa desa atau warung sembako, dengan cara membuka kios atau lapak di pasar, pedagang desa atau warung akan datang ke pasar untuk membeli ikan asin dari pasar yang selanjutnya akan dijual kembali di warung masing masing, yang kemudian para konsumen penikmat ikan asin ini membeli dari pedagang warung sembako dengan harga Rp6.000,00-Rp9.000,00 per satu ons ikan asin. Jadi, agroindustri tidak melayani pembelian secara eceran untuk pedagang di sekitar agroindustri, yang ingin membeli bisa dalam jumlah 2-3 kardus ikan asin isi 10 kg. Ikan asin ini biasanya dimanfaatkan masyarakat sebagai makanan lauk dan menjadi makanan yang sudah sangat dikenal dan disukai masyarakat (Anwar, 2022).

Berdasarkan uraian sebelumnya, diketahui bahwa masyarakat Desa Margasari belum memanfaatkan hasil tangkapannya untuk diolah lebih lanjut, padahal olahan ikan banyak diminati masyarakat karena rasanya yang enak, murah, dan memiliki nilai gizi. Produk olahan ikan yang paling banyak diolah masyarakat adalah dijadikan ikan asin atau hanya dikeringkan saja. Sementara itu, sekarang ini banyak sekali inovasi olahan ikan yang beragam jenisnya yang tak sedikit pula peminatnya. Beberapa jenis olahan tersebut adalah kerupuk ikan, bakso ikan, nugget ikan, sate ikan, siomay ikan, otak-otak dan masih banyak lagi. Melihat masih banyaknya jenis olahan ikan yang belum dicoba oleh masyarakat Desa Margasari, sehingga sangat memungkinkan untuk dijadikan peluang usaha baru. Beberapa jenis produk olahan ikan di atas dapat dijadikan makanan awetan atau biasa disebut *frozen food* yang berpotensi untuk dijadikan bisnis dengan bahan baku utama dari sumber daya di sekitar tempat tinggal. Olahan ikan yang dijadikan *frozen food* memiliki pangsa pasar yang luas dan penjualan bisa ditemui dimana saja serta daya simpan yang cukup lama sehingga dapat menjangkau konsumen dari luar daerah dan dapat dipasarkan di *market place* atau secara online (Eka, 2022).

D. PENUTUP

Salah satu potensi ekonomi desa bagi masyarakat pesisir adalah hasil tangkapan laut. Hasil tangkapan laut adalah semua jenis ikan, kerang, cumi-cumi, udang, dan organisme laut lainnya yang ditangkap dari laut oleh nelayan. Hasil tangkapan laut ini kemudian dapat diolah menjadi berbagai produk, termasuk ikan asin, dalam skala usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Peningkatan hasil olahan tangkapan laut diperlukan untuk mengembangkan potensi ekonomi desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan nilai tambah produk. Selain itu, perlu sentuhan *mix marketing* untuk memaksimalkan penjualan dan pendapatan.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, A. M.N. 2022. Analisis Rantai Pasok Agroindustri Ikan Di Kecamatan Labuhan Maringgai Lampung Timur. *Skripsi*. Universitas Lampung. Lampung.
- Eka, N. S. (2022). Analisis Strategi Pemasaran Pedagang Frozen Food Dimasa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Frozen Food di Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Bandar Lampung) (*Doctoral dissertation*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung). Lampung.

BAB 5.

KERAJINAN HASIL LAUT SEBAGAI POTENSI DESA EKOWISATA MANGROVE

Oleh :

Prof. Dr. Ir. Kordiyana K Rangga, M.S.

Tyas Sekartiara Syafani, S.P.,M.Si.

A. PENDAHULUAN

Desa Margasari juga memiliki kekayaan alam berupa hasil laut yang melimpah. Letak wilayahnya yang dekat dengan pesisir pantai menjadikan warga desa memilih menjadi nelayan untuk menambah penghasilan dan memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kerang merupakan salah satu komoditas hasil laut yang berpotensi untuk dikembangkan. Umumnya, masyarakat mengumpulkan jenis hewan ini hanya sebatas dimanfaatkan sebagai bahan makanan.

Permintaan akan produk kerajinan hasil laut dapat berasal dari berbagai sektor, termasuk industri pariwisata, dekorasi rumah, *fashion*, dan pasar souvenir. Produk kerajinan hasil laut seperti anyaman dari bakau, kerang, atau patung kayu mangrove dapat menjadi souvenir yang populer di destinasi wisata, terutama di daerah yang memiliki ekosistem mangrove yang indah. Kerajinan ekowisata mangrove merupakan salah satu bentuk pengembangan pariwisata yang berfokus pada pelestarian lingkungan, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat setempat. Kerajinan hasil laut daerah

ekowisata merupakan salah satu bentuk kreativitas masyarakat pesisir dalam memanfaatkan hasil laut untuk menghasilkan karya seni yang bernilai ekonomis. Kerajinan ini biasanya dibuat dari bahan-bahan alami yang berasal dari laut, seperti kerang, cangkang, batu karang, dan pasir (Siti dan Intan, 2020).

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Desa Margasari, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini terdapat tahap persiapan yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menunjang kelancaran penyusunan rencana penelitian, yaitu survei lokasi untuk tempat pelaksanaan kegiatan. Tahap pelaksanaan penelitian dilakukan dengan metode diskusi partisipatif dan *Focus Group Discussion* (FGD) yang dilakukan di lapangan. Teknik ini digunakan untuk mengungkapkan pemaknaan dari suatu kelompok berdasarkan hasil diskusi yang terpusat pada suatu permasalahan tertentu. FGD juga dimaksudkan untuk menghindari pemaknaan yang salah dari seorang peneliti terhadap fokus masalah yang sedang diteliti. (Bungin, 2003). Pengumpulan data kuantitatif, kualitatif, dan pengamatan intensif atau survei lokasi telah dilakukan pada bulan Juli-Agustus 2023. Kemudian dilanjutkan dengan analisis data dan pembahasan yang selesai di bulan September 2023.

C. PEMBAHASAN

Kerajinan dari Hasil Laut Kerajinan hasil laut merupakan salah satu jenis kerajinan yang dibuat masyarakat Desa Margasari dengan aneka bentuk yang cantik dan unik. Kerajinan hasil laut dapat dibuat dari berbagai macam hasil laut kemudian dirangkai sedemikian rupa, sehingga menjadi kerajinan unik dengan nilai seni tinggi. Salah satu bahan yang bisa digunakan untuk membuat kerajinan ini adalah kerang dan karang laut yang telah terdampar di pinggir pantai.

Bahan-bahan dari laut seperti kulit kerang dapat dijadikan berbagai macam kerajinan, seperti kalung, gelang, bingkai cermin, bingkai foto, lampu hias. Fungsi dari perhiasan ini adalah untuk menghias ruangan (tamu, kamar tidur, ruang keluarga atau dapur

cantik). Kerajinan hasil laut tersebut juga bisa digunakan sebagai hadiah istimewa bagi teman atau sebagai cendramata bagi yang berkunjung ke Kecamatan Labuhan Meringgai, khususnya dari Desa Margasari. Kerajinan-kerajinan tersebut dibuat oleh tangan-tangan masyarakat yang ahli dalam mengrajin, sehingga tingkat kerapian dan kualitasnya sudah terjamin.

Desa Margasari Kecamatan Labuhan Meringgai Kabupaten Lampung Timur merupakan daerah pesisir pantai. Desa Margasari termasuk tipologi desa pesisir yaitu desa yang berbatasan langsung dengan laut. Desa Margasari ini berada pada ketinggian 1,5 mdpl, memiliki suhu rata-rata harian 28-40°C dengan bentang wilayah yang datar, serta memiliki bentuk tekstur tanah pasiran, dengan warna tanah sebagian besar adalah hitam (Monografi Desa Margasari, 2012). Penduduk Desa Margasari mayoritas bermatapencaharian sebagai nelayan, namun Warga Desa Margasari banyak juga mendapatkan penghasilan tambahan dari ekowisata sebagai *tour guide*, penjual makanan, pengelola ekowisata dan tak lupa juga sebagai penjual kerajinan hasil laut seperti asbak yang terbuat dari kerang, kalung dan gelang bermote mote dari kerang dan vas bunga yang terbuat dari kulit kerang. Beberapa jenis souvenir tersebut dapat di lihat pada Gambar 5.1.



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Gambar 5. 1. Contoh Souvenir dari Desa Maragasari, Kec. Labuhan Meringgai

Awalnya masyarakat bekerja di kawasan ekowisata sebagai pemandu wisata, pengelola wisata, penyedia tempat dan penjual makanan bagi wisatawan, sehingga dapat membantu perekonomian masyarakat itu sendiri. Namun setelah terjadi abrasi, pantai menjadi rusak dan tidak terawat, ekowisata hutan mangrove pun menjadi sepi, mayoritas masyarakat yang menjadi pengrajin kerajinan hasil laut dan pembuat souvenir mengalami penurunan pembeli, sehingga pendapatan masyarakat menurun bahkan tidak mendapatkan pendapatan sama sekali.

Kondisi ini sangat disayangkan mengingat Desa Margasari sangat berpotensi menjadi ekowisata hutan mangrove. Sampai saat penelitian dilakukan, masyarakat Desa Margasari hanya bisa menunggu pihak yang berwenang atau aparat desa untuk membenahi kerusakan hutan mangrove tersebut, karena hutan mangrove di desa Margasari ini masih bisa diupayakan dan masih berpotensi untuk daerah wisata, agar perekonomian Desa Margasari dapat hidup kembali, warga dapat menjalankan aktivitas ekowisata, dan dapat kembali menjual kerajinan dari hasil laut desa mereka. Hasil penelitian didapatkan bahwa pada umumnya responden mengatakan manfaat kerajinan hasil laut bagi masyarakat Desa Margasari adalah meningkatkan pendapatan para pengrajin kerang, menjadikan daya tarik Desa Margasari dengan cenderamata kerajinan hasil laut, meningkatkan kreativitas masyarakat Desa Margasari.

Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat Desa Margasari menjadi pengrajin kerajinan hasil laut adalah adanya potensi dari hasil laut untuk dijadikan kerajinan, adanya kemauan dari masyarakat, dan menambah pendapatan keluarga nelayan. Selain faktor di atas, juga ada kendala masyarakat dalam membuat kerajinan hasil laut, yaitu sulit mencari kerang yang bagus untuk bahan kerajinan, proses pembuatan lama, dan cangkang kerang mudah pecah/rusak.

D. PENUTUP

Salah satu potensi desa yang bisa dikembangkan sebagai salah satu sumber ekonomi rumah tangga masyarakat Desa Margasari adalah kerajinan hasil laut. Kerajinan hasil laut merujuk pada

produk-produk seni dan kerajinan yang dihasilkan dari bahan-bahan yang diperoleh dari laut atau perairan sekitar. Potensi kerajinan hasil laut sangat beragam dan dapat mencakup berbagai jenis bahan dan teknik. Pengembangan potensi kerajinan hasil laut tidak hanya menciptakan produk yang indah, tetapi juga dapat berkontribusi pada pelestarian lingkungan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir yang mengandalkan sumber daya laut. Kemauan masyarakat desa yang cukup tinggi perlu didukung dengan upaya pendampingan berkelanjutan.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, B. 2003. *Focus Group Discussion untuk Analisis Data Kualitatif. Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi (Cetakan Kedua)*. Penerbit PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Musapana, S., dan Amalia, I. R. 2020. Kerajinan Limbah Cangkang Kerang Sebagai Alternatif Pembuatan Bros Ramah Lingkungan Tambakrejo Semarang. *ABDI: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(1), 58-6.

BAB 6.

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI (IT) UNTUK PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT EKOWISATA

Oleh :

Prof. Dr. Ir. Kordiyana K Rangga, M.S.

Tyas Sekartiara Syafani, S.P.,M.Si.

A. PENDAHULUAN

Teknologi informasi merupakan tata cara atau sistem yang digunakan manusia untuk menyampaikan pesan, berita, data, dan perasaan kepada orang lain (Maryono dan istiana, 2008). Pengetahuan masyarakat merupakan salah satu modal untuk mempermudah penyerapan informasi. Menurut Wardhani (1994), kebutuhan informasi termasuk dalam kelompok *cognitive need*, yaitu kebutuhan yang didasari oleh dorongan untuk memahami dan menguasai lingkungan, memuaskan keingintahuan serta penjelajahan.

Informasi merupakan pesan atau kumpulan pesan yang memiliki makna dapat dilihat, didengar, dan dibaca. Informasi dapat diperoleh melalui media cetak, media elektronik dan melalui perantara manusia. Teknologi berkembang dari masa ke masa dan terciptanya banyak hal-hal baru dari teknologi sebelumnya. Masyarakat di Desa dapat menggunakan beberapa teknologi dalam memperoleh informasi mengenai pengembangan mangrove. yaitu

dapat diperoleh dari *website* dan beberapa aplikasi media massa seperti, Tik-Tok, *instagram*, *facebook*, *snack vidio* dan *youtube*.

Aplikasi media massa yang paling banyak digunakan adalah *whatsapp* dan *Facebook*. *Whatsapp* adalah salah satu aplikasi yang digunakan sebagai sarana komunikasi chat dengan mengirimkan pesan teks, gambar, vidio, dan telepon. *Facebook* merupakan jejaring sosial yang memungkinkan penggunanya menambah dan memperoleh informasi dan dapat bergabung dalam suatu komunitas untuk melakukan koneksi dan berinteraksi. Responden kebanyakan menggunakan *whatsapp* dan *facebook* secara bersamaan. Dalam penggunaan teknologi informasi masih terdapat kesulitan dalam mengakses teknologi dan mengakses informasi secara digital.

B. METODE PENELITIAN

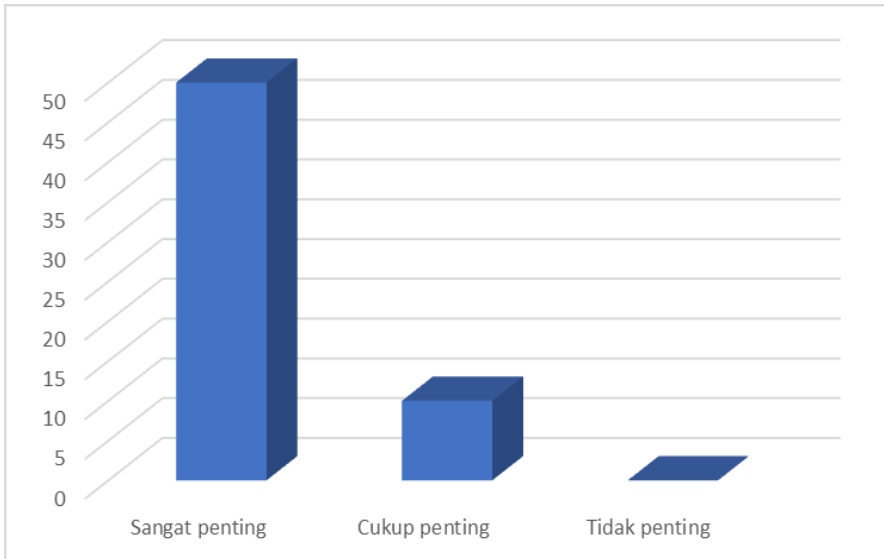
Penelitian dilakukan di Desa Margasari, Kecamatan Labuhan Meringgai, Kabupaten Lampung Timur. Lokasi ditentukan secara purposive dengan pertimbangan bahwa Desa Margasari memiliki hutan mangrove paling luas di Provinsi Lampung, sehingga dijadikan sebagai pusat kegiatan pengelolaan hutan mangrove. Penelitian dilakukan pada Mei-September 2023. Data dikumpulkan dengan wawancara kepada responden menggunakan kuesioner dan informasi-informasi yang diperoleh berdasarkan *Focus Group Discussion* (FGD), kemudian dianalisis secara deskriptif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *non-probability sampling* dan sampel ditentukan secara *purposive*, yaitu 60 orang responden.

C. PEMBAHASAN

Pemanfaatan Teknologi Informasi dapat membawa manfaat besar bagi masyarakat Desa Margasari Kecamatan Labuhan Meringgai, seperti meningkatkan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan, meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah desa, dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Selain itu, teknologi informasi dan komunikasi dapat membantu memudahkan proses komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat.

Pengaruh teknologi terhadap masyarakat sangat besar. Revolusi Industri 4.0 di Indonesia telah menyebabkan perubahan yang signifikan dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Pertumbuhan yang pesat dalam teknologi industri juga telah memengaruhi perkembangan teknologi komunikasi, yang memainkan peran penting dalam struktur kehidupan masyarakat post-modern. Terutama perubahan mentalitas dan perilaku budaya dalam konteks komunikasi melalui media digital telah menjadi aspek yang signifikan (Astuti, 2019).

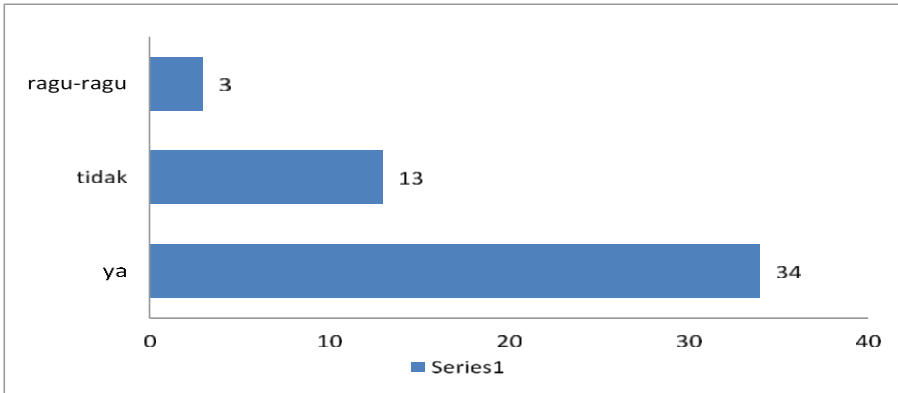
Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Margasari, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur mengalami keterbatasan dalam strategi *marketing* khususnya *digital marketing*. Masyarakat Desa Margasari memiliki alat teknologi informasi yaitu *smartphone* dan beberapa diantara mereka memiliki laptop atau perangkat komputer. Namun, tidak semua responden memanfaatkan alat teknologi informasi untuk mencari informasi ataupun berbagi informasi untuk membranding dan *marketing* wilayah mereka sendiri untuk meningkatkan kapasitas masyarakat setempat. Masyarakat Desa Margasari, Labuhan Maringgai, Lampung Timur mengenal dan beberapa diantaranya menguasai teknologi informasi berupa sosial media namun hanya untuk *entertainment* atau hiburan untuk pribadi masyarakat. Lebih jelasnya persepsi responden terkait dengan pentingnya alat teknologi informasi dapat dilihat pada Gambar 6.1 berikut ini.



Gambar 6. 1. Persepsi responden terkait dengan pentingnya alat teknologi

Gambar 6.1 menjelaskan bahwa sebanyak 45 orang (90%) responden menyatakan teknologi adalah hal yang sangat penting saat ini, dan tidak ada responden yang menyatakan bahwa teknologi merupakan hal yang tidak penting. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Margasari Labuhan Maringgai, Lampung Timur memiliki kesadaran atas urgensi penguasaan teknologi. Hal ini diperkuat dengan hanya 6 responden (12%) yang tidak memiliki alat penunjang teknologi informasi yaitu *smartphone*. Selain *smartphone*, Desa Margasari sudah memiliki *website* sebagai sarana penyebaran informasi yang diharapkan mampu menjadi pendukung untuk pengembangan kapasitas masyarakat Desa Margasari, Labuhan Maringgai, Lampung Timur, yang terakhir *update* tanggal 23 Juni 2023.

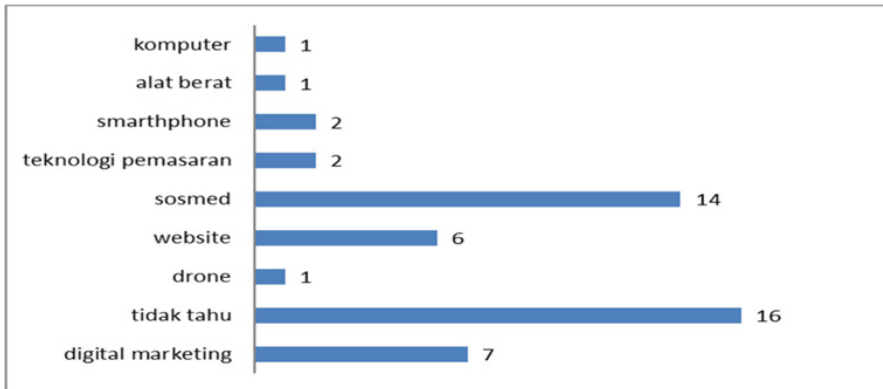
Jika dilihat dari keterbatasan penguasaan teknologi (Gambar 6.2), didapatkan bahwa sebanyak 34 orang (68%) menyatakan keterbatasan pengembangan mangrove di Desa Margasari disebabkan karena keterbatasan dalam kemampuan penggunaan teknologi, dan sebanyak 3 orang (6%) responden menyatakan ragu ragu.



Gambar 6. 2. Persepsi responden terhadap keterbatasan pengembangan mangrove disebabkan karena keterbatasan dalam kemampuan penggunaan teknologi.

Apabila dilihat dari kecocokan beberapa teknologi untuk pengembangan ekowisata mangrove (Gambar 6.2) di Desa Margasari, maka hasil penelitian menunjukkan bahwa muncul 6 alat teknologi yang dianggap responden punya kecocokan dalam pengembangan ekowisata di Desa Margasari Labuhan Maringgai, alat teknologi tersebut adalah: *computer*, *smarthphone*, teknologi pemasaran, *sosmed*, *website*, *digital marketing*. Ada 16 orang responden (32 %) menjawab tidak tahu, dan 1 orang alat berat yang cocok. Hal ini menunjukkan bahwa responden tidak mampu mengidentifikasi kebutuhan alat atau teknologi untuk pengembangan ekowisata mangrove di Desa Margasari.

Pada Gambar 6.3 juga menjelaskan bahwa sebanyak 14 responden (28 %) menyatakan *sosmed* (sosial media) merupakan alat teknologi yang cocok untuk pengembangan ekowisata mangrove di Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai.



Gambar 6. 3. Persepsi responden terhadap kecocokan alat teknologi untuk pengembangan ekowisata mangrove di Desa Margasari

D. PENUTUP

Pemanfaatan Teknologi Informasi dapat membawa manfaat besar bagi masyarakat Desa Margasari Kecamatan Labuhan Meringgai, seperti meningkatkan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan, meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah desa, dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Dengan adanya kesadaran akan pentingnya teknologi dan penguasaannya dalam masyarakat, maka pengembangan ekowisata mangrove di Desa Margasari Kecamatan Labuhan Meringgai dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi, salah satunya yaitu sosial media.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim. (2018). Pengaruh Biaya Produksi Terhadap Pendapatan Petani Mandiri Kelapa Sawit Di Kecamatan Segah. *Jurnal Ekonomi STIEP*, 3(2), 31-38. <https://doi.org/10.54526/jes.v3i2.8>
- Adhanari. (2005). *Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Produktivitas Kerja Karyawan bagian Produksi pada Maharani Handcraft di Kabupaten Bantul*. Universitas Negeri Semarang.
- Adriyani, R., Erna, E., Siswanto, A., & Indrianto, R. (2020). Pendampingan

- Kelompok Usaha Kerupuk Rajungan Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat Di Kawasan Pesisir Pantai Utara Cirebon. *Dimasejati: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 94. <https://doi.org/10.24235/dimasejati.v2i1.6653>
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Sosial dan Kependudukan*. <https://www.bps.go.id/subject/5/konsumsi-dan-pengeluaran.html>
- Bafadhol, I. (2017). Lembaga Pendidikan Islam Di Indoesia. *Jurnal Edukasi Islami Jurnal Pendidikan Islam*, 06(11), hlm 60. <http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/ei/article/view/95>
- Effendy, L., Billah, T., & Pratama, G. (2020). Preferensi Petani Dalam Penggunaan Teknologi Jajar Legowo Pada Padi Sawah Di Kecamatan Cikedung. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(3), 347-360. <https://doi.org/10.47492/jip.v1i3.81>
- Hadi Suroso, Abdul Hakim, I. N. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Gresik, Perencanaan Pembangunan Di Desa Banjaran Kecamatan Driyorejo Kabupaten. *WACANA, Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 17(1), 7-15. <http://www.wacana.ub.ac.id/index.php/wacana/article/view/290>
- Listiana, I., Sumardjo, S., Sadono, D., & Tjiptopranoto, P. (2018). Hubungan Kapasitas Penyuluh dengan Kepuasan Petani dalam Kegiatan Penyuluhan. *Jurnal Penyuluhan*, 14(2). <https://doi.org/10.25015/penyuluhan.v14i2.18673>
- Whardhani. 1994. *Diagnosis Kesulitan Belajar dan Perbaikan Belajar*. Ditjen Bimbaga Islan dan Universitas Terbuka. Jakarta.

BAB 7

KAPASITAS MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN EKOWISATA MANGROVE

Oleh :

Prof. Dr. Ir. Kordiyana K Rangga, M.S.

Tyas Sekartiana Syafani, S.P.,M.Si.

A. PENDAHULUAN

Kapasitas masyarakat merupakan suatu kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya masyarakat agar dapat mengatasi masalah, mengambil inisiatif, dan berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan politik. Dalam pengembangan kapasitas di suatu komunitas masyarakat, harus disadari bahwa mereka memiliki karakteristik budaya, geografi, sosial, politik, dan demografi yang unik, sehingga pengalaman pengembangan kapasitas di suatu komunitas masyarakat belum tentu dapat berjalan di masyarakat yang lain bahkan sangat berisiko mengalami kegagalan dan melemahkan pengalaman orang-orang dari masyarakat tersebut karena hal itu bukan proses yang cocok untuk mereka (James, 2018; Lichfiel, 2017; Sue, 2017).

Peningkatan kapasitas kelembagaan berarti usaha meningkatkan peran dan mengembangkan tata kelembagaan di tingkat masyarakat sehingga mampu mewadahi setiap gagasan, usulan dan aspirasi dari masyarakat untuk kemajuan dalam

komunitasnya. *Outcome* dari usaha ini adalah terbentuknya lembaga-lembaga berbasis komunitas untuk pembangunan dalam lingkungannya. Peningkatan kapasitas juga meliputi usaha untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan berorganisasi masyarakat dalam upaya mewujudkan tata kelembagaan yang partisipatif dan transparan (Sumaryadi, 2017).

Konsep pengembangan kapasitas masyarakat dikelompokkan menjadi empat kelompok pemberdayaan, yakni:

1. Pembiayaan, baik dalam bentuk bantuan tunai, pemberian fasilitas pinjaman modal usaha dengan skema kredit atau dana bergulir, atau bantuan subsidi bunga pinjaman modal. Pelatihan/penguatan kapasitas (tanpa pendampingan) dalam peningkatan kapasitas pelaku usaha, peningkatan keterampilan berwirausaha, hingga pembekalan sistem pelaporan keuangan usaha mikro, kecil, dan menengah.
2. Pendampingan (*coaching* dan/atau *mentoring*), baik melalui program-program yang disertai pemberdayaan reguler oleh pendamping maupun pembangunan Pusat Layanan Usaha Terpadu KUKM.
3. Perluasan akses pasar dalam berbagai bentuk, seperti:
 - a) Bantuan pemasaran produk dan informasi pasar.
 - b) Akses ke *e-commerce*.
 - c) Fasilitasi penataan lokasi usaha, peluang, peta usaha, bantuan alat/perengkapan usaha, atau revitalisasi sarana dan prasarana di tempat usaha.
 - d) Sertifikasi dan standarisasi produk (ekspor, merek/kemasan, fasilitasi sertifikasi halal, dan SNI).
 - e) Fasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual produk.
 - f) Pembinaan kemitraan dan jaringan usaha.

Elemen-elemen dalam pengembangan kapasitas merupakan hal-hal yang harus dilaksanakan dalam mencapai kondisi kapasitas masyarakat yang berkembang. Sue, (2017) menyebutkan lima elemen utama dalam pengembangan kapasitas sebagai berikut:

- a. Membangun pengetahuan, meliputi peningkatan keterampilan, mewadahi penelitian dan pengembangan, dan bantuan belajar kepemimpinan.

- b. Membangun jaringan, meliputi usaha untuk membentuk kerjasama dan aliansi.
- c. Menghargai komunitas dan mengajak komunitas untuk bersama-sama mencapai tujuan.
- d. Dukungan informasi, meliputi kapasitas untuk mengumpulkan, mengakses dan mengelola informasi yang bermanfaat.

B. METODE PENELITIAN

Pengumpulan data terkait kapasitas masyarakat dalam mendukung pengembangan ekowisata Mangrove di Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur dilakukan pada bulan Juni–Juli 2023, yang terdiri dari data primer dikumpulkan dengan wawancara kepada responden menggunakan kuesioner dan informasi- informasi lain yang diperoleh berdasarkan *Focus Group Discussion* (FGD), kemudian data dianalisis secara deskriptif.

Instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data kapasitas masyarakat dalam mendukung pengembangan ekowisata Mangrove adalah:

- (1) Daftar pertanyaan/kuesioner yang telah disusun dan disiapkan sebelum penelitian dilaksanakan.
- (2) Pedoman pertanyaan yaitu: sejumlah pertanyaan kunci terkait kapasitas masyarakat untuk merekam fenomena-fenomena kualitatif baik yang sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian.
- (3) Pengamatan langsung terhadap kapasitas masyarakat yang merupakan objek penelitian.
- (4) Wawancara secara mendalam kepada sejumlah responden terpilih dan informan lain.

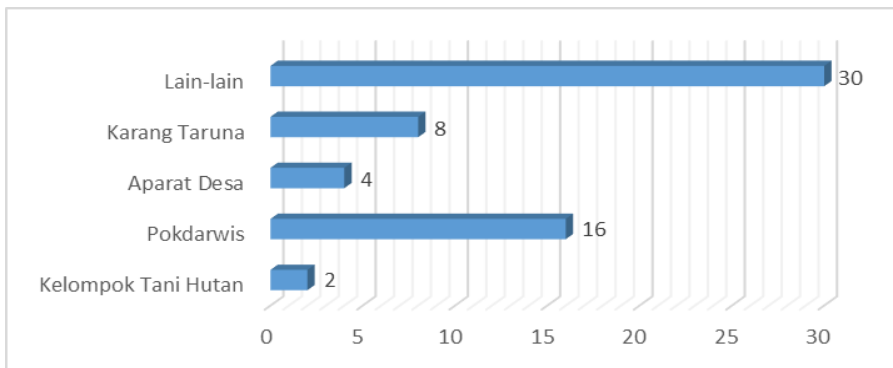
C. PEMBAHASAN

1. Kapasitas Masyarakat dalam Pengembangan Ekowisata Mangrove

Kapasitas masyarakat dalam pengembangan ekowisata Mangrove di Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai secara umum masih terbatas, baik dari aspek kapasitas manajerial, teknis, dan sosial. Namun, secara parsial kapasitas sosialnya bagus, karena sesama masyarakat saling bekerjasama untuk membangun kembali ekowisata mangrove. Kapasitas manajerial secara umum merupakan kemampuan manajer suatu organisasi dalam menjalankan fungsi-fungsi manajemen guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam upaya mencapai hasil maksimal pembangunan, dimulai dari proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan hingga selesainya pembangunan, dengan kata lain diperlukan pengelolaan secara sistematis. Dalam hal ini, sistem manajemen pemerintahan sebagai perangkat integral dan melekat dengan pengelolaan pembangunan desa berfungsi untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat. Aspek kemampuan aparat pemerintahan desa sebagai penentu dan penyelenggara manajemen pemerintahan desa harus dapat menciptakan nilai keadilan dalam proses pembangunan desa. Nilai keadilan itu berkaitan dengan pemenuhan hak-hak warga yang harus terlayani secara menyeluruh oleh pemerintah desa.

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan pembangunan Desa Margasari masih membutuhkan kemampuan manajerial aparat pemerintah desa yang handal dalam usaha memberikan kepuasan bagi masyarakat melalui pelaksanaan pembangunan desa sesuai tujuan keberadaan institusi pemerintahan sebagai organisasi publik. Pengembangan ekowisata mangrove di Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai masih bersumber dari modal sosial masyarakat setempat yang begitu kuat, meliputi kepercayaan sosial, jaringan sosial, dan norma masyarakat untuk tetap saling bekerjasama dalam membangun kembali ekowisata yang sebelumnya pernah terbangun, namun dalam pengembangan desa wisata tidak terlepas dari peran para agen perubahan salah satunya Pokdarwis (kelompok sadar wisata). Kelompok sadar wisata menjadi agen perubahan dalam mendukung keberlangsungan ekowisata yang ada

di Desa Margasari. Kelompok sadar wisata ini yang merupakan kelembagaan di tingkat masyarakat di Desa Margasari yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan aktif sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh kembangnya sapa pesona dalam meningkatkan pembangunan daerah melalui kepariwisataan dan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat. Berikut ini gambaran terkait masyarakat desa yang berperan serta dalam membangun ekowisata di Desa Margasari.



Gambar 7. 1. Keikutsertaan masyarakat dalam pengembangan ekowisata

Gambar 7.1 menjelaskan bahwa partisipasi anggota kelompok masyarakat dalam membangun ekowisata di Desa Margasari termasuk dalam kategori tinggi, yaitu sebanyak 30 orang (yang tergolong kategori lain-lain, yaitu anggota KUB, KWT, kelompok tani, PKK dan kombinasi), sedangkan yang terendah adalah dari Kelompok Tani Hutan sebanyak 2 orang.

2. Teknis Pengembangan Ekowisata

Pengembangan ekowisata berdasarkan pada Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS), yaitu Pembangunan kepariwisataan di Indonesia meliputi destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industry pariwisata, dan kelembagaan pariwisata yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk

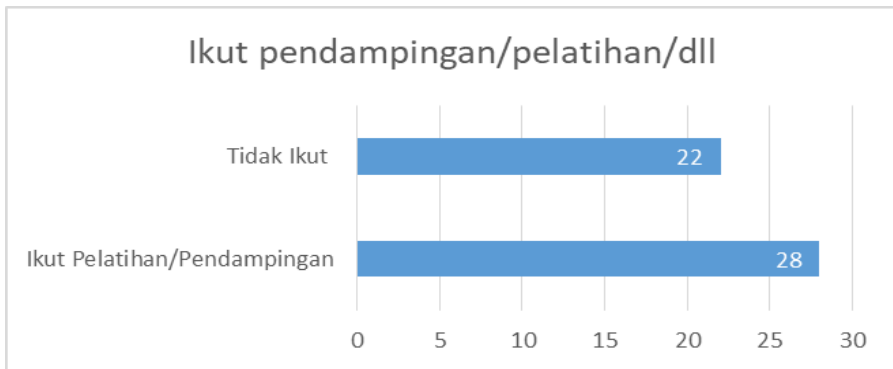
Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS). Dalam peraturan ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan arah pembangunan kepariwisataan nasional dalam kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2025. Dalam teknis pengembangan ekowisata diperlukan perencanaan. Perencanaan tersebut dapat dilakukan sebagai berikut (M. Nafi dan Supriadi, 2017).

1. Merumuskan kebijakan pengembangan ekowisata daerah dengan memperhatikan kebijakan ekowisata nasional
2. Mengoordinasikan penyusunan rencana pengembangan ekowisata sesuai dengan kewenangan daerah
3. Memberikan masukan dalam merumuskan kebijakan pengembangan ekowisata daerah dengan memperhatikan kebijakan ekowisata nasional;
4. Mengintegrasikan dan memaduserasikan rencana pengembangan ekowisata daerah dengan rencana pengembangan ekowisata lainnya, rencana pengembangan ekowisata nasional dan rencana pengembangan ekowisata provinsi yang berbatasan
5. Memaduserasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) yang dilakukan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota masyarakat dan dunia usaha dengan rencana pengembangan ekowisata.

Menurut Supriadi (2016) mengembangkan kawasan ekowisata daerah berbasis masyarakat meliputi:

1. Upaya perbaikan kondisi lingkungan di kawasan ekowisata.
2. Upaya konservasi/ reboisasi/ penanaman di dalam kawasan ekowisata.
3. Penyiapan iInfrastruktur ekowisata.
4. Peningkatan *capacity building* pengelola ekowisata.
5. Pelibatan masyarakat dalam pembangunan site kawasan ekowisata.

Berikut merupakan diagram partisipasi masyarakat Desa Margasari dalam pendampingan/pelatihan untuk mengembangkan ekowisata.



Gambar 7. 2. Diagram partisipasi masyarakat Desa Margasari dalam pendampingan/pelatihan.

Berdasarkan Gambar 7.2 dapat dilihat jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan/pendampingan sebanyak 28 orang (56 %), disadari dalam mengikuti pelatihan/pendampingan anggota kelompok mendapatkan berbagai informasi dan pengetahuan, yang dapat dijadikan sebagai modal untuk menyuarakan pendapat demi perbaikan program pengembangan ekowisata di desa margasari ini. Putusan terakhir berada pada pemegang kekuasaan, masyarakat hanya diberi kewenangan searah untuk berpartisipasi dengan memberikan pendapatnya.

3. Kapasitas Sosial Masyarakat

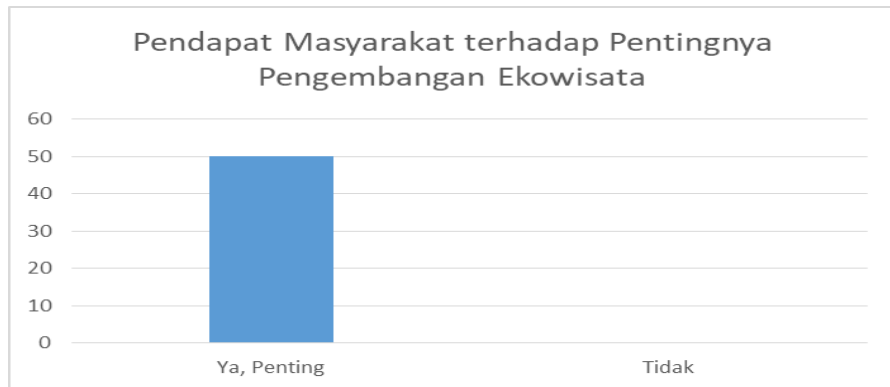
Kapasitas sosial menjelaskan pertumbuhan atau perkembangan setiap tingkat hierarki integrasi manusia atau sosial dalam waktu tertentu, yang dibentuk oleh proses sepihak, multilateral, refleksif dan/atau saling bergantung antar-individu ataupun kelompok dalam suatu wilayah tertentu. Butar dan Soemarno (2013) menyatakan bahwa persepsi masyarakat terbangun dari kapasitas sosial yaitu kemampuan untuk menyerap kegiatan pariwisata tanpa dampak negatif pada masyarakat. Persepsi dan sikap masyarakat diperoleh dari pertemuan langsung dengan

kelompok- kelompok masyarakat seperti KUB, KWT dan karang taruna, tokoh masyarakat, aparat pemerintah desa dan pemerintah Kecamatan Labuhan Maringgai. Kapasitas sosial ini perlu diperhatikan oleh pemerintah, karena peran mereka sebagai *agent of change and social*, yang akan berkontribusi dalam perubahan lingkungan dan sosial yang lebih baik.

Kondisi sosial merupakan suatu landasan pertimbangan utama dalam pengembangan kawasan ekowisata. Sosial budaya menyangkut bagaimana bagian kehidupan suatu masyarakat didalamnya termasuk persoalan budaya, kebiasaan masyarakat, adat istiadat dan masalah sosiologi lainnya perlu dipertimbangkan. Karena ekowisata yang menonjolkan kondisi alam namun dipadukan dengan kondisi sosial budaya masyarakat sebagai kearifan lokal akan menjadikan objek wisata yang berbeda dengan daerah lain. Pengelolaan dan pengembangan kapasitas ekowisata yang berbasis masyarakat merupakan strategi peningkatan ekonomi dengan tersedianya mata pencaharian alternatif. Melalui model pengelolaan berbasis masyarakat, maka masyarakat dapat dilibatkan dalam beberapa kegiatan pengelolaan seperti perekrutan karyawan pengelola pada site destinasi ekowisata (Manu dan Kuuder, 2012, serta Nurinsyah et al (2015). Beberapa kegiatan pengelolaan ekowisata baik yang terkait dengan aspek estetika, budaya, maupun rekreasi, masyarakat dapat dibina untuk selanjutnya dilibatkan dalam beberapa hal seperti *guide*, *home-stay*, keamanan, dan bentuk pelayanan jasa lainnya kepada para pengunjung. Melalui pelibatan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan diharapkan bahwa, masyarakat akan mendapatkan manfaat ekonomi dari pengelolaan ekowisata tersebut.

Menurut Slamet (1989) terdapat 4 tingkatan keterlibatan dalam perencanaan yaitu kemampuan mendefinisikan situasi yang menghendaki adanya suatu keputusan; memilih alternatif yang paling sesuai; menentukan strategi; dan menilai akibat dari keputusan, dan tindakan. Berdasarkan kriteria tersebut, partisipasi masyarakat Desa Margasari dalam proses perencanaan memiliki kemampuan mendefinisikan latar belakang kenapa ekowisata perlu dikembangkan.

Gambar berikut ini menjelaskan pendapat masyarakat terhadap pentingnya pengembangan ekowisata di Desa Margasari.



Gambar 7. 3. Pendapat masyarakat terhadap pentingnya pengembangan ekowisata

Gambar 7.3 menjelaskan bahwa pendapat masyarakat terhadap pentingnya pengembangan ekowisata di Desa Margasari, sebanyak 50 responden (100%) menyatakan penting. Bila ekowisata ini dikembangkan, akan banyak memberi dampak positif bagi pemerintah daerah dan masyarakat, dapat membuka lapangan kerja baru, dan dapat menjadikan kawasan hutan *mangrove* di Desa Margasari menjadi terkenal. Sehingga pengembangan ekowisata ini dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sekaligus meningkatkan ekonomi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan ekowisata, pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

D. PENUTUP

Kapasitas masyarakat dalam pengembangan ekowisata Mangrove di Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai secara umum masih terbatas, baik dari aspek kapasitas manajerial, teknis, dan sosial. Namun, secara parsial kapasitas sosialnya bagus, karena sesama masyarakat saling bekerjasama untuk membangun kembali ekowisata mangrove.

E. DAFTAR PUSTAKA

- James, V. U. 2018. *Capacity Building in Developing Countries: Human and nvironmental Dimensions*. London: Praeger Publishers.
- Lichfield, N. 2017. *Community Impact Evaluation*. London: UCL Press.
- Manu, I dan Kuuder, CJW., 2012. Community-Based Ecotourism and Livelihood Enhancement in Sirigu, Ghana. *International Journal of Humanities and Social Science*, 2(18):97-108.
- Nurinsiyah, D.N., B. Gunawan., T. Husodo., & T. Uchiyama. (2015). Ecotourism Development in Indonesia: A Case Study in Kawah Putih, West Java. *Journal of Rural Problems*, 51(3), 197-202.
- Slamet, Y. 1989. Konsep-konsep dasar partisipasi sosial.PAU Studi Sosial UGM Yogyakarta.
- Sue. 2017. The literature and theories behind community capacity building, In: *Sharing Success: an Indigenous perspective*. VIC Australia:Common Ground Publishing, pp. 65-93.
- Sumaryadi, I.N. 2015. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Penerbit Citra Utama.

BAB 8

FAKTOR-FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL YANG MEMPENGARUHI KAPASITAS MASYARAKAT PESISIR DALAM PENGEMBANGAN EKOWISATA MANGROVE

Oleh :

Prof. Dr. Ir. Kordiyana K Rangga, M.S.

Tyas Sekartiara Syafani, S.P.,M.Si.

A. PENDAHULUAN

Pengembangan ekowisata perlu dijadikan sebagai bagian dari pembangunan nasional yang berkelanjutan (*sustainable development*) karena merupakan bagian dari pembangunan nasional yang berkelanjutan, maka pengembangan harus dilaksanakan dalam kesatuan yang terpadu, dengan sektor-sektor pembangunan lainnya (Suwanto, 1997). Upaya pencapaian keberhasilan dalam pengembangan ekowisata pantai Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur dapat dilakukan secara optimal dengan meningkatkan faktor kekuatan dan memperbaiki faktor kelemahan menjadi energi positif. Namun, ancaman yang datang dari luar perlu diantisipasi dengan meningkatkan kecintaan terhadap budaya dan kearifan lokal. Dengan menganalisis faktor internal dan eksternal

yang dimiliki Agrowisata ini, maka kelemahan dan kekuatan yang dapat digunakan sebagai pengembangan daya tarik wisata segera dapat diketahui.

Faktor yang mempengaruhi strategi pengembangan Agrowisata di Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai Lampung Timur adalah; faktor internal, yaitu dilihat dari keterlibatan masyarakat dalam kelompok lembaga desa; pengetahuan terhadap fungsi dan manfaat hutan mangrove; kemampuan menggunakan teknologi informasi yang berkaitan dengan marketing pada media sosial; serta akses informasi lainnya, sedangkan sebagai faktor eksternal adalah: aksesibilitas jalan, dan faktor alam; yang meliputi keadaan kawasan, nelayan Desa Margasari, hutan mangrove, abrasi, dan pendanaan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan fenomena sosial dan alam secara sistematis, faktual dan akurat sehingga dapat menganalisis faktor internal dan eksternal sebagai kekuatan ataupun kelemahan. Drury dalam Moleong (2006) mengemukakan bahwa tahap analisis data kualitatif melalui proses yang meliputi: 1) mencatat hasil catatan lapangan; 2) mengumpulkan dan memilah-milah, mengklasifikasikan, membuat ikhtisar dan membuat indeks; dan 3) mencari makna data, menemukan pola dan hubungan antar data serta membuat temuan - temuan umum. Sugiyono (2016) menyatakan bahwa analisis data terdiri dari 3 (tiga) alur kegiatan sebagai berikut :

1. Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan membuang yang tidak perlu serta mengorganisasikan data sedemikian rupa hingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan difinalisasi.
2. Penyajian data (Display Data) merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan

kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data yang sering dipergunakan pada analisis data kualitatif adalah data dalam bentuk teks naratif berupa peristiwa - peristiwa yang ditampilkan secara berurutan. Data-data yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam dengan informan dikumpulkan untuk selanjutnya diambil kesimpulan yang disajikan dalam bentuk deskriptif.

3. Verifikasi dan kesimpulan hasil wawancara dengan informan kemudian ditarik kesimpulan sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian. Pada tahap ini peneliti mulai mencari arti benda-benda, mencatat keterangan, pola-pola, penjelasan. Konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proporsi. Hasil verifikasi data tersebut kemudian ditarik kesimpulan.

Tiga alur tersebut digunakan dalam menganalisis faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kapasitas masyarakat pesisir dalam pengembangan ekowisata mangrove. Berdasarkan hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa faktor eksternal yang ditemukan meliputi sifat, ekonomi, teknologi, regulasi, politik, persaingan pasar dan faktor internal seperti tanah, produk harga, distribusi, sumber daya, modal dapat menjadi peluang dan kekuatan dalam pengembangan daya tarik wisata.

C. PEMBAHASAN

1. Faktor Internal

Faktor internal yang dibahas terkait dengan kapasitas masyarakat pesisir dalam pengembangan ekowisata mangrove adalah keterlibatan dalam kelompok/lembaga desa, pengetahuan terhadap fungsi dan manfaat hutan mangrove, kemampuan menggunakan teknologi informasi yang berkaitan dengan marketing pada media sosial serta akses informasi lainnya

1. Keterlibatan dalam Kelompok/Lembaga Desa

Qurniati et al., (2022) dalam Jurnal Pengabdian berjudul Pengembangan Ekowisata Mangrove berbasis Masyarakat Lokal, menyatakan bahwa terdapat beberapa kelompok/lembaga desa

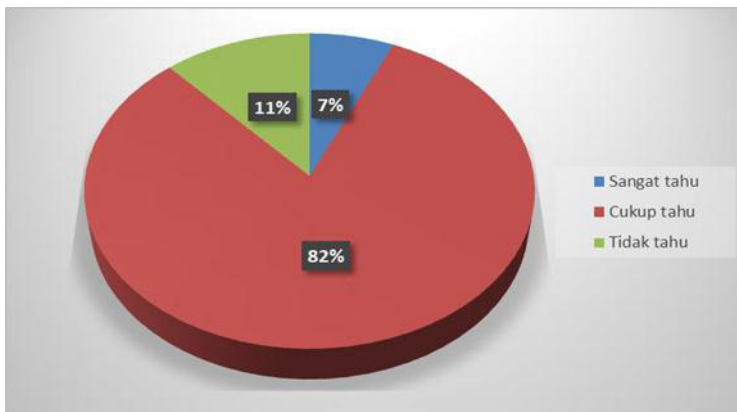
yang terlibat dalam pengembangan ekowisata Hutan Mangrove, antara lain Kelompok Tani Hutan (KTH), Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), Karang Taruna Desa Margasari, dan masyarakat sekitar hutan mangrove. Keterlibatan kelompok dan lembaga desa merupakan bagian dari masyarakat dalam kategori umur produktif yang berkisar antara 21-57 tahun. Masyarakat yang bersifat produktif inilah yang melahirkan kreativitas dan semangat yang tinggi, sehingga diharapkan mampu berinovasi dalam mengembangkan ekowisata. Kelompok dan lembaga desa sebagai bagian dari masyarakat lokal yang tumbuh dan hidup berdampingan dengan suatu objek wisata menjadi bagian penting dari sistem ekologi. Hal ini disebabkan karena masyarakat lokal merupakan tuan rumah dan unsur penggerak utama yang mampu berperan dalam mengembangkan ekowisata menjadi keunikan tradisi yang dapat dinikmati oleh wisatawan (Qurniati et al., 2022). Oleh karena itu, perlunya pengarahan kepada kelompok dan lembaga desa agar pengelolaan ekowisata disiasati dengan mengedepankan potensi lokal seperti menjual kerajinan tangan, makanan, dan minuman khas berbahan dasar mangrove. Pemanfaatan potensi lokal tersebut akan berorientasi pada kemandirian desa yang akan bermuara menuju pengelolaan berkelanjutan. Pengelola ekowisata mangrove juga dapat mereplikasi konsep ekowisata yang diterapkan di daerah lain berdasarkan potensi yang ada.

2. Pengetahuan Terhadap Fungsi dan Manfaat Hutan Mangrove

Pengetahuan terhadap fungsi dan manfaat hutan mangrove adalah pengetahuan yang dimiliki kelompok masyarakat wilayah pesisir terhadap fungsi, manfaat, kegunaan dan pengelolaan hutan mangrove (Syarif et al., 2017). Dinamika kualitas dan kuantitas ekosistem mangrove menunjukkan fluktuasi. Penurunan drastis ekosistem ini pernah terjadi pada tahun 1987, bahkan hutan mangrove di beberapa desa dinyatakan telah menghilang, salah satunya di Desa Margasari. Pada saat itu abrasi terjadi dengan hebatnya, hingga 500 m/tahun. Kenyataan ini menyadarkan masyarakat akan pentingnya keberadaan hutan mangrove. Usaha rehabilitasi dilakukan dengan serius, pada tahun 1995 kepala Desa

Margasari Bapak Sukimin menyerukan kepada masyarakat untuk menanam mangrove. Penyebaran benih api-api dilakukan dengan sukarela, pertumbuhan api-api menjadikan keadaan ekosistem mangrove di desa ini berangsur membaik. Pada tahun 2009 luas ekosistem mangrove di wilayah Desa Margasari diperkirakan sekitar 700 ha. Kembalinya hutan mangrove di desa ini maka mendorong usaha pembelajaran tentang fungsi-fungsinya, baik secara ekologis, ekonomis maupun sosial. Pulihnya keanekaragaman hayati ekosistem mangrove di Margasari seperti meningkatnya keragaman tanaman mangrove, jenis ikan, invertebrata bahkan jenis burung meningkatkan daya tariknya sebagai tujuan ekowisata.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari jurnal tersebut memberikan gambaran bahwa pengetahuan masyarakat terhadap fungsi dan manfaat hutan mangrove di Desa Margasari sudah sangat baik. Perhatian yang diberikan masyarakat terhadap keadaan lingkungan sekitar memberikan dampak positif untuk tetap melestarikan tanaman mangrove sebagai fungsi dari pencegahan abrasi pantai. Hal ini mendukung hasil yang diperoleh di lapangan sebagai berikut.



Gambar 8. 1. Diagram tingkat pengetahuan terhadap fungsi dan manfaat hutan mangrove

Berdasarkan hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat terhadap fungsi hutan mangrove didominasi oleh kategori cukup tahu. Sebanyak 41 orang responden

(82%) menyatakan telah cukup faham terhadap fungsi hutan mangrove sebagai tempat pelestarian satwa, perlindungan abrasi pantai, mencegah masuknya air asin agar tidak masuk ke ladang pertanian, dan sebagai pusat pendidikan mangrove. Beberapa manfaat yang diperoleh dalam menjaga kelestarian hutan mangrove yang masyarakat rasakan antara lain adalah: adanya pendapatan dari hasil rekreasi wisata hutan mangrove, ranting mangrove sebagai pengganti kayu bakar, memberikan sensasi sejuk di sekitar pesisir pantai, dan menambah lapangan pekerjaan masyarakat dalam ekowisata mangrove.

Sejalan dengan hasil penelitian ini, Syarief et al., (2017) menyatakan bahwa sebagian besar pengetahuan yang dimiliki responden termasuk dalam kategori tinggi yaitu 56 responden (97%). Hal ini menunjukkan bahwa responden sudah banyak yang mengetahui tentang arti pentingnya pengelolaan dan pelestarian hutan mangrove. Pengetahuan tersebut berupa jenis-jenis mangrove yang ada di Desa Margasari, fungsi hutan mangrove baik fungsi ekologis, biologis maupun fungsi ekonomis, cara penanaman mangrove, rehabilitasi hutan mangrove dan tujuan perlindungan hutan mangrove.

3. Kemampuan Menggunakan Teknologi Informasi yang Berkaitan dengan Marketing pada Media Sosial serta Akses Informasi Lainnya

Teknologi dalam pengertian sederhana diartikan sebagai barang buatan, penggunaan dan pengetahuan tentang alat, teknik, kerajinan, sistem atau metode dan manajemen. Dampak dari adanya teknologi dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari, tanpa terkecuali pada tatanan pekerjaan yakni dalam bidang produksi di suatu usaha. Hampir setiap perusahaan menggunakan teknologi baik itu berbentuk alat ataupun mesin, bahkan usaha-usaha kecilpun juga ikut memanfaatkan kemajuan ini. Adanya teknologi menjadi peluang bagi sebuah usaha agar lebih berkembang dan mudah dalam proses pencapaian yang diharapkan (Astuti, 2018). Teknologi merupakan seluruh sarana guna menyajikan barang-barang yang dibutuhkan untuk keberlangsungan hidup. Teknologi dalam penelitian ini diukur

dari penggunaan teknologi yang dilakukan kelompok masyarakat wilayah Desa Margasari yang berupa alat teknologi apa saja yang dikuasai, teknologi informasi apa saja yang, serta teknologi apa saja yang cocok digunakan untuk perkembangan ekowisata magrove. Sebaran responden berdasarkan teknologi dapat dilihat pada Tabel 8.1.

Tabel 8. 1. Penggunaan teknologi yang dilakukan kelompok masyarakat wilayah Desa Margasari

No	Skor	Klasifikasi	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	7-16	Tidak penting	0	00,00
2	17-25	Cukup Penting	10	20,00
3	26-35	Sangat Penting	40	80,00
Jumlah			50	100,00
Rata-rata = 27,96 (Sangat Penting)				

Sumber : Data primer penelitian, 2023.

Tabel 8.1 di atas menunjukkan bahwa terdapat 40 responden yang menilai bahwa penggunaan teknologi berada pada klasifikasi sangat penting dengan persentase sebesar 80,00 persen. Penggunaan teknologi dalam suatu masyarakat adalah untuk kepentingan usaha dalam mencapai tujuan. Hal ini menunjukkan bahwa responden sudah banyak yang menganggap penting tentang penggunaan teknologi guna perkembangan ekowisata magrove di Desa Margasari. Penggunaan teknologi yang dilakukan kelompok masyarakat wilayah Desa Margasari pada penelitian ini berupa alat teknologi apa saja yang dikuasai seperti smartphone, teknologi informasi apa saja yang digunakan seperti (*whatsApp*, FB, IG, Tiktok, dan *website*) serta teknologi apa saja yang cocok digunakan untuk perkembangan ekowisata seperti (media pemasaran *online*, *website*, dan sosial media).

2. Faktor Eksternal

1. Aksesibilitas Jalan

Aksesibilitas merupakan suatu tingkat kemudahan bagi seseorang untuk mencapai suatu lokasi tertentu, Aksesibilitas ini sangat terkait dengan jarak lokasi suatu daerah terhadap daerah lainnya khususnya jarak lokasi ke pusat-pusat pelayanan publik (*public service*) yang secara spasial identik dengan ibukota propinsi dan ibukota kabupaten/ kota. Selain terkait dengan jarak lokasi, aksesibilitas juga terkait dengan waktu dan biaya (Miro, 2004).

Desa Margosari terletak di Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur. Jaraknya 77 km dengan waktu tempuh sekitar 3 jam dari Kota Badar Lampung. Rute dari Bandar Lampung bisa ditempuh via Tanjung Bintang-Simpang Sribawono-Labuhan Maringgai, atau melalui KotaMetro, dengan rute Bandar Lampung-Metro-Sukadana-Way Jepara-Labuhan Maringgai, dengan waktu tempuh lebih lama. Jalan menuju Desa Margasari dapat dicapai dengan baik oleh kendaraan roda dua maupun roda empat. Keadaan jalan khususnya jalan kecamatan kurang begitu baik karena masih banyak terdapat lubang di beberapa ruas jalan, yang saat penelitian dilakukan sedang ada perbaikan jalan. Sampai saat ini, tidak ada mobil angkutan umum yang menuju ke Desa Margasari.

Perbaikan dan penambahan fasilitas dapat meningkatkan keinginan pengunjung untuk datang kembali, seperti adanya menara *birdwatching* untuk mengamati keanekaragaman jenis burung, spot foto yang *instagramable* dan berbeda dengan di tempat lain, perahu yang unik untuk wisata susur sungai menikmati pemandangan hutan mangrove, serta fasilitas yang memberikan unsur pendidikan seperti adanya papan informasi berisi jenis-jenis flora dan fauna yang terdapat di hutan mangrove Margasari. Selain itu, perlu tersedianya fasilitas untuk berbelanja kerajinan, makanan, dan minuman khas sebagai buah tangan. Seperti teh jeruju, berbagai makanan olahan tanaman mangrove dan hasil laut (dodol, sirup, teh, kerupuk, terasi, pempek, dll.), dan kerajinan dari kerang atau bahan lainnya yang tersedia melimpah di Margasari. Teh dan makanan ini dapat dikonsumsi di lokasi ekowisata ataupun dibawa pulang sebagai oleh-oleh (Qurniaty, dkk,2022).

2. Faktor alam

a. Keadaan Kawasan

Kabupaten Lampung Timur yang berada di sisi Tenggara Provinsi Lampung memiliki luas 5.325 km² atau sekitar 15 persen dari keseluruhan luas Provinsi Lampung. Hutan mangrove yang ada di Pesisir Timur Kabupaten Lampung Timur membentang dari Utara hingga ke Selatan. Sebagian besar wilayahnya masuk ke dalam kawasan Taman Nasional Way Kambas, dan sebagian lainnya berada di pesisir yang berbatasan dan berdekatan dengan Kecamatan Pasir Sakti dan Kecamatan Labuhan Maringgai.

Desa Margasari terletak di Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur Propinsi Lampung. Desa ini memiliki luas ± 1.702 hektar, dan terdiri dari 12 dusun. Desa Margasari termasuk tipologi desa pantai atau pesisir. Desa yang berada pada ketinggian 1,5 mdpl ini memiliki suhu rata-rata harian 1,50 C dengan bentang wilayah yang datar. Desa Margasari merupakan salah satu desa pantai yang memiliki bentuk tekstur tanah pasir, dengan warna tanah sebagian besar adalah abu-abu. Menurut penggunaannya, lahan di Desa Margasari terdiri dari jalan, sawah dan ladang, bangunan umum, empang, pemukiman/perumahan, jalur hijau, dan 52 pemakaman.

b. Nelayan Desa Margasari

Provinsi Lampung memiliki wilayah zona perairan laut yang cukup luas dengan jumlah 16.625 km² yang tepian pantainya ditinggali oleh masyarakat nelayan dengan jumlah 28.540 orang tersebar ke beberapa wilayah Pesisir Lampung, yang sebagian berada di Kabupaten Lampung Timur dengan jumlah Rumah Tangga Perikanan 1.652 RTP (Statistik KKP, 2020). Dari sekian ribu RTP tersebut salah satunya di Desa Margasari. Desa ini memiliki jumlah penduduk dengan total 7.337 jiwa penduduk, dengan jumlah orang yang bermata pencaharian sebagai nelayan sebanyak 1.070 jiwa (Monografi Desa Margasari, 2020). Kategori nelayan di Desa Margasari beragam jenisnya, dalam konteks ini kategori nelayan

tangkap di Desa Margasari dikelompokkan berdasarkan besaran motor kapal dan jenis alat tangkap yang dioperasikan di laut. Seperti yang diamati peneliti di lapangan, terlihat bahwa jumlah motor kapal berukuran kecil dengan alat tangkap tradisional lebih sedikit jumlahnya dibandingkan dengan jumlah motor kapal berukuran besar dengan alat tangkap modern. Dalam struktur sosialnya nelayan dengan kategori nelayan kecil tradisional di Desa Margasari merupakan bagian dari kelompok masyarakat miskin pada level terbawah yang seringkali berpotensi menjadi korban paling menderita akibat ketidakberdayaan dan kerentanannya. Seperti yang tertulis di dalam Undang-Undang Perikanan Nomor 31 Tahun 2004 pada Pasal 1 ayat (11) yang menjelaskan tentang pengertian nelayan dengan alat yang masih sederhana tergolong jenis nelayan kecil, yaitu seseorang yang berkegiatan menangkap ikan dan sumber daya laut hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) Gross Ton (GT). Mayoritas nelayan kecil tradisional di Desa Margasari masih berstatus sebagai nelayan buruh di bawah binaan para juragan dengan mempergunakan alat tangkap jaring tradisional.

Salah satu faktor penentu pendapatan nelayan kecil di Desa Margasari sangat ditentukan oleh kondisi alam di laut yang sedang terjadi (musim). Seperti halnya kondisi musim yang ada di perairan Desa Margasari. Berdasarkan pernyataan dari beberapa nelayan tradisional yang ditemui peneliti di lapangan, dalam 3 tahun terakhir ini musim (angin timuran) terjadi hampir 6-7 bulan per tahun yaitu; pada 4 pertengahan bulan Juni sampai dengan akhir Desember yang berpotensi mengakibatkan komoditas lain selain rajungan juga semakin sulit untuk didapat seperti cumi-cumi, udang, dan ikan, sedangkan pada musim panen (angin baratan) maksimal waktu yang dimiliki nelayan lebih sedikit dibandingkan dengan musim paceklik. yang bertahan kurang lebih 5 bulan saja mulai pada awal Januari sampai awal Juni. Para nelayan

kecil tradisional di Desa Margasari lebih sering menangkap komoditi rajungan pada musim panen (angin barat). Komoditas tersebut merupakan aset yang hanya dimiliki di beberapa wilayah perairan laut Indonesia salah satunya tersebar di perairan Pesisir Timur Lampung. Data Kementerian Kelautan Perikanan pada tahun 2019 mengklaim bahwa komoditas rajungan Pesisir Timur Lampung menjadi bahan baku ekspor rajungan terbesar di Indonesia mencapai 10-15 persen produksi rajungan nasional berasal dari Perairan Pesisir Timur Lampung (KKP, 2020). Pada musim berikutnya para nelayan tersebut akan beralih alat tangkap yang digunakan untuk menangkap komoditas lain seperti cumi-cumi, ikan, udang, dan kerang.

Fenomena musim paceklik (angin timur) yang terjadi di Desa Margasari di tandai dengan datangnya angin kencang yang berasal dari arah Timur, yang membawa gelombang ombak tinggi dan menyebabkan nelayan kecil tradisional di Desa Margasari tidak dapat melaut secara optimal pada musim paceklik tersebut. Sehingga, berdampak pada pemasukan keuangan ekonomi rumah tangga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Saat musim paceklik, pendapatan melaut berkurang, mereka harus menerima kondisi pahit yang terjadi karena bahkan tidak mendapat hasil sama sekali. Selain itu adanya sistem pembagian hasil pengepul/pembina dengan nelayan buruh yang dilakukan sepihak, dikarenakan harga tergantung pada keputusan juragan dalam menentukan harga barang dari hasil tangkapan para nelayan buruh, sehingga distribusi pendapatan tidak merata (Nurbayan dalam Afridania dkk, 2022).

Pada saat musim paceklik (angin Timuran) nelayan kecil tradisional di Desa Margasari yang hanya memiliki sedikit modal dan alat tangkap seadanya dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang rendah, namun harus tetap mencukupi kebutuhan hidup keluarganya, maka perlu strategi. Strategi dalam menyikapi permasalahan dan kerentanan yang terjadi, diperlukan tindakan atau strategi bertahan hidup yaitu dengan Pengembangan Ekowisata Hutan Mangrove.

c. Hutan Mangrove

Hutan mangrove adalah salah satu sumberdaya alam wilayah pesisir yang memegang peranan penting bagi kehidupan. Hal ini disebabkan karena hutan mangrove memiliki banyak manfaat yang dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung (Tiara et al., 2017). Beragamnya manfaat tersebut mampu memberikan sumbangan yang besar bagi perekonomian masyarakat sekitar melalui sektor kehutanan, perikanan, industri, pariwisata, dan sektor lainnya (Suwarsih, 2018). Salah satu potensi hutan mangrove yang belum dimanfaatkan secara optimal adalah pariwisata berbasis ekologi atau lebih dikenal dengan istilah ekowisata (Fahrian et al., 2015).

Pengembangan ekowisata mangrove perlu dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memberikan edukasi tentang pentingnya konservasi hutan mangrove. Konsep ekowisata yang diterapkan di hutan mangrove dapat dijadikan sebagai pendekatan dalam memanfaatkan sumberdaya yang berwawasan lingkungan. Bentuk pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya yang optimal merupakan teknik yang tepat untuk melestarikan sumberdaya alam (Takarendehang et al., 2018).

Fungsi hutan mangrove dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu fungsibiologis/ekologis, fungsi fisik dan fungsi sosial ekonomis. Selain itu manfaat mangrove adalah sebagai peningkatan taraf hidup masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari dua tingkatan, yaitu tingkat ekosistem mangrove secara keseluruhan (lahan tambak, lahan pertanian, kolam garam, ekowisata) dan tingkat komponen ekosistem sebagai primary biotic component (masing-masing flora dan faunanya) (Kustanti, 2011). Fungsi biologis/ekologis dari hutan mangrove adalah mencegah erosi dan kerusakan pantai, mencegah intrusi air laut ke daratan, menjaga kestabilan lapisan tanah, meredam hantaman gelombang dan ombak, serta mengurangi kekuatan angin ketika mencapai ekosistem mangrove (Kordi, 2012). Selain itu fungsi fisik dari

hutan mangrove adalah dalam melindungi pantai dari gelombang, angin dan badai. Tegakan mangrove dapat melindungi pemukiman, bangunan, dan pertanian dari angin kencang dan intrusi air laut. Mangrove juga memainkan peranan penting dalam melindungi pesisir dari terpaan badai (Siahaya et al., 2016).

Pemanfaatan hutan mangrove sebagai sarana ekowisata memerlukan rencana pengelolaan yang komprehensif untuk menjamin keberlanjutannya. Peran *stakeholder* sangat diperlukan untuk mewujudkan pengelolaan tersebut (Febryano, 2014). Kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai nilai ekonomi ekowisata mangrove menjadikan kegiatan pengelolaan belum berjalan baik, sehingga perlu dilakukan penilaian ekonomi sebagai langkah untuk menentukan arah pengelolaan (Maulida et al., 2019). Karena itu perlu merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan hutan mangrove berkelanjutan dengan tetap memperhatikan aspek, fungsi, dan peran ekosistem hutan mangrove.

d. Abrasi

Sejalannya dengan waktu, kerusakan lingkungan pantai semakin marak dan bertambah. Sama halnya hutan-hutan mangrove yang dulunya menghiasi pesisir pantai, kini telah dibabat habis oleh manusia karena keserakahannya untuk memperkaya diri dengan membangun sarana wisata dan tempat rekreasi, seperti pondokan dan sebagainya. Begitupula dengan pasir pantainya yang kerap terjadi pada penambang tanpa izin dan tidak memikirkan dampak yang akan terjadi apabila tidak menjaga kelestarian pantai.

Menurut Arsyad (2013) air laut bergelombang di permukaannya, kadang-kadang besar kadang-kadang kecil, tergantung pada kecepatan angin dan kedalaman dasar lautnya. Semakin dalam dasar lautnya makin besar gelombangnya. Gelombang mempunyai kemampuan untuk mengikis pantai. Akibat pengikisan ini banyak pantai yang menjadi curam dan terjal, tetapi kerusakan atau kerugian yang diakibatkan abrasi pantai bisa diperkecil dengan cara

tetap menjaga kelestarian di sekitar pantai, baik hutan mangrove maupun pasir pantainya. Abrasi merupakan salah satu masalah yang mengancam kondisi pesisir dan garis pantai, merusak tambak maupun lokasi pemukiman yang di pinggir pantai, serta mengancam bangunan yang berbatasan langsung dengan air laut. Abrasi pantai didefinisikan sebagai mundurnya garis pantai dari posisi asalnya. Dampak abrasi pantai menimbulkan banyak permasalahan pada penduduk pesisir, karena pengetahuan tentang abrasi pantai masih sangat terbatas. Karna kurangnya kesadaran dan pengetahuan tentang abrasi pantai mengakibatkan penduduk tidak dapat memprediksi kejadian dan cara adaptasi menghadapi abrasi pantai, sehingga diperlukan peningkatan pengetahuan abrasi pantai.

Pengetahuan tentang abrasi pantai merupakan hal yang paling utama bagi penduduk pesisir dalam menentukan bentuk adaptasi yang dilakukan dalam pengurangan dampak risiko bencana abrasi Pantai. Terjadinya abrasi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Rachman (2015), faktor-faktor penyebab perubahan garis pantai ada dua macam yaitu faktor alami dan faktor manusia. Faktor alami adalah: gelombang arus, angin, sedimentasi, pasang surut, dll, sedangkan faktor manusia meliputi penggalian, penimbung, reklamasi pantai, dan lainnya. Akibat dari abrasi pantai mengakibatkan hilangnya lahan pemukiman, lahan pertambakan dan mata pencaharian yang berdampak langsung pada penurunan kualitas hidup masyarakat yang berada di wilayah pesisir pantai seperti nelayan, petani dan petambak yang kehidupannya tergantung pada sumber daya alam, namun kondisi lingkungan dan sumber daya alam pesisir pantai yang rentan tersebut berdampak pada aspek sosial ekonomi dan sosial budaya penduduk (Damaywanti, 2013).

3. Pendanaan

Ekowisata mangrove merupakan suatu bentuk pemanfaatan sumberdaya hutan yang memperhatikan aspek jasa dan lingkungan secara berkelanjutan. Masyarakat Desa Margasari saat ini sudah mengembangkan hutan mangrove sebagai sarana ekowisata yang telah diresmikan pada awal tahun 2019. Pengembangan ekowisata mangrove dipandang mampu bersinergi dengan langkah konservasi hutan secara nyata (Tarigan, 2019). Sebenarnya sejak tahun 2000, ekowisata mangrove telah dikembangkan di Desa Margasari, tetapi hingga tahun 2017 wisatawan yang berkunjung 5-10 orang/bulan (Setiawan et al., 2017), bahkan pernah mencapai 100 orang/bulan. Peningkatan jumlah pengunjung yang signifikan disebabkan karena adanya bentuk promosi dan pengembangan objek wisata yang mampu meningkatkan minat pengunjung. vKeadaan tersebut dapat mempengaruhi nilai ekonomi yang dihasilkan dari bentuk pemanfaatan hutan mangrove. Berbeda dengan kondisi sekarang saat penelitian ini dilakukan, pengunjung semakin berkurang, akibat abrasi yang merupakan salah satu masalah yang merusak kondisi pesisir dan garis pantai, merusak tambak maupun lokasi pemukiman yang di pinggir pantai, serta mengancam bangunan yang berbatasan langsung dengan air laut. Berbagai fasilitas yang disediakan di lokasi meliputi jembatan, spot foto, tempat duduk, saung, dan perahu untuk mengelilingi hutan mangrove, sangat diperlukan, meskipun fasilitas tersebut masih kurang lengkap, seperti tempat sampah, kamar mandi, papan informasi, tempat kuliner, penginapan, wahana bermain anak, dan fasilitas pendukung lainnya. Sebelumnya di lokasi tersebut telah menyediakan beberapa fasilitas menarik seperti menara *bird watching*, *track trail*, dan dermaga apung (Ariftia et al., 2014), tetapi saat ini fasilitas tersebut sudah tidak berfungsi lagi karena adanya perluasan tambak udang milik masyarakat yang menutupi akses menuju lokasi, dan terjadinya abrasi.

Pengelolaan objek wisata alam dipengaruhi oleh kualitas layanan petugas. Hal ini sejalan dengan penelitian Fatini dan Dewi (2020) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan yang semakin baik menyebabkan kepuasan pengunjung semakin tinggi, sehingga

petugas objek wisata harus memprioritaskan pelayanannya kepada pengunjung. Upaya peningkatan nilai ekonomi ekowisata mangrove masih perlu dilakukan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menyediakan berbagai fasilitas wisata yang menarik untuk meningkatkan minat pengunjung. Menurut Rizky et al. (2016), partisipasi masyarakat lokal sangat penting, karena masyarakat dapat menyalurkan kekreatifitasannya dan juga menentukan kualitas produk. Selain itu, masyarakat juga merupakan faktor penentu dalam menjalankan partisipasi pada pengelolaan hutan mangrove secara lestari (Febryano et al., 2014; Siahaya et al., 2016; Qurniati et al., 2017; dan Alfandi et al., 2019). Berdasarkan hal tersebut, masyarakat di Desa Margasari memiliki peran yang sangat penting dalam pendanaan pada Ekowisata Hutan Mangrove di Desa Margasari, berawal dari nelayan yang memiliki permasalahan pada musim panceklik menjadikan masyarakat sekitar harus memutar otak untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka, namun semenjak Ekowisata Hutan Mangrove mengalami abrasi tersebut membuat Ekowisata Hutan Mangrove rusak, sehingga berimbas pada mata pencarian para masyarakat yang mengelola Ekowisata Hutan Mangrove tersebut. Dalam penanggulangan abrasi yang terjadi, terdapat pihak-pihak yang merasa prihatin atas peristiwa tersebut dari Lembaga Pendidikan hingga pemerintahan daerah. Desa Margasari memiliki pusat kegiatan pengelolaan hutan mangrove yang disebut *Lampung Mangrove Center* (LMC). Pusat kegiatan LMC ini meningkatkan kesadaran masyarakat Desa Margasari mengenai pentingnya hutan mangrove di lingkungan tempat tinggal mereka. *Lampung Mangrove Center* didirikan sejak tahun 1995 hingga sekarang. Berdirinya LMC ini dilatarbelakangi karena terjadinya kerusakan hutan mangrove sebagai sabuk hijau (*green belt*) di Pesisir Timur Lampung sudah memprihatinkan.

Kerusakan yang telah terjadi disebabkan oleh abrasi, konversi lahan, pencemaran pantai oleh sampah, dan kurangnya kesadaran masyarakat. Kerusakan lahan mangrove di kawasan Pesisir Kabupaten Lampung Timur membuat berbagai pihak (pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, masyarakat desa, lembaga swadaya

masyarakat, perguruan tinggi dan lain-lain) ikut campur dalam berbagai upaya penanggulangan perubahan tutupan mangrove di Kecamatan Labuhan Maringgai khususnya di Desa Margasari. Kegiatan penanggulangan kerusakan hutan mangrove membuat beberapa pihak khususnya masyarakat Desa Margasari dibantu oleh berbagai pihak membuat program antara lain Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dan *stakeholders* yang terdiri dari Universitas Lampung dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam melestarikan kawasan hutan mangrove. Program LMC bertujuan untuk mewujudkan suatu sistem tata kelola wilayah pesisir secara terpadu untuk keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat serta menjadi permodelan pengelolaan mangrove berskala nasional. Dalam program LMC terdiri dari beberapa program yaitu salah satunya adalah kegiatan pelatihan pendidikan mengenai ekosistem mangrove, dari berbagai kegiatan dalam program LMC kegiatan yang paling aktif dalam program ini yaitu kegiatan pelatihan pendidikan mengenai ekosistem mangrove, hal ini dikarenakan semakin lama luas tutupan hutan mangrove yang terus mengalami penurunan. LMC berada di Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai, karena di Desa Margasari ini merupakan desa yang banyak mengalami penurunan luas hutan mangrove. Program pelestarian hutan mangrove melalui kegiatan pelatihan pendidikan ekosistem mangrove yang dilakukan dalam program LMC melibatkan masyarakat yang ada di Desa Margasari.

D. PENUTUP

Faktor internal yang dibahas terkait dengan kapasitas masyarakat pesisir dalam pengembangan ekowisata mangrove adalah keterlibatan dalam kelompok/lembaga desa, pengetahuan terhadap fungsi dan manfaat hutan mangrove, kemampuan menggunakan teknologi informasi yang berkaitan dengan marketing pada media sosial serta akses informasi lainnya. Sedangkan faktor eksternalnya adalah kemudahan aksesibilitas jalan, faktor alam seperti keadaan kawasan, hutan mangrove, nelayan Desa Margasari, abrasi, serta faktor pendanaan.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Alfandi, D., Qurniati, R., and Febryano, I. G. 2019. Community Participation in Mangrove Management. *Jurnal Sylva Lestari* 7(1): 30-41. DOI: 10.23960/jsl1730-41.
- Ariftia, R.I., Qurniati, R. & Herwanti, S. 2014. Nilai ekonomi total hutan mangrove Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur. *Jurnal Sylva Lestari*, 2(3), 19-28.
- Arsad, M. 2013. *Kerusakan lingkungan pesisir pantai*, arsadmoonl.blogspot.com.
- Damaywanti, K. (2013). Dampak Abrasi Pantai terhadap Lingkungan Sosial (Studi Kasus di Desa Bedono , Sayung Demak). Prosiding Seminar Nasional Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan, (ISBN 978-602-17001-1-2), 363-367.
- Fahrian, H.H., Putro, S.P. dan Muhammad, F. 2015. Potensi ekowisata di kawasan mangrove, Desa Mororejo, Kabupaten Kendal. *Jurnal Biosaintifika*, 7(2), 104- 111.
- Fatini, N.A. dan Dewi, R.S. 2020. Pengaruh kualitas produk dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan pengunjung wisata Vanaprastha Gedong Songo Park Kabupaten Semarang. *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 10(1), 110-120.
- Febryano, I.G. 2014. Politik Ekologi Pengelolaan Mangrove di Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung. Bogor: Institut Pertanian Bogor. 113p.
- Kordi, K.M.G.H. 2012. Ekosistem Mangrove : Potensi, Fungsi dan Pengelolaan.
- Kustanti, A. 2011. Manajemen Hutan Mangrove. Penerbit IPB Press, Bogor. 248 hlm.
- Maulida, G., Supriharyono. & Suryanti. 2019. Valuasi ekonomi pemanfaatan ekosistem mangrove di Kelurahan Kandang Panjang, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. *Journal of Maquares*, 8(3), 133-138.
- Miro, F. 2004. Perencanaan Transportasi untuk Mahasiswa, Perencana dan Praktisi. Erlangga. Jakarta.
- Moleong, L. J. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung. Penerbit Rineka Cipta, Jakarta. 256 hlm.

- Qurniati, R., Heryandi, Duryat, Tsani, M. K., & Hartati, F. (2022). Pengembangan Ekowisata Mangrove Berbasis Masyarakat Lokal. *J-Abdipamas*, 6(2), 217- 224.
- Rachman, R.K., Ismunarti, D.H., Handoyo, G. 2015. Pengaruh Pasang Surut Terhadap Sebaran Genangan Banjir Rob Di Kecamatan Semarang Utara. *Jurnal Oseanografi*. Vol. 4, No. 1, Tahun 2015, Hal. 1- 9.
- Rizky, M., Yunasfi. & Lubis, M.R.K. 2016. Kajian potensi ekowisata mangrove di Desa Sialang Buah, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Aquacoastmarine*, 11(1), 68-82.
- Setiawan, W., Harianto, S.P. & Qurniati, R. 2017. Ecotourism development to preserve mangrove conservation effort: Case study in Margasari Village, District of East Lampung, Indonesia. *Journal of Ocean Life*, 1(1), 14(19).
- Siahaya, M.E., Salampessy, M.L., Febryano, I.G., Rositah, E., Silamon, R.F. & Ichsan, A.C. 2016. Partisipasi Masyarakat Lokal Dalam Konservasi Hutan Mangrove Di Wilayah Tarakan, Kalimantan Utara. *Jurnal Nusa Sylva*. 16(1): 12- 17.
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R dan D. CV. Bandung.
- Suwantoro ,G. 1997. Dasar-Dasar Pariwisata. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Suwarsih. 2018. Pemanfaatan ekologi dan ekonomi dari program rehabilitasi mangrove di kawasan pesisir pantai Desa Jenu Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban. *Jurnal Techno-fish* 2(1): 12-18.
- Syarief, Y. A., Nikmatullah, D., Prayitno, R. T., & Silviyanti, S. (2017). *Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemanfaatan Non Kayu dan Pelestarian Hutan Mangrove di Desa Margasari Kecamatan Labuhan Marringgai Kabupaten Lampung Timur*.
- Takarendehang, R., Sondak, C.F.A., Kaligis, E., Kumampung, D., Menembu, I.S. & Rembet, U.N.W.J. 2018. Kondisi ekologi dan nilai manfaat hutan mangrove di Desa Lansa Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Pesisir dan Laut Tropis*, 2(1), 45-52.

- Tarigan, A.A. 2019. Persepsi Masyarakat Terhadap Potensi atau Daya Tarik Pengembangan Ekowisata Mangrove di Belawan. Medan: Universitas Sumatera Utara. 38p.
- Tiara, A.R., Banuwa, I.S., Qurniati, R. & Yuwono, S.B. 2017. Pengaruh kerapatan mangrove terhadap kualitas air sumur di Desa Sidodadi Kabupaten Pesawaran. *Jurnal Hutan Tropis*, 5(2), 93-98.

BAB 9

MODEL STRATEGI PENGEMBANGAN EKOWISATA MANGROVE DI DESA MARGASARI KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI, LAMPUNG TIMUR

Oleh :

Prof. Dr. Ir. Kordiyana K Rangga, M.S.

Tyas Sekartiara Syafani, S.P.,M.Si.

A. PENDAHULUAN

Ekowisata adalah bentuk pariwisata yang berfokus pada pelestarian alam, pendidikan lingkungan, dan pengalaman wisata yang bertanggung jawab secara lingkungan. Tujuan utama ekowisata adalah untuk menghargai dan melestarikan keanekaragaman hayati dan ekosistem alam sambil memberikan manfaat ekonomi dan pendidikan kepada masyarakat setempat dan pengunjung. Ekowisata memiliki potensi untuk mempromosikan kesadaran lingkungan, mendukung pelestarian alam, dan memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat lokal.

Pengembangan ekowisata mangrove adalah upaya untuk menggabungkan pelestarian ekosistem mangrove dengan tujuan wisata yang berkelanjutan. Hal ini dapat memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat setempat sambil mempromosikan kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan. Namun, untuk

berhasil secara berkelanjutan, maka ekowisata harus dikelola dengan hati-hati, mematuhi prinsip-prinsip keberlanjutan, dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Oleh karena itu, perlu strategi-strategi yang digunakan untuk mengembangkan ekowisata dengan tetap memperhatikan keberlanjutan kesehatan lingkungan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Kabupaten Lampung Timur dengan pertimbangan kabupaten tersebut sebagian besar merupakan daerah yang terletak di pesisir pantai dan dikelilingi oleh perbukitan serta dataran rendah. Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, nelayan, atau bekerja di sektor perdagangan dan jasa. Lokasi penelitian terletak di Desa Margasari merupakan desa yang memiliki hutan mangrove paling luas di Provinsi Lampung, sehingga dijadikan sebagai pusat kegiatan pengelolaan hutan mangrove, namun pengembangan dan pengelolaan ekowisata di Desa Margasari masih belum maksimal.

Waktu pelaksanaan penelitian untuk pengumpulan data di lapangan telah dilakukan pada bulan Juli-Agustus 2023 dilanjutkan dengan analisis data dan pembahasan pada bulan September 2023. Data dikumpulkan dengan wawancara kepada responden menggunakan kuesioner dan informasi-informasi yang diperoleh berdasarkan *Focus Group Discussion* (FGD), kemudian dianalisis secara deskriptif. Populasi penelitian adalah masyarakat Desa Margasari, Kabupaten Lampung Timur. Menurut Roscoe (1982) dalam Sugiyono (2021), ukuran sampel yang layak dalam penelitian minimal adalah 30, sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini dirancang sebanyak 60 orang responden. Instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data adalah:

- 1) Daftar pertanyaan/kuesioner yang disiapkan dan disusun sebelum penelitian dilaksanakan.
- 2) Pedoman pertanyaan yaitu: sejumlah pertanyaan kunci untuk merekam fenomena-fenomena kualitatif baik untuk responden penelitian maupun pihak-pihak lain yang terkait yang sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian.

- 3) Pengamatan langsung terhadap objek penelitian.
- 4) Wawancara secara mendalam kepada sejumlah responden terpilih dan informan lain yang diperlukan.
- 5) Kuesioner yang dibuat dalam beberapa bentuk, baik yang bersifat pilihan jawaban yang menunjukkan pemeringkatan jawaban, maupun dalam bentuk jawaban terbuka.

Strategi pengembangan ekowisata mangrove dirumuskan melalui analisis SWOT, yaitu menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi suatu usaha dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Untuk merumsukan sebuah strategi, maka perlu diidentifikasi faktor internal dan faktor eskternal yang dapat mempengaruhi pengembangan ekowisata mangrove di Desa Margasari. Identifikasi ini dilakukan dengan melakukan Focus Group Discussion (FGD).

Analisis SWOT dilakukan dengan beberapa tahapan antara lain:

1. Menyusun faktor internal (IFE) dan faktor eksternal (EFE) dalam pengembangan ekowisata maka masing-masing faktor ditentukan bobot dan rangkingnya.
2. Pemberian bobot masing-masing faktor mulai dari sangat penting (1,0) sampai dengan tidak penting (0,0).
3. Setelah bobot ditentukan kemudian rating ditentukan dari pengaruh. Nilai rating memiliki rentang 1 s/d 5. Rating 1 berarti tidak berpengaruh sedangkan rating 5 berarti sangat berpengaruh.
4. Skor ditentukan hasil pengalian antara bobot dengan rating.
5. Kemudian tentukan total skor faktor internal dan faktor eksternal

C. PEMBAHASAN

Berdasarkan pembahasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas masyarakat dalam mengembangkan ekowisata mangrove, maka dapat diidentifikasi kelemahan, kekuatan, peluang, dan ancaman yang dapat diuraikan sebagai berikut.

1) Kekuatan

Poin ini adalah aset atau sumber daya internal yang memberikan keunggulan kompetitif kepada ekowisata mangrove di Desa Margasari. Hal ini dapat berupa keunggulan produk, teknologi, keahlian khusus, merek yang kuat, tim yang berkompeten, atau aset finansial yang solid. Berdasarkan hasil wawancara dan diskusi saat FGD, kekuatan utama dalam pengembangan ekowisata mangrove di Desa Margasari adalah luas lahan. Desa Margasari memiliki potensi luas mangrove terluas di Provinsi Lampung. Beberapa wilayah sudah memiliki pagar pemecah ombak sehingga dapat menekan abrasi dan erosi air laut. Selain itu, kepedulian, kerjasama, dan keterlibatan masyarakat yang cukup tinggi untuk bersama-sama membangun dan mengembangkan kembali ekowisata mangrove. Ekowisata ini menjadi salah satu obyek wisata alam alternatif yang ada di Provinsi Lampung. Banyak UMKM hasil olahan atau tangkapan laut serta kerajinan yang dapat mendukung fasilitas penyediaan makanan dan cinderamata.

2) Kelemahan

Poin ini adalah faktor internal yang menghambat kemampuan entitas untuk mencapai tujuannya. Kelemahan dapat berupa kurangnya sumber daya, kurangnya infrastruktur, manajemen yang lemah, atau masalah internal lainnya yang perlu diatasi. Berdasarkan hasil wawancara dan diskusi saat FGD, kekuatan utama dalam pengembangan ekowisata mangrove di Desa Margasari adalah aksesibilitas ke lokasi ekowisata yang tidak memadai, seperti jalan rusak, terdapat banyak fasilitas yang rusak karena dampak abrasi, masih belum optimalnya pusat informasi, serta rendahnya pendanaan untuk rehabilitasi.

3) Peluang

Ini adalah faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan oleh entitas untuk mencapai tujuannya. Peluang bisa berupa perkembangan pasar, perubahan tren industri, pertumbuhan permintaan, atau perkembangan teknologi baru yang dapat dimanfaatkan. Pendanaan merupakan salah satu aspek yang penting

dalam mengembangkan ekowisata mangrove karena kebutuhan pendanaan yang diperlukan cukup besar. Dana Desa adalah salah satu bentuk alokasi dana dari pemerintah pusat ke desa-desa di Indonesia. Program ini diperkenalkan dalam rangka untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan di tingkat desa. Dana Desa bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada desa-desa untuk mengelola sumber daya dan anggaran mereka sendiri agar dapat memenuhi kebutuhan dasar penduduk desa serta meningkatkan infrastruktur dan layanan publik. Dalam hal ini, alokasi dana desa dapat menjadi salah satu alternatif sumber pendanaan yang dapat digunakan untuk mengembangkan ekowisata mangrove di Desa Margasari.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Presiden No. 73 Tahun 2012 menyebutkan bahwa ekosistem mangrove merupakan sumberdaya lahan basah wilayah pesisir dan sistem penyangga kehidupan dan kekayaan alam yang nilainya sangat tinggi, oleh karena itu perlu upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan secara lestari untuk kesejahteraan masyarakat. Dibentuklah Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove (SNPEM) sebagai upaya dalam bentuk kebijakan dan program untuk mewujudkan pengelolaan ekosistem mangrove lestari dan masyarakat sejahtera berkelanjutan berdasarkan sumber daya yang tersedia sebagai bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Adapun pendanaan yang diperlukan untuk melaksanakan Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini juga didukung melalui Peraturan Presiden Nomor 120 tahun 2020 bahwa pemerintah Indonesia menargetkan Rehabilitasi Mangrove Nasional seluas 600.000 hektar hingga tahun 2025 sehingga dibentuk Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) melalui program *Indonesia's Mangrove for Coastal Resilience (M4CR)*.

4) Ancaman

ni adalah faktor eksternal yang dapat mengganggu atau merugikan entitas. Ancaman bisa berupa persaingan yang ketat, perubahan regulasi, risiko ekonomi, atau perubahan tren konsumen yang dapat mengurangi permintaan. Berdasarkan hasil wawancara dan diskusi saat FGD, ancaman dalam pengembangan ekowisata mangrove yang paling utama adalah abrasi pantai, serta dampak negatif aktifitas ekowisata (sampah, kegiatan yang merusak ekosistem), persaingan dengan obyek wisata lain. Berdasarkan identifikasi kelemahan, kekuatan, ancaman, dan peluang yang telah diuraikan sebelumnya, kemudian disusun matrik. Matrik SWOT ini merupakan mekanisme untuk menerapkan rencana faktor-faktor strategis suatu usaha yang dapat dilihat secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi organisasi dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Matriks SWOT disajikan pada Tabel 9.1.

Tabel 9. 1. Matriks SWOT pengembangan ekowisata mangrove desa margasari, kecamatan labuhan maringgai

<p style="text-align: center;">INTERNAL</p> <hr/> <p style="text-align: center;">EKSTERNAL</p>	<p style="text-align: center;">KEKUATAN</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Memiliki hutan mangrove terluas ● Keterlibatan dan kepedulian masyarakat yang cukup tinggi terhadap ekosistem mangrove ● Menjadi salah satu obyek wisata alam alternatif yang ada di Provinsi Lampung 	<p style="text-align: center;">KELEMAHAN</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Aksesibilitas ke lokasi ekowisata yang tidak memadai, seperti jalan rusak, terdapat banyak fasilitas yang rusak karena dampak abrasi ● Masih belum optimalnya pusat informasi ● Rendahnya pendanaan untuk rehabilitasi
<p style="text-align: center;">PELUANG</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Masyarakat menyukai ekowisata sebagai salah satu alternatif tempat wisata ● Adanya dana desa ● Dukungan pemerintah melalui instansi terkait dengan adanya Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove yang didanai oleh APBD berdasarkan Perpres No.73 Tahun 2012 & Perpres No. 120 tahun 2020 ● Dukungan dinas instansi terkait dan akademisi dari Perguruan Tinggi 	<p>Mengembangkan ekowisata mangrove melalui pemberdayaan masyarakat partisipatif, serta menjadikan kegiatan konservasi serta rehabilitasi mangrove sebagai salah satu program wisata dengan memanfaatkan pendanaan dan meningkatkan komitmen pemerintah terhadap pengembangan mangrove.</p>	<p>Membangun lokasi ekowisata mangrove yang baru dengan mempertimbangkan lokasi yang sudah terlindungi oleh pagar pemecah ombak serta meningkatkan aksesibilitas (terutama infrastruktur jalan), serta melakukan rehabilitasi / peningkatan penanaman mangrove dengan memanfaatkan pendanaan yang tersedia dari pemerintah dan alokasi dana desa.</p>

ANCAMAN

- Abrasi pantai
- Persaingan dengan obyek wisata lain
- Dampak negatif aktifitas ekowisata (sampah, kegiatan yang merusak ekosistem)

Meningkatkan kegiatan rehabilitasi hutan mangrove serta strategi marketing untuk menciptakan citra ekowisata melalui keterlibatan masyarakat sekitar. Penegakan hukum dan aturan untuk menjaga kelestarian mangrove juga perlu dipertegas.

Penguatan konsep *ecotourism* dan meningkatkan sarana dan prasana, serta memperbaiki fasilitas yang rusak. Agar bisa bersaing dengan obyek wisata lainnya, mengoptimalkan adanya pusat pelayanan untuk memberikan informasi dan peraturan-peraturan yang berlaku di ekowisata mangrove.

Berdasarkan hasil dari strategi pengembangan ekowisata mangrove menggunakan analisis SWOT. Strategi SO, yaitu mengembangkan ekowisata mangrove melalui pemberdayaan masyarakat partisipatif, serta menjadikan kegiatan konservasi serta rehabilitasi mangrove sebagai salah satu program wisata dengan pemanfaatan pendanaan dan meningkatkan komitmen pemerintah terhadap pengembangan mangrove. Strategi WO yaitu membangun lokasi ekowisata mangrove yang baru dengan mempertimbangkan lokasi yang sudah terlindungi oleh pagar pemecah ombak serta meningkatkan aksesibilitas (terutama infrastruktur jalan), serta melakukan rehabilitasi/peningkatan penanaman mangrove dengan memanfaatkan pendanaan yang tersedia dari pemerintah dan alokasi dana desa.

Adapun strategi ST, yaitu meningkatkan kegiatan rehabilitasi hutan mangrove serta strategi marketing untuk menciptakan citra ekowisata melalui keterlibatan masyarakat sekitar. Penegakan hukum dan aturan untuk menjaga kelestarian mangrove juga perlu dipertegas. Strategi WT, yaitu Penguatan konsep *ecotourism* dan peningkatan sarana dan prasana, serta memperbaiki fasilitas yang rusak. Agar bisa bersaing dengan obyek wisata lainnya, mengoptimalkan adanya pusat pelayanan untuk memberikan informasi dan peraturan-peraturan yang berlaku di ekowisata mangrove.

Berdasarkan beberapa alternatif strategi yang telah dirumuskan, berdasarkan hasil FGFD, maka strategi WO yaitu memanfaatkan peluang untuk menekan kelemahan yang dimiliki digunakan sebagai strategi yang paling memungkinkan untuk dilakukan. Strategi WO, mengembangkan ekowisata mangrove melalui pemberdayaan masyarakat partisipatif, serta menjadikan kegiatan konservasi serta rehabilitasi mangrove sebagai salah satu program wisata dengan pemanfaatan pendanaan dan meningkatkan komitmen pemerintah terhadap pengembangan mangrove. Ekowisata merupakan mata pencaharian alternatif bagi masyarakat pesisir yang dapat menambah pendapatan mereka. Selain itu dalam pengelolaan ekowisata dan strategi konservasi hutan mangrove, keterlibatan para *stakeholders* sangat berperan penting. Proyek

ekowisata dapat berhasil jika stakeholders melaksanakan peran mereka dalam pengelolaan ekowisata maupun konservasi hutan mangrove (Satyanarayana *et al*, 2012).

Pengembangan ekowisata dapat dilakukan dengan membangun lokasi ekowisata mangrove yang baru yang sudah terlindungi oleh pagar pemecah ombak. Lokasi ekowisata yang sebelumnya rusak terkena dampak abrasi sangat sulit untuk dipertahankan dan dibangun kembali karena kerusakan yang parah dan memungkinkan pengeluaran dana yang lebih banyak untuk memperbaikinya. Dalam hal ini pemberdayaan masyarakat partisipatif diperlukan untuk memaksimalkan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan ekowisata mangrove. Pemberdayaan masyarakat partisipatif adalah suatu pendekatan atau proses yang bertujuan untuk meningkatkan peran dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program, proyek, atau kebijakan yang memengaruhi kehidupan masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan kontrol lebih besar kepada masyarakat dalam menentukan masa depan dan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara mandiri.

Dalam kerangka *blue economy*, pemberdayaan masyarakat partisipatif dapat berperan penting dalam mencapai tujuan ini dengan melibatkan komunitas lokal dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan dan proyek yang berkaitan dengan sumber daya laut dan pesisir. Lebih jauh, model pemberdayaan masyarakat partisipatif pada masyarakat Desa Margasari akan semakin mendorong tercapainya pengembangan ekowisata mangrove yang berkelanjutan, sebab sekaligus dapat mengatasi kelemahan yang diidentifikasi pada SWOT. Salah satunya masih belum optimalnya pusat informasi dan terbatasnya kemampuan pemanfaatan teknologi informasi. Melalui pemberdayaan partisipatif berupa penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan, maka keterampilan manajerial masyarakat dalam mengelola pusat informasi dan pemanfaatan teknologi informasi untuk membentuk dan meningkatkan citra ekowisata mangrove di Desa Margasari dapat diatasi.

D. PENUTUP

Strategi pengembangan ekowisata mangrove di Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur dirumuskan melalui analisis SWOT untuk mendapat beberapa strategi, seperti Strategi SO, Strategi WO, Strategi ST, dan Strategi WT. Berdasarkan beberapa alternatif strategi yang telah dirumuskan dan dilakukan analisis FGFD, maka strategi yang paling memungkinkan untuk dilakukan adalah strategi WO yaitu memanfaatkan peluang untuk menekan kelemahan yang dimiliki. Strategi WO, mengembangkan ekowisata mangrove melalui pemberdayaan masyarakat partisipatif, serta menjadikan kegiatan konservasi serta rehabilitasi mangrove sebagai salah satu program wisata dengan pemanfaatan pendanaan dan meningkatkan komitmen pemerintah terhadap pengembangan mangrove.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Satyanarayana, B., Bhanderi, P., Debry M., Maniatis D.,Fore´F., Badgie D., Jammeh K., Van Sebaran lama tinggal responden di desa wingT., Farcy C.,Koedam N., & Dahdouh- Guebas .,(2012) a socio-ecological assessment aiming at improved forestResource management and sustainable ecotourism developmentIn the mangroves of tanbi wetland national park, the gambia,West africa. Report. AMBIODOI .10.1007/ s13280-012-0248-7.
- Sugiyono. (2021). *Statistika untuk Penelitian (31st ed.)*. CV. ALFABETA.

BIODATA PENULIS



Prof. Dr. Ir. Kordiyana K. Rangga, M.S.

lahir di Menggala Tulang Bawang pada tanggal 25 April 1959. Pendidikan Dasar diselesaikan Penulis di Menggala dan Pendidikan Menengah Atas di SMAN 2 Bandar Lampung. Penulis menyelesaikan S1 pada tahun 1983 di Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian (Sosek) Fakultas Pertanian Universitas Lampung (Unila). Pada tahun 1991 Penulis menamatkan Pendidikan S2 di Institut Pertanian Bogor (IPB) pada Jurusan Gizi Masyarakat dan Sumberdaya Keluarga (GMSK), dan pada tahun 2014 Penulis menamatkan Pendidikan terakhir S3 di Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS) pada Program Studi Penyuluhan Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat (Minat Utama Pemberdayaan Usaha Mikro/ Bisnis Kecil). Mulai tahun 1984 Penulis bekerja sebagai dosen di Fakultas Pertanian Universitas Lampung, di Jurusan Agribisnis (dahulu disebut Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian). Selain mengajar, Penulis juga aktif dalam kegiatan penelitian, pengabdian/pemberdayaan/pengembangan Masyarakat, dan menulis artikel di Jurnal ilmiah nasional/internasional secara mandiri maupun berkelompok di bidang Sosial Ekonomi Pertanian (Pemberdayaan/ Penyuluhan, Ekonomi, pangan, dan gizi). Selain sebagai dosen, juga sebagai *Editorial Boards* pada *Suluh Pembangunan – Journal of Extension and Development* yang dikelola oleh Program Studi Magister Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian, Universitas Lampung.



Penulis bernama **Tyas Sekartiara Syafani, S.P., M.Si**, lahir di Pringsewu pada tanggal 23 September 1992, merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Tyas menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1) di Jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung pada tahun 2014. Kemudian, melanjutkan pendidikan Magister (S2) Agribisnis di kampus yang sama dan lulus pada tahun 2019. Saat ini, bekerja dan mengabdikan di Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Lampung sebagai dosen sejak tahun 2021. Beberapa matakuliah yang diampu berkaitan dengan komunikasi penyuluhan dan kelembagaan ekonomi pertanian. Selain sebagai tenaga pendidik, juga sebagai editor pada *Suluh Pembangunan – Journal of Extension and Development* yang dikelola oleh Program Studi Magister Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian, Universitas Lampung. Tyas melakukan beberapa penelitian dan publikasi artikel dalam bidang sosial ekonomi pertanian yang berkaitan dengan ketahanan pangan dan perilaku petani.